هوليستيك

المجلة للعلوم الاسلامية والاجتماعية

Volume 14, Number 01, 2013/1435 H

Ilman Nafi'a
FATWA PLURALISME DAN PLURALITAS AGAMA MUI
(Majlis Ulama Indonesia)
DALAM PERSPEKTIF TOKOH ISLAM CIREBON

Wardah Nuroniyah
FEMINISME DALAM PESANTREN: NARASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI PONDOK PESANTREN BUNTET CIREBON

Juju Jumena
RELASI STATUS ASET YAYASAN DAN LEMBAGA PONDOK PESANTREN AS
-SALAFIYAH BODE LOR KECAMATAN PLUMBON

Reza Oktiana Akbar
DESAIN MODUL DAN PEMBELAJARAN TRILINGUAL (ARAB-INGGRIS-
INDONESIA) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI MTS CANDANG
PINGGAN DAN KHUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN

holistik

Volume 14, Number 01, 2013/1435 H

holistik

Journal for Islamic Social Sciences

Volume 14, Number 01, 2013/1435 H

Muslihudin
MODEL PESANTREN KADER;
Relasi Ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS, serta Artikulasinya
dalam Kegiatan Kepesantrenan

Budi Manfaat
PRAKTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PONDOK PESANTREN DAR AL-
TAUHID CIREBON

Muzaki
PENGARUH KEPEMIMPINAN KYAI TERHADAP KECERDASAN EMOSI
SANTRI DI PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU BABAKAN CIWARINGIN
CIREBON

Saifuddin
ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PESANTREN
(Studi Terhadap Pengelolaan Ma'had Aly di PP. Babakan Ciwaringin
dan PP. Asembagus Situbondo)

ISSN: 1412-3564

MODEL PESANTREN KADER; Relasi Ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS, serta Artikulasinya dalam Kegiatan Kepesantrenan

❖ Muslihudin
Dosen IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

ABSTRAK

Beberapa lembaga pendidikan dapat dengan mudah dibaca sebagai lembaga pendidikan beraroma PKS. Ada sejumlah asumsi yang mendasari kesan tersebut; 1) pendirinya dan pengelolanya orang-orang PKS, 2) mengusung simbol-simbol PKS, 3) mengajarkan Islam ala PKS, 4) menjadi basis perjuangan politik PKS. Dari jenis lembaga pondok pesantren yang memberi kesan pesantren PKS adalah pesantren Khusnul Khatimah di Jalaksana Kuningan. Meskipun kelahiran pesantren ini mendahului kelahiran PKS, namun kesan yang tersimpan di benak masyarakat terhadap pesantren ini adalah pesantren PKS. Boleh jadi kesan tersebut dibangun oleh masyarakat ketika membaca fenomena hubungan Pesantren Khusnul Khotimah dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam hal ini harus dibuktikan model hubungan antara partai politik PKS dengan pesantren Khusnul Khotimah sehingga menjadi karakteristik baru atau model baru pesantren di Indonesia, bahkan terori baru tentang pesantren di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan relasi yang sangat kuat antara perjuangan islamisasi ala timur tengah di Pesantren Khusnul Khotimah Kuningan Jawa Barat, dan proses tarbiyah yang dibangun sebagai gerakan politik PKS untuk ikut partisipasi dalam demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Pesantren, Relasi, Ideologis, Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS), Artikulasi.*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pesantren dalam kehidupan ummat Islam Indonesia sangat penting. Menelisik sejarah hubungan ummatmengambil hati para kyai yang berpengaruh untuk bergabung ke Golkar dengan jalan membiayai perjalanan ke luar negeri dan menyediakan dana untuk pesantren-pesantren mereka. GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) yang hampir mati dihidupkan kembali setelah lebih dari 800 kyai diundang untuk menghadiri konferensi yang menunjuk Mayjen Sudjono Humardani yang jelas abangan menjadi pelindung GUPPI untuk mendengarkan pidato presiden (Harold Crouch, 1986:300).

Pasca reformasi tahun 1998, euphoria kehidupan partai politik kembali mencuat. Rezim orde baru yang telah memasung selama lebih dari 30 tahun hasrat politik masyarakat telah menggeliatkan kembali mereka ketika kehidupan multi partai menjadi arusutama kebijakan politik Indonesia. Sejumlah pentolan partai mengenang romantisme kepartaian masa lalu dengan mendirikan sejumlah partai politik yang mengusung ragam ideologi dan cita-cita. Politik Islam seolah kembali mendapat ruang sehingga melahirkan sejumlah partai politik Islam dengan tokoh-tokoh Islam yang memiliki ragam latar belakang. Politik identitas tak pelak menghiasi latar politik Indonesia.

Politik identitas terutama yang mengusung ideologi politik Islam menjadi tempat bersemayamnya tokoh-tokoh pesantren. Khittah perjuangan yang diusung beragam dari yang berideologi syariah murni, berideologi sosialisme Islam, dan yang berideologi nasionalisme religius. Sejatinya partai Islam menyampaikan pesan optimisme perjuangan Islam, namun tetap saja partai Islam tidak terlalu laku di jual, perolehan suara partai Islam tidak terlalu signifikan. Pesan yang lahir dari sekian kali pemilu pascareformasi terhadap politik Islam adalah lemahnya daya jual politik identitas yang boleh jadi meminjam istilah Robert A Dahl (1985:148) sebagai bagian dari dilema demokrasi. Ketika kemandirian (otonomi) politik umat Islam dibuka dan diberi katalis, pada saat yang sama kontrol terhadap aspirasi ummat Islam sulit diwujudkan.

Peran politik pesantren pasca reformasi tidak berubah, secara kelembagaan pesantren istiqomah pada wilayahnya; sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* dan lembaga pemberdayaan ummat Islam. Identitas pesantren tetap berada dalam wilayah kulturalnya meskipun pengelolanya membangun identitas politik tertentu sesuai dengan trend dan romantism ideologis yang diilikinya. Peran sosiologis pesantren sebagai lembaga pembudayaan tetap mengemuka dibanding peran pesantren sebagai lembaga politik yang memberi "legitimasi" kekuasaan. Meskipun demikian berkah demokrasi politik pasca reformasi dapat dinikmati sejumlah pesantren.

Hubungan partai politik dengan pesantren tidak demikian kentara atau bersifat permanen kecuali menjelang pemilu. Itupun lebih banyak bersifat simbolik dibanding substantif. Misalnya kunjungan tokoh politik tertentu ke sejumlah pesantren yang memberi kesan menggiring imajinasi masyarakat tentang pesantren yang bersangkutan terhadap partai politik yang mengunjunginya. Tidak ada partai Islam yang secara terang-terangan menetapkan pesantren tertentu sebagai lembaga pengkaderan atau pengembangan ideologi politik tertentu.

Berbeda dengan itu semua adalah pada kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang didirikan tahun 1998 ini mengusung gerakan tarbiyah dengan pola perjuangan yang relatif sistematis. PKS sebagai partai disamping bergerak dalam pergulatan kekuasaan serta perjuangan cita-cita ideologis sebagai partai Islam, ia juga membuat simpul-simpul pengkaderan melalui lembaga pendidikan. Paling tidak lembaga pendidikan menjadi bagian dari sarana perjuangan partai. Beberapa lembaga pendidikan dapat dengan mudah dibaca sebagai lembaga pendidikan beraroma PKS. Ada sejumlah asumsi yang mendasari kesan tersebut; 1) pendirinya dan pengelolanya orang-orang PKS, 2) mengusung simbol-simbol PKS, 3) mengajarkan Islam ala PKS, 4) menjadi basis perjuangan politik PKS.

Untuk mensiasati keterbatasan waktu dan dana penelitian, maka kegiatan penelitian ini hanya difokuskan pada artikulasi ideologi PKS sebagai partai politik dalam kegiatan pengelolaan Pesantren Khsunul Khotimah. Artikulasi yang dimaksud di sini

adalah pengaruh yang nampak dan bisa ditunjukan dalam kegiatan pengelolaan PP Khusnul Khotimah. Untuk mengorganisasikan penelitian, maka masalah penelitian dirinci ke dalam pertanyan penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimanakah kondisi eksisting kegiatan pengelolaan pendidikan PP Khusnul Khotimah Jalaksana Kuningan?
2) Bagaimanakah pengaruh PKS dalam kegiatan pengelolaan pendidikan PP Khusnul Khotimah Jalaksana Kuningan?
3) Bagaimanakah pengaruh tersebut diartikulasikan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan di PP Khusnul Khotimah Jalaksana Kuningan.

B. KAJIAN TEORITIK

Pesantren (pondok, dayah, surau) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Istilah pesantren berasal dari kata 'santri' yang ditambah awalan 'pe' dan ahiran 'an' berarti tempt tinggal para santri (Azyumardi Azra, 2000). Menurut Martin van Bruinessen (1994) pesantren adalah bagian dari tradisi besar (*great tradition*) muslim di Indonesia yang menjadi bagian institusi kegiatan transmisi keagamaan kaum muslimin Indonesia. Profesor Johns berpendapat bahwa terma santri berasal dari bahasa Tamil yang diartikan sebagai 'guru mengaji'. Sedangkan menurut CC Berg terma tersebut berasal dari istilah 'shastri' yang dalam bahasa India berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab agama Hindu. Kata 'shastri' sendiri berasal dari kata 'shastra' yang berarti buku-buku suci, buku-bku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Tetapi menurut Robson, kata santri berasal dari bahasa Tamil 'sattiri' yang diartikan sbagai orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan secara umum (Azyumardi Azra, 2000).

Merunut kepada asal muasalnya, sangat wajar jika istilah pesantren diduga kuat familiar dengan kosa kata agama Hindu. Hal ini disebabkan karena pesantren memiliki hubungan kultural dengan tradisi kagamaan Hindu. Pesantren lahir sebagai bentuk

metamorfosis dari model penggodogan ahli agama Hindu-Budha yang kemudian di Islamkan. Sehingga lembaga pendidikan pesantren memiliki sifat asli Indonesia (*indignous*) dan terutama sangat khas Jawa (Azyumardi Azra, 2000). Pesantren tertua didirikan sekitar abad ke 18 berada di desa Tegalsari dekat Ponorogo Jawa Timur (Bruinessen dalam Farish A. Noor dkk, 2008). Pesantren terssebut sampai saat ini masih ada.

Saat ini pesantren di Indonesia telah menembus angka 25.785 buah (Kemenag RI 2010). Jumlah tersebut tersebar meskipun tidak merata di seluruh Indonesia. Populasi terbesar pesantren berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten sekitar 77,8% sedangkan sisanya berada di luar Jawa. Tentu saja jumlah tersebut adalah jumlah yang tercatat dan dilaporkan, sementara banyak pesantren yang boleh jadi belum terdata.

Secara umum pesantren dikelompokan kedalam 3 jenis (tipologi pesantren) yaitu; pondok pesantren *salafiyah*, pondok pesantren *khalafiyah/ashriyah* dan pondok pesantren kombinasi. Dari tiga jenis pesantren tersebut sebanyak 10.709 (41,5%) pesantren adalah masuk katagori pesantren salafiyah, sebanyak 2.471 (9,6%) masuk kepada katagori pesantren khalafiyah/ushriyah sedangkan sisanya sebanyak 12.605 (48,9%) masuk kepada jenis pesantren kombinasi (Kemenag RI, 2010;104).

Sistem pengetahuan pesantren berkembang dengan bertumpu kepada empat pusat kesadaran utama yang meliputi; 1) kesadaran terhadap budaya dan adat istiadat, 2) kesadaran terhadap agama, 3) kesadaran terhadap lingkungan alam, dan 4) kesadaran terhadap arus modernisasi.

Gambar 2. Model Sistem Pengetahuan Pesantren

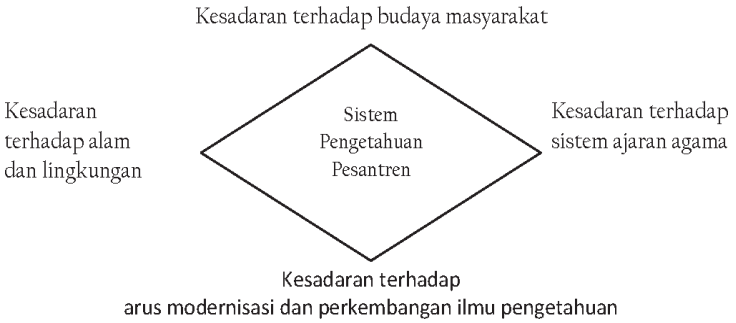

Empat kesadaran pengetahuan pesantren ini menjadi perspektif yang dipergunakan masyarakat pondok pesantren untuk mengembangkan model pengelolaan pesantren yang kontekstual sekaligus bersifat antisifatif terhadap perkembangan yang sedang terjadi. Berangkat dari sistem pengetahuan pesantren yang terus berkembang, maka penyajian mater-materi yang bukan agama menjadi bentuk baru kebijakan pesantren. Sistem pengetahuan pesantren tidak lagi berpusat pada figur kyai, tetapi sistem pengetahuan yang dibangun atas kepekaan terhadap budaya masyarakat sekitar sebagai basis utama pesantren yang dipadukan dengan pemahaman terhadap sistem ajaran agama perubahan dan pergeseran alam dan lingkungan serta kesadaran terhadap arus modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1) Relasi Ideologik Pesantren Dengan Partai Politik; Suatu Analisis

Pesantren dalam sejarahnya dibangun oleh figur-figur individual. Dengan demikian kebanyakan diwarisi secara turun-temurun oleh suatu keluarga. Keberadaannya sebagai lembaga milik perorangan menyebabkan pesantren dikelola dengan menggunakan manajemen keluarga dengan mengedepankan figur kharismatik kyainya. Pada saat yang sama pesantren menjadi artikulasi cita-cita ideologis serta pemahaman keagamaan dari pemiliknya. Melihat karakteristiknya yang demikian, pesantren relatif independen dari berbagai kepentingan diluar visi dan misi yang dibangun oleh pendirinya. Para pendiri pesantren menghibbahkan pikiran dan dan materinya untuk semata-mata *tafaqquh fiddin* dan pengembangan dakwah agama di masyarakat.

Setelah pesantren membina dasar-dasar kulturalnya, pesantren melakukan ekspansi gerakan. Dalam ekspansi ini dibutuhkan relasi-relasi yang dibangun atas dasar persamaan visi, misi dan ideologi atau faham ajaran. Kekuatan pesantren semakin mengemuka setelah memiliki dukungan struktural. Ada ruang untuk mobilitas vertikal pesantren, baik melalui ruang organisasi kemasyarakat seperti; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, al-Isrsyad maupun melalui ruang politik.

Relasi pesantren dengan organisasi kemasyarakat biasanya terbangun lebih erat serta mengembang menjadi relasi yang bersifat ideologis-kultural. Relasi ini diduga kuat muncul karena kesamaan ideologi dan faham ajaran yang didalami di pesantren. Sejumlah pesantren di Indonesia memiliki relasi ideologis-kultural dengan Nahdlatul Ulama karena mewariskan faham ajaran *ahlussunnah waljamaah* (aswaja) yang menjadi dasar gerakan organisasi kemasyarakatan NU. Pesantren Muhammadiyah memiliki relasi ideologis-kultural dengan Muhammadiyah karena mewariskan faham anti *takhayyaul*, *bid'ah* dan *churafat* (TBC) dalam kegiatan belajarnya. Pesantren Persis memiliki relasi ideologis-kultural dengan Persis karena mewariskan semangat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*) dalam kegiatan belajarnya. Demikian pula pesantren al-Irsyad memiliki hubungan ideologis-kultural dengan ormas al-Irsyad karena mewariskan faham Islam dan semangat arabisme di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya pesantren membangun hubungan organisatori yang lebih erat dengan organisasi sosial kemasyarakat, sehingga hubungan pesantren dengan ormas tidak hanya sebatas hubungan ideologis tetapi hubungan organisatoris. Pesantren dalam hal ini menjadi sub sistem dari sistem pengelolaan organisasi kemasyarakatan tersebut.

Dengan demikian, (khusunya di Jawa Barat) kita dapat menemukan beberapa pesantren sesuai dengan afiliasi ormasnya seperti; Pondok Pesantren Cipasung, Pondok Pesantren Ciwaringin, Pondok Pesantren Buntet, yang secara ideologis berafiliasi ke ormas Nahdlatul Ulama. Merujuk kepada genealogisnya Nahdlatul Ulama lahir dalam kultur pesantren, sehingga pesantren dengan NU memiliki hubungan yang bersifat generatif, tidak mengherankan jika sebagian besar pondok pesantren memiliki relasi secara ideologis dan kultural dengan ormas NU. Pondok Pesantren yang berafiliasi ke Ormas Muhammadiyah; Muallimin/Muaallimat Muhammadiyah Leuwiliang Kab. Bogor, Pondok Pesantren Islamic Centre Muhammadiyah Cipanas Pacet Kab. Cianjur, Pondok Pesantren Muallimin/ Muallimat/Tsanawiyah Muhammadiyah Kota

Wetan Kab. Garut, Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Singaparna Kab. Tasikmalaya, dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegallega Barat Kodya Bandung. Pondok Pesantren yang berafiliasi ke ormas Persatuan Islam (Persis); Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong Garut, Pesantren Persatuan Islam (Persis) Rancabango Garut, Pesantren Persatuan Islam Benda Tasikmalaya, Pesantren Persatuan Islam (Persis) Cempakawarna Tasikmalaya.

Ada juga beberapa pesantren yang secara eksplisit tidak memiliki afiliasi baik secara ideologis atau kultural terhadap ormas tertentu. Meskipun individu pengurusnya menjadi aktifis Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Misalnya Pondok Pesantren Darussalam Ciamis dimana dua orang pengelola utamanya menjadi aktifis dua ormas yang berbeda; yang satu menjadi pengurus pusat Muhammadiyah dan yang kedua menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, pengelolanya aktif di Nahdlatul Ulama dan yang lain aktif di Persatuan Ummat Islam (PUI).

Berbeda dengan ormas, hubungan pesantren dengan partai politik tidak berkembang menjadi relasi ideologis-kultural dan relasi organisatoris. Hal ini tentu sangat logis karena partai politik meskipun memiliki ideologi partai serta mainstream gerakan, tetapi keberadaannya hanya mengikat ke dalam anggota partai dan bersifat ekslusif. Ideologi ini tidak dijadikan dasar fundamental bagi pesantren untuk membangun relasi dengan partai politik. Boleh jadi ada pesantren yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengan partai politik tetapi memiliki relasi yang sangat baik. Seperti dikemukakan dimuka relasi pesantren dengan partai politik secara kelembagaan tidak terjadi, kecuali dalam bentuk yang bersifat pragmatis, personal dan bersifat simbiotik.

2) PKS: Antara Organisasi Kemasyarakatan dan Gerakan Politik Islam

Kelahiran Partai Keadilan (PK) atau yang sekarang dikenal

dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) yang didirikan tanggal 20 Juli 1998 tidak bisa dipisahkan dari momentum reformasi tahun 1998-1999 yang puncaknya adalah dengan lengsernya Presiden Suharto pada tanggal 2 Mei 1998 (Budiyanto, 2007). Tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa mundurnya Suharto dari kepresidenan RI —yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun— disambut dengan euforia politik Bangsa Indonesia yang gegap gempita dan meluas diseluruh penjuru nusantara. Efek yang paling terasa dari euforia reformasi ini adalah proses pertumbuhan partai politik yang sangat cepat.

Partai Keadilan (PK) adalah partai yang lahir dari momentum euforia reformasi meskipun basisnya telah berkembang cukup lama di kampus-kampus dalam bentuk gerakan tarbiyah dan dakwah. Gerakan tarbiyah ini mengadopsi model Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Hasan Al-Banna tokoh utamanya ditambah dengan model Jamiat al-Islamy Abu Ala al-Maududy (Norma Permata, 2008). Gerakan Tarbiyah adalah gerakan yang mengadopsi konsep islamisasi secara gradual (*gradual islamization*) yang dimulai dari individu ke dalam keluarga, ke dalam masyarakat kemudian dalam politik (Norma Permata, 2008).

Seperti juga ibu kandungnya Ikhwanul Muslimin, gerakan tarbiyah tidak bersifat politis. Doktrin politiknya berkembang pada proses pengembangan sistem masyarakat Islam melalui langkah yang bertahap (gradual) yang disebut dengan orbit yang meliputi: Pertama *ta'sisi* (*the formation stage*) yaitu mengawali pembentukan gerakan dakwah. Kedua *tandzimi* (*the foundation stage*) merujuk pada pengembangan organisasi melalui rekruitmen kader untuk mengembangkan jaringan organisasi. Ketiga *sya'bi* (*the socialization stage*) mengawali gerakan dakwah dengan memperkenalkan aktifitas dakwah kepada publik yang lebih luas dan melakukan rekruitmen anggota secara terbuka. Keempat *muasasi* (*the penetration stage*) terdiri dari kegiatan partisifasi gerakan dakwah melalui proses pelembagaan politik seperti mengikuti pemilu. Kelima *dauly* (*government phase*) aktor dakwah menduduki posisi

pemerintahan (Norma Permata, 2008).

Bagi aktifis dakwah yang berbasis di kampus-kampus ini reformasi dimakna sebagai *harakatul ishlah* (gerakan perbaikan) dan diartikulasikan dalam format yang lebih konstruktif (Eko Purwono, 2007). Setelah berpartsisfasi dalam pemilu pertama pasca reformasi dan dianggap belum memuaskan, maka pada tanggal 20 April 2002 PK bermetamorfosis menjadi PKS (Norma Permata, 2008). Kelahiran PKS diyakini berangkat dari cita-cita luhur untuk memperjuangkan aspirasi ummat Islam dan dakwah melalui institusi kepartaian. Kelahiran partai ini diyakini mampu memberikan warna lain profil partai Islam dari yang selama ini muncul. Karakteristik yang membedakan antara PKS dengan partai Islam lain adalah; basisnya yang relatif lebih ideologis, pola pengkaderan yang sistematis, pola gerakan yang sistematis, kader yang relatif militan, pengelolaan isu dan citra yang profesional, tidak secara tegas mencantumkan kata 'Islam' dalam namanya.

Dimaklumi bahwa aktivis gerakan dakwah yang menjadi basis utama PKS berada di kampus-kampus besar di Indonesia—terutama di UGM dan UI. Maka wajar jika rata-rata para fungsionaris partai adalah mereka yang tergolong muda dan dari kalangan intektual Islam Kampus. Setidaknya ada 52 orang tokoh yang dikumpulkan dan mewakili berbagai institusi, lembaga yang selama ini masuk dalam jaringan aktivitas kelompok dakwah. Profesi ke-52 orang itu beragam, mulai dari dosen di berbagai kampus (umum maupun agama), pengusaha, pimpinan pesantren, mantan pimpinan mahasiswa. Tetapi kesemuanya diikat oleh latar belakang yang sama, yaitu keterlibatan mereka dalam aktivitas dakwah. Hampir bisa dipastikan ke-52 orang tersebut adalah mereka yang terbiasa mengisi berbagai acara keagamaan (Eko Purwono, 2007).

Gerakan dakwah yang berpusat-pusat di kampus pada awalnya hanya memfokuskan diri pada kegiatan ritual dan praktek agama di kampus-kampus. Mereka menamakan gerakan dakwahnya dengan *jamaah tarbiyah* untuk membedakannya dengan kegiatan dakwah kampus yang lain terutama yang di pengaruhi oleh organisasi radikal misalnya

kelompok *usrah* yang telah dipenetrasi oleh garakan bawah tanah Darul Islam (Muhtadi, 2012:41-42). Dengan demikian Jamaah Tarbiyah murni sebagai kelompok kegiatan dakwah kampus yang tidak bersentuhan dengan politik praktis. Pengenalannya dengan gerakan politik setelah melahirkan KAMMI tahun 1998 dalam kegiatan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) di Malang. KAMMI inilah sebenarnya cikal bakal PKS meskipun sering tidak mengakuinya. Akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat jelas bahkan sering di sebut KAMMI sebagai sayap mahasiswa PKS (Muhtadi, 2012:43-44).

Merujuk pada formatnya yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PKS meskipun muncul dengan wajah yang sangat politik (partai politik) tetapi ethos dasar sebenarnya adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada kegiatan dakwah Islam sesuai dengan induk semangnya yaitu LDK yang berdiri di kampus-kampus. Namun demikian ethos dasar PKS sebagai ormas dakwah memiki warna yang khas karena lebih dipengaruhi oleh doktrin islamisme. Islamisme adalah sebuah doktrin yang meyakini bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atau aturan sosial (Muhtadi, 2012:49). Oleh karena itu kaum islamis berusaha mengganti aturan sosial politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan kepada tafsir tertentu atas ajaran Islam. Hal ini bisa ditempuh melalui aksi damai maupun aksi kekerasan tergantung pada sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan (Muhtadi, 2012:49).

Ethos dasar PKS sebagai ormas yang bergerak dalam kegiatan dakwah mengambil bentuk artikulasinya secara divergen. Doktrin islamisme menjadi dasar artikulasi dakwah PKS antara lain; artikulasi dakwah ekonomi mengambil wujud pendirian BMT, artikulai dakwah bidang seni mengambil wujud kelompok nasyid, artikulasi dakwah bidang jurnalistik munculnya majalah Sabily, artikulasi dakwah pendidikan dan bimbingan belajar muncul dengan pendirian Nurul Fikri, lembaga pendidikan Al-Hikmah Jakarta (Norma Permata, 2008)

serta lembaga pendidikan lain yang sekarang ini marak. Saat ini yang paling terkenal dalam bidang lembaga sosial dan pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan kader PKS adalah Jaringan Sekolah Islam terpadu (JSIT) yang mengkoordinir ratusan sekolah dasar islam terpadu (SDIT) di seluruh Indonesia. Dalam bidang sosial dan bantuan korban bencana alam terbentuk Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dan Dompet Sosial Ummul Qura (DSUQ) (Muhtadi, 2012). Demikian halnya ethos dasar PKS sebagai ormas yang bergerak dalam kegiatan dakwah diartikulasikan dalam mendirikan pesantren.

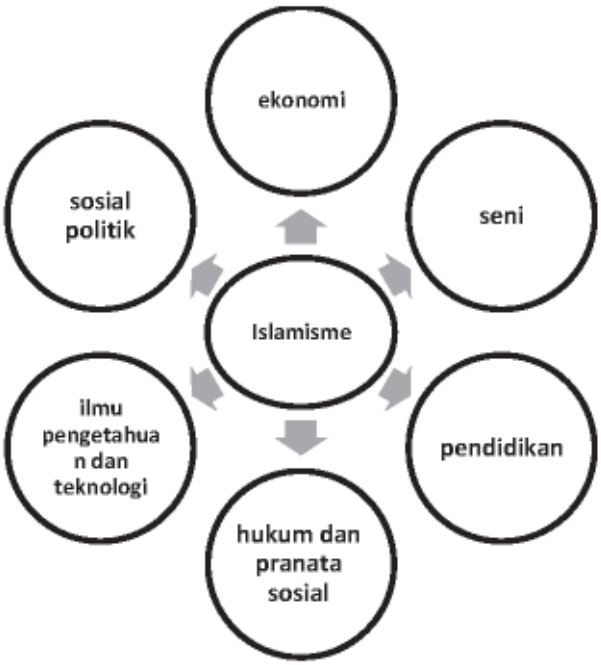

3) Tarbiyah; Model Pengkaderan PKS

Seperti dimaklumi bahwa PKS dilahirkan dari gerakan tarbiyah yang diselenggarakan dikampus-kampus. Tarbiyyah adalah gerakan sosial Islam (Muhtadi, 2012) yang mengusung semangat islamisme. Kelompok tarbiyah ini tidak hanya mengkaji dan melakukan diskusi teks-teks keagamaan tradisional, tetapi mengembangkan perspektifnya menjadi lebih luas meliputi; *tarbiyah nadzariyah* (*the study of Islamic norm and theory*), *tarbiyah ruhiyyah* (*moral lessons and discussions on proper*

ethical conduct), *tarbiyah maidaniyyah* (*the study of modes of practical mobilisation and organisation*), *tarbiyyah fikriyah* (*discussions and classes on critical thinking, which includes the study of logic and critical theory*), *tarbiyah harokiyyah* (*the development of organisational awareness and training in* relation to party-political mobilisation) (Farish A. Noor, 2011). Tarbiyah inilah yang menjadi pendekatan utama dalam sistem pengkaderan PKS.

Materi yang disajikan sebagai materi tarbiyah sangat beragam. Merujuk kepada dua buku yang dikarang Prayitno seorang tokoh PKS mengumpulkan sejumlah materi yang dibagi ke dalam dua bab utama yang meliputi: a) kepribadian da'i dengan topik; *al-ghazw al-fikr, hizb asy-syaithaan, qadhaayaa ad-da'wah/al-ummah, al haq wa al-baathil, takwiin al-ummah, at-tarbiyah al-islaamiyah al-harakiyah, fiqh ad-da'wah,* dan membentuk kepribadian muslim, b) kepribadian muslim dengan topik; makna *asy-syahaadatain, ma'rifatullah, ma'rifah ar-rasuul, ma'rifah al-islaam, ma'rifah al-insaan, ma'rifah al-Qur'an* (Farish A. Noor, 2011).

Kegiatan pengkaderan PKS disusun secara sistematis dengan tujuan yang sistematis. Setiap kegiatan training kader ditujukan untuk jenis jenis yang berbeda yang meliputi; a) kader *tamhidi* (pemula) yang terdiri dari pemula terdaftar dan pemula terbina, b) kader *muayyid* (muda), c) kader *muntashib* (madya), d) kader *muntazim* (dewasa), e) kader ahli (spesialist), f) kader *takhassus* (paripurna), g) kader kehormatan (Muhtadi 2012: 250). Diakui Zulkieflimansyah seorang tokoh PKS seperti dikutip Muhtadi (2012) bahwa sistem kaderisasi di PKS memiliki banyak kemiripan dengan partai komunis yang bersifat stelsel aktif, hierarkies dan meniscayakan loyalitas dan komitmen penuh terhadap kebijakan partai. Sehingga setiap kader PKS memiliki karakteristik yang khas baik secara ideologis maupun dalam cara mengartikulasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diantara hal yang bisa diidentifikasi sebagai karakteristik kader PKS antara lain; cara berpakaian (kerudung lebar dan memakai jubah), tidak merokok, menggunakan kata-kata kalimat bahasa Arab dalam pergaulan sehari-hari seperti *ikhwan* (saudara), *akhwat* (saudari), *siyasah* (politik), *hizb* (partai), *maisyah*

(pendapatan), *liqa* (pertemuan), dan seterusnya.

Program pengkaderan yang dilakukan PKS melalui pendekatan tarbiyah bertujuan agar setiap kader memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) *salimul aqidah* (correctness in religion), 2) *shahihul ibadah* (true religious devotion), 3) matinul khuluq (strong integrity), 4) *qowiyyul jismi* (physical health and bodily strength), 5) *mutsaqqoful fikri* (active intellectualism and critical thinking), 6) *mujahadatul linafsihi* (to struggle against one's ego and desires), 7) *harishun ala waqtihi* (punctuality), 8) *munazhzhamun fi syuunihi* (organisation and discipline in work and carrying out one's duties and responsibilities), 9) *qodirun alal kasbi* (**self**-reliance, including economic independence), 10) *nafi'un lighoirihi* (to live selflessly for others and the community) (Farish A. Noor, 2011).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran mendalam tentang hubungan sebuah partai politik dengan pondok pesantren. Dalam hal ini yang menjadi objek kajian adalah hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Jalaksana Kuningan. Lebih jauh diupayakan menemukan sebuah model baru atau tipologi pesantren sehingga memperkaya tipologi yang selama ini ada. Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif kegiatan penelitian difokuskan pada upaya memahamai makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari latar yang alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Dengan pendekatan naturalistik peneliti memungkinkan dapat menemukan pemaknaan (*meaning*) dari setiap fenomena sehingga dapat menemukan *local geneous*, berupa nilai, tradisi, karakteristik khas dan teori-teori dari subjek yang diteliti.

Kegiatan pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta. Sehingga dapat mendeskripsikan secara utuh pola hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Karena kegiatan penelitian dilakukan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, dengan triangulasi sebagai teknik pengambilan data. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menemukan makna dibalik fenomena (Sugiyono, 2010:15).

Data terdiri dari tiga jenis; 1) data primer berupa data hasil hasil wawancara dan hasil observasi, 2) data sekunder berupa dokumen-dokumen, foto-foto kegiatan dan suasana kehidupan santri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, 3) data penunjang berupa buku, tulisan dan berita dari surat kabar tentang kajian PKS dan kajian kepesantrenan.

1) Sumber Data

Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara kepada nara sumber utama yaitu; pengurus yayasan, direktur kepesantrenan, dewan guru, siswa, alumni dan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui kurikulum, panduan-panduan, leaflet, situs resmi PP Husnul Khotimah, tulisan santri, dan foto-foto kegiatan, majalah dinding yang dikelola oleh Organisasi Santri Husnul Khotimah (OSHKPUBLIKA). Sedangkan data penunjang diperoleh melalui sejumlah penelitian dan buku tentang Patai Keadilan Sejahtera, jurnal-jurnal tentang pesantren dan sejumlah buku yang dikarang oleh pengurus atau dewan asatidz PP Husnul Khotimah.

2) Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur yang melibatkan peneliti sendiri di lokasi penelitian kepada sumber-sumber data utama; pengelola, guru, dan santri, dilengkapi dengan instrumen wawancara terstruktur yang dibagikan dalam bentuk daftar pertanyaan kepada alumni Pondok Pesantren

Husnul Khotimah. Disamping dilakukan studi dokumentasi untuk melengkapi kerangka teoritik penelitian.

Kegiatan analisis data dilakukan mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa dan menyusunnya ke dalam pola-pola. Proses analisis data dilakukan dengan dua tahap yaitu; 1) tahap sebelum di lapangan, 2) tahap selama dilapangan. Analisis selama dilapangan mempergunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337) yang terdiri dari; a) kegiatan reduksi data, b) kegiatan penyajian data, c) kegiatan penatrikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan analisis juga dilakukan terhadap kasus-kasus atau peristiwa spesifik yang dapat memperkuat data untuk mendukung teori atau hipotesa. Kasus-kasu tersebut baik yang bersifat individual maupun yang bersifat lintas kasus.

2) Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dan PKS;

Sebuah Relasi Historis-Ideologis

Selama ini masyarakat melihat Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pondok pesantren PKS karena memiliki relasi kuat dengan partai ini. Dugaan tersebut sebenarnya tidak memiliki dampak apapun terhadap minat dan antusiasme masyarakat untuk menitipkan anaknya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Sebagaimana juga tidak memiliki dampak terhadap proses pengelolaan serta kegiatan pembelajaran Pondok Pesantren. Dugaan tersebut terutama bagi akademisi menggiring munculnya asumsi baru tentang telah terjadinya transformasi pesantren dengan karakteristik yang lebih heterogen. Terutama karakteristik pesantren yang keluar dari pakem pesantren yang difahami awam yang meliputi; kepemimpinan, tradisi yang dikembangkan, jenis keilmuan yang dipelajari serta relasi-relasi yang dibangun.

Seperti dikemukakan dimuka bahwa kader-kader PKS mengartikulasikan gerakan dakwahnya secara divergen. Bertolak dari konsep Islamism yang mereka fahami, serta kesadaran ideologi partai yang dimiliki sebagai partai dakwah, kader PKS berusaha melaksanakan dakwah islam dalam berbagai lapangan; politik, ekonomi, seni budaya, jurnalistik dan pendidikan. Karena kader-kader PKS terdiri dari kelompok profesional, maka rata-

rata mereka relatif sukses melaksanakan berbagai program dakwahnya, terutama terlihat dalam pengelolaan program pendidikan misalnya Al-Hikmah, Nurul Fikri dan sejumlah lembaga pendidikan di beberapa daerah yang diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan milik 'orang-orang PKS'.

Dalam mengelola pendidikan pesantren PKS sebagai institusi kepartaian dianggap *'new comer'* (pendatang baru), terutama jika dilihat dalam kerangka 'tradisi pesantren' yang selama ini difahami oleh awam. Meskipun sebenarnya kader-kader PKS dipenuhi oleh intelektual pesantren yang memahami betul tradisi pesantren. Oleh karena itu menjadi menarik ketika Husnul Khotimah diidentifikasi awam memiliki hubungan khusus dengan partai politik PKS. Dalam kasus Husnul Khotimah hubungan khusus tersebut dapat ditelusuri benang merahnya. Meskipun tidak terlihat secara formal tetapi secara ideologis atau historis dapat ditemukan dan ditunjukan.

Ada paling tidak empat alasan, 'awam' melihat Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pondok pesantren PKS yaitu:

Pertama, orang-orang yang tercatat dalam struktur pengelola Yayasan Husnul Khotimah adalah kader-kader puncak PKS. Disamping tenaga pengajar yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan program pembelajaran, mayoritas (kalau tidak dikatakan semuanya) adalah kader-kader profesional PKS. Tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail, MA, Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, MA, Dr. H. Surahman Hidayat, MA, KH. Yusuf Supendi, Lc, KH. Achidin Noor, MA yang semuanya duduk sebagai Dewan Pembina Yayasan Husnul Khotimah tidak diragukan lagi adalah tokoh-tokoh senior dan pendiri PKS. Keberadaan tokoh-tokoh ini jelas akan sangat memberi warna signifikan terhadap pengelolaan dan arah pengembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

Kedua, ada benang sejarah yang mengikat antara PP Husnul Khotimah dengan PKS. Bentangan ikatan sejarah tersebut terletak pada momen kerjasama antara yayasan Al-Haramain yang dikelola Dr. Hidayat Nurwahid, MA melalui salah satu pengurusnya KH. Achidin Noor, MA. Saat itu KH. Achidin Noor

sebagai Sekretaris Umum yayasan Husnul Khotimah (yang sekaligus Mudir Ma'had Al-Hikmah Jakarta) diberi tugas oleh Ketua Yayasan H. Sahal Suhana, SH untuk membuat konsep ideal Pesantren Husnul Khotimah. Selanjutnya beliau bertemu dengan Dr. Hidayat Nurwahid, MA untuk membicarakan konsep ideal pesantren tersebut. Dr. Hidayat Nurwahid, MA selanjutnya berharap Pondok Pesantren Husnul Khotimah dijadikan Pilot Proyek Pesantren sehingga menjadi rujukan pesantren-pesantren yang lain (Muzakki, 2011). Belakangan Dr. Hidayat Nurwahid, MA menjadi ketua umum PKS. Disamping yayasan al-Haramain dan Ma'had Al-Hikmah memiliki hubungan erat dengan PKS (Norma Permata, 2008).

Ketiga, para pendiri Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki hubungan emosional dengan PKS, termasuk H. Sahal Suhana, SH. sang pendiri. Hubungan emosional tersebut terjalin ketika H. Sahal Suhana, SH memutuskan untuk bergabung dengan PKS sebagai jalan dakwah dan sekaligus terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Kuningan dari PKS selama satu periode dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 (Muzakki, 2011).

Keempat, terjadi artikulasi ideologis PKS dalam konsep, motto, tujuan pendidikan Pesantren Husnul Khotimah. Hal ini dapat ditunjukan dengan motto yang terpampang dalam nama Pondok Pesantren Husnul Khotimah (***Pesantren Modern Berbasis Dakwah dan Tarbiyah***). Disamping itu profil alumni pesantren yang diharapkan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sama persis dengan tujuan kegiatan pengkaderan PKS. PP Husnul Khotimah menetapkan bahwa profil pondok pesantren terdiri dari 10 profil utama yaitu;

a) Beraqidah lurus,
b) Beribadah yang benar,
c) Berakhlak mulia,
d) Berilmu dan berwawasan luas,
e) Berbadan sehat dan kuat,
f) Sanggup berusaha, terampil dan mandiri,

g) Sanggup mengendalikan hawa nafsu,

h) Mampu mengatur waktu secara efisien

i) Teratur dan rapi dalam segala urusan,

j) Bermanfaat bagi masyarakat (menjadi da'i yang produktif).

Bandingkan 10 rumusan di atas dengan tujuan kegiatan pengkaderan. PKS menetapkan bahwa pengkaderan yang dilakukan PKS melalui pendekatan tarbiyah bertujuan agar setiap kader memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) *salimul aqidah* (correctness in religion), 2) *shahihul ibadah* (true religious devotion), 3) matinul khuluq (strong integrity), 4) *qowiyyul jismi* (physical health and bodily strength), 5) *mutsaqqoful fikri* (active intellectualism and critical thinking), 6) *mujahadatul linafsihi* (to struggle against one's ego and desires), 7) *harishun ala waqtihi* (punctuality), 8) *munazhzhamun fi syuunihi* (organisation and discipline in work and carrying out one's duties and responsibilities), 9) *qodirun alal kasbi* (self-reliance, including economic independence), 10) *nafi'un lighoirihi* (to live selflessly for others and the community) (Farish A. Noor, 2011).

Disamping itu PKS mengklaim sebagai partai dakwah yang menekankan proses kaderisasi dengan pendekatan tarbiyah atau model tarbiyah. Hal ini juga dipergunakan sebaga motto oleh PP Husnul Khotimah yang mengklaim sebagai "***pesantren modern berbasis dakwah dan tarbiyah***". Sebenarnya setiap pesantren berhak mengembangkan konsep pendidikan serta model dan pendekatan pendidikan yang akan dipergunakan. Karena setiap pesantren memiliki cita-cita yang mulia yaitu meningkatkan kualitas pendidikan ummat Islam. Hanya saja dalam kasus PP Husnul Khotimah menjadi menarik ketika sebuah pesantren memiliki hubungan ideologis yang bersifat konsisten dengan partai politik. Tentu saja hubungan tersebut tidak bersifat formal, boleh jadi pesantren Husnul Khotimah adalah salah satu sarana pengabdian serta media artikulasi dakwah kader-kader PKS dalam bentuk pengembangan lembaga pesantren sebagai persembahan serta panggilan hati mereka bagi ummat.

3) Pesantren Khusnul Khotimah; Ruang Artikulasi Simbolik PKS

Simbol mencerminkan sebuah gagasan, nilai atau ideologi yang dianut. Simbol-simbol menjadi artikulasi paling sederhana dari sebuah sistem berfikir, doktrin atau sistem nilai yang bersifat kompleks. Meskipun memaknai simbol membutuhkan tafsir akan tetapi sesederhana sekalipun tafsir itu akan selalu mengacu kepada frame (bingkai) yang telah dibangun oleh si penafsir. Bingkai tersebut dalam konteks ini adalah aktifitas pengelolaan pendidikan di Pesantren Husnul Khotimah baik bersifat implisit maupun eksplisit yang memiliki kemiripan dengan konsep, gagasan, pendekatan yang dipergunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Memberikan penilaian terhadap keberadaan PP Husnul Khotimah sebagai pesantren yang memiliki keterkaitan ideologis dengan PKS sangatlah mudah, semudah mengidentifikasi gagasan, ideologi, pendekatan dan model yang secara terang-terangan diperlihatkan oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah sendiri. Sebenarnya yang menraik disini bukan soal hubungan relasi ideologis partai politik di sebuah pesantren. Hal yang menarik dalam kajian ini adalah soal transformasi pesantren serta karakteristik baru pesantren yang keluar dari mainstream pesantren yang selama ini difahami awam.

Transformasi pesantren tersebut saat ini menjadi fenomena menarik karena semakin memperlihatkan variasi pesantren yang sangat banyak dari variasi yang telah ada dan mapan di benak awam. Misalnya merebaknya *madrasah salafy* dan penetrasi *salafy* (terutama yang radikal) ke sejumlah pesantren di Indonesia (Noorhadi Hasan dalam Farish A. Norr dkk, 2008). Pesantren salafy selalu diidentikan dengan wahabisme. Meskipun mungkin bisa dibedakan antara wahabisme sebagai madzhab aqidah dan wahabisme sebagai gerakan politik. Munculnya fenomena Pesantren al-Mukmin Ngruki, Pesantren al-Mukmin Beber Cirebon (dua pesantren ini terkenal karena ada alumninya yang terlibat dalam jaringan terorism), Pesantren as-Sunnah Kalitanjung Cirebon, Pesantren Al-Zaytun Indramayu (yang terakhir dikaitkan dengan NII) menjadi kajian menarik tentang varian pesantren di Indonesia yang berbeda dari mainstream. Pesantren tersebut

diidentifikasi sebagai model pesantren yang membawa ajaran *salafy* yang selalu dikaitkan dengan doktrin wahabisme. Meskipun dalam sejarah Islam di Indonesia organisasi Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad juga lebih dekat dengan wahabisme dibanding doktrin aqidah yang dianut umumnya muslim Indonesia yang Nahdliyyin (Nurhadi Hasan dalam Farish A. Noor, dkk. 2008).

Berkait dengan transformasi ini, sangat menarik ketika Martin Van Bruinessen (2009) memberikan perhatian yang luar biasa terhadap gerakan transnasional Islam lokal (*transnasional Islamic movement*) di Cirebon ia mengatakan:

> *The recent liberalisation of the trade in raw rattan dealt this industry a serious blow. To my surprise, I found that all the new Islamist movements are well-represented in Cirebon and have a considerable measure of local support. Their typical mode of expansion was through students originating from Cirebon who studied in places like Bogor, Jakarta or Bandung and were inducted into these movements there. Returning home in the weekends, they set up religious study groups at the secondary schools where they had graduated. Locally recruited activists then attempted to establish groups of sympathisers in neighbourhoods. PKS established schools that provide cheap and good education, besides solid disciplining; a Salafi group established a large, well-funded madrasah that successfully targets the local Muslim middle class.*
>
> *As elsewhere, these new movements had some success in converting syncretistic nominal Muslims to their world view – more, perhaps, than people previously associated with Muhammadiyah or NU, although I met several activists of the latter background as well. Conversion from local and syncretistic background to a transnational Islamist or Salafi movement is a way of opting for cosmopolitanism, a deliberate jump into modernity, however anti-modernist the movement as such may be.*

Berbeda dengan pesantren yang disebutkan di atas, Pondok Pesantren Husnul Khotimah lebih tepat sebagai pesantren yang mengusung Islam ala PKS, yang berbasis kepada gerakan pendidikan dan dakwah secara sistematis. Meskipun PKS ditenggarai menjadi bagian dari gerakan transnasional Islam

seperti diidentifikasi Bruinessen tetapi memiliki cita rasa yang berbeda dibanding dengan yang lainnya. Oleh karena itu Elizabeth Collins memandang PKS sebagai "solusi alternatif bagi moderasi gerakan islamisme radikal di Indonesia" (Muhtadi, 2012). Sejauh pengamatan penulis tidak pernah tercium aksi-aksi radikalisme yang melibatkan santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah (termasuk aksi kekerasan menentang Ahmadiyyah yang padahal letaknya bersebelahan dengan desa dimana Pesantren Husnul Khotimah berada). Sehingga dapat dikatakan bahwa PKS memiliki warna tersendiri yang khas dalam konteks pesantren-pesantren yang bergenre *salafy*. Hal ini juga dipengaruhi oleh Islam perspektif PKS yang relatif moderat dan pro demokrasi sehingga disebut sebagai salafy moderat. Sejauh pengamatan peneliti PKS memiliki kader yang beragam yang mengakomodir seluruh perspektif Islam di Indonesia.

Ada sejumlah aspek yang dapat diidentifikasi sebagai artikulasi simbolik dari PKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Aspek-aspek simbolik tersebut dapat dibagi ke dalam dua katagori; 1) aspek yang bersifat *tangible*, 2) yang bersifat *intangible*. Aspek yang tangible bersifat material dan dapat didentifikasi secara kasat mata antara lain:

1) Bentuk bangunan (tepatnya tugu) yang berbentuk dua bulan sabit yang saling membelakangi, yang terletak di gerbang masuk ke komplek Pondok Pesantren Husnul Khotimah menjadi identitas pembuka bahwa PP Husnul Khotimah memiliki 'hubungan' dengan PKS. Bentuk dua bulan sabit yang bersebelahan adalah lambang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2) Cara berpakaian yang relatif seragam. Bagi santri putera baju koko berwarna putih. Bagi santri putri sejumlah model pakaian yang diatur tersendiri dengan motif tertentu dan berbentuk jilbab (gamis pakistan) dengan kerudung panjang warna gelap.
3) Moto yang tercantum sebagai sayap kalimat dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang berbunyi "Pesantren Modern Berbasis dakwah dan Tarbiyah" menandakan bahwa doktrin pendidikan yang diusung PP Husnul Khotimah sama dengan

slogan PKS sebagai partai dakwah dan tarbiyah.

Adapun aspek-aspek yang bersifat *intangible* yang menandai adanya relasi ideologis antara PKS dengan Husnul Khotimah antara lain rumusan visi dan misi PP Husnul Khotimah.

Visi:

Menjadi lembaga pendidikan Islam yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak kader da'i.

Misi:

- Transformasi ilmu pengetahuan dan bahasa
- Menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah
- Da'wah dan mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang islami.

Visi yang dirumuskan oleh PP Husnul Khotimah menggambarkan karakteristik pesantren sebagai lembaga pengkaderan. Istilah kader menunjukan suatu cara pembinaan yang sistematis, bersifat ideologis dan militan. Cara seperti ini adalah cara yang dikembangkan oleh organisasi kemahasiwaan bebasis mesjid semisal Jamaah Tarbiyah, KAMMI dan LDK (Muhtadi, 2012). Konsep pembinaan model kader ini kemudian di rancang lebih mapan dan sistematis oleh partai PKS. Sebagai gambaran sistem kaderisasi PKS terbagi ke dalam beberapa jenjang antara lain; *kader tamhidi* (pemula), *kader muayyid* (muda), *kader muntasib* (madya), *kader muntazim* (dewasa), *kader ahli* (spesialis), *kader takhassus* (paripurna) dan *kader kehormatan* (Muhtadi 2012). Jenjang pengkaderan ini menunjukan adanya pengembangan kualitas militansi dan kadar pemahaman ideologi. Semakin tinggi jenjang yang dijangkau maka akan semakin tinggi pula loyalitas terhadap partai dan militansi anggota serta semakin kokoh kualitas keterikatan ideologi yang dimiliki.

Dakwah telah menjadi istilah yang populer di kalangan kaum muslimin. Dakwah artinya ajakan ke dalam kebenaran Islam. Orang yang mengajak kepada kebenaran agama Islam disebut da'i. Di kalangan ummat Islam istilah dakwah ini kalah populer dibanding tabligh (ceramah). Bahkan pengertiannya semakin

menyempit karena sering hanya di artikan sebagai tabligh (ceramah agama). Misalnya muncul istilah da'i sejuta ummat karena tokoh tersebut bertabligh dengan dihadiri jutaan ummat sebagai pemirsa. Karena dakwah sering diidentikan dengan tabligh, maka pada umumnya dikalangan ummat Islam istilah dakwah ini tidak memiliki greget dan terasa sebagai istilah yang hambar (biasa-biasa saja), bahkan menjelma menjadi bahasa yang rancu (anakronistik). Namu istilah ini di tangan kader-kader PKS menjadi lebih kental, lebih militan dan bersifat ideologis. Diduga kuat istilah kader da'i seperti dipergunakan dalam rumusan visi PP Husnul Khotimah ingin menunjukan generasi pendakwah yang lebih ideologis, militan dan berwawasan mondial. Tidak seperti pesantren lain yang sering merumuskan visi bersifat normatif, rumusan visi Pondok Pesantren Husnul Khotimah nampak lebih fungsional.

Kegiatan kader yang menjadi identitas pendidikan PP Husnul Khotimah dikelola dalam bentuk program-program kegiatan *halaqah tarbawiyah* yang menjadi kegiatan pembelajaran utama bersama kegiatan akademik, tahsin dan tahfidz al-Qur'an serta kegiatan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pondok Pesantren Husnul Khotimah di kelola oleh figur-figur muda yang energik sejak pengelola sampai dengan dewan guru. Hal ini tidak terlepas dari ghirrah serta idealisme yang tertanam sebagai kader PKS.

Militansi adalah karakter yang dimiliki oleh kader-kader PKS. Sikap militan ini juga tercermin pada figur-figur yang mengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah serta dewan guru yang ikut terlibat dalam proses pendidikan. Sikap militan ini ditularkan kepada santri-santri Husnul Khotimah. Militansi dan sikap loyal terhadap ajaran Islam dan aturan pondok ini tercermin dari Janji Santri Husnul Khotimah yang tertulis dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dalam ukuran besar di tembok dinding bangunan kelas menghadap lapangan upacara. Di sini disajikan versi dalam bahasa Arab:

مظاهر الطالب المسلم

العبادة والتلاوة والبساطة والجندية وحسن الخلق.

عهود طلاب معهد حسن الخاتمة:

نحن طلاب معهد حسن الخاطمة نعاهد علي:

1. ان نؤمن بالله ونتقيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
2. أن نجعل القران والسنة أساسين في الفكرة والحركة
3. أن نجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا
4. أن نعتز بالجهاد لنيل الشهادة
5. ان ننضبط بنظم المعهد
6. ان نبر الوالدين ونحسن المعاملة مع الناس
7. بالايمان والتقوي ونعزم علي الحصول علي التفوق والنجاح
8. ان نحافظ علي سمعة المعهد حيثما كنا

Janji santri seperti tersaji di atas mengandung upaya membangun empat aspek penting yang menjadi karakter muslim; aqidah yang lurus, ibadah yang benar, Rasulullah sebagai teladan hidup serta jihad sebagai perjuangan hidup. Janji tersebut juga menggambarkan konsep islamisme yang dijadikan doktrin ajaran yang diwariskan kepada santri. Konsep islamisme adalah unsur penting doktrin jamaah tarbiyah termasuk setelah menjelma menjadi partai PKS. Disamping itu santri sudah diperkenalkan konsep Jihad dan kesyahidan. Tidak seperti di pesantren lain yang meletakan konsep jihad ini secara hati-hati atau samar-samar, di PP Husnul Khotimah menyajikannya secara terang-terangan dan mewariskannya kepada santri, sehingga menjadi pembentuk militansi santri terhadap ajaran Islam dan perjuangan ummat Islam.

4) Islamisme dan Orientasi Islam Timur Tengah di PP Husnul Khotimah

Islamisme adalah doktrin yang dianut oleh jamaah tarbiyah

sebagai cikal bakal PKS. Islamisme adalah keyakinan bahwa islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atau aturan sosial. Menurut Muhtadi (2012) kaum islamis dimanapun berada berusaha mengganti aturan sosial politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas ajaran Islam. Menurut Bubalo dan Fealy seperti dikutip Muhtadi (2012:49) tujuan akhir islamisme itu sendiri adalah pendirian sistem Islam. Dua karakteristik utama islamisme sistem islam dan aktivisme islam. PKS oleh Muhtadi (2012) dokatagorikan sebagai islamisme moderat dibandingkan dengan model lain yang berkembang di Indonesia (kaum jihadis). Oleh sebab itu PKS menghindari aksi-aksi kekerasan selain karena kesadaran intelektual yang rata-rata mereka miliki tetapi juga kontruksi gerakan yang telah mereka rancang secara sistematis tidak menggiring kepada aksi-aksi kekerasan tetapi lebih kepada proses kultural dan membangunkan kesadaran.

Islamisme selalu dikaitkan dengan orientasi Islam Timur Tengah. Karena pengusung islamisme rata-rata adalah mereka yang mendapatkan pendidikan Islam di Timur Tengah. Disamping itu Islamisme bersifat sensitif terhadap isu perjuangan Islam terutama Palestina serta nasib minoritas muslim di sejumlah negara. Isu palestina dan nasib minoritas muslim di sejumlah negara menjadi pusat perhatian aktivisme Islam. Islamisme menawarkan Islam sebagai solusi. Isu yang terpenting dalam Islam orientasi Timur Tengah (atau Islamisme) adalah:

1) Aqidah tanpa kemusyrikan (memurnikan aqidah)
2) Ibadah tanpa bid'ah
3) Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan
4) Menjadikan Islam sebagai solusi problematika peradaban.
5) Jihad sebagai sarana perjuangan
6) Mati syahid sebagai cita-cita kehidupan

Islam yang diajarkan di PP Husnul Khotimah berorientasi Timur Tengah, atau memiliki cita rasa Islam Madzhab LIPIA. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan pengelola dan ustad yang

memberikan proses pembelajaran yang rata-rata alumni universitas-universitas di Timur Tengah. Meskipun dalam sejarah pendiriannya PP Husnul Khotimah bermitra dengan pesantren-pesantren Nahdliyyin di Cirebon, tetapi dari sisi artikulasi Islam nampak telah bergeser ke Islam PKS atau Islam Timur Tengah. Secara khusus, misalnya, ketika malam takbiran Idul Adha tanggal 25-26 Oktober 2012 diadakan acara *life streaming from Masjidil Haram*.

Orientasi Islam Timur Tengah juga dapat terbaca dari Janji Santri serta kurikulum yang dikelola. Untuk membedakannya dengan pesantren yang berada dalam sabuk tradisi Islam di Indonesia, dapat diidentifikasi sejumlah kosa kata yang tidak ditemukan di PP Husnul Khotimah antara lain; kosa kata barakah (tabarruk), kosa kata tahlil, kosa kata haul, wirid, yasinan. Kosa kata yang banyak terdengar dan diakrabi santri di PP Husnul Khotimah antara lain; tarbiyah, dakwah, syahid, jihad, syirik, halaqah, akhlakul karimah, bid'ah, ikhwan, akhwat, tadabbur, uswah, qudwah, qur'an-hadits. Sebagaimana layaknya training kader, dalam kegiatan santri sering terdengar pekikan "Allah Akbar".

Santri juga di perkenalkan dengan isu mutakhir di Timur Tengah, misalnya isu Palestina. Isu Palestina adalah cara yang dipergunakan PP Husnul Khotimah untuk meningkatkan Ruhul Jihad serta kepedulian terhadap kedzaliman yang dihadapi ummat islam. Berkait dengan isu Palestina ini pada tanggal 26 Juli 2012 Pondok Pesantren Husnul Khotimah secara khusus kedatangan Syaikh Adnan Aly Ar Rantisi tokoh Palestina adik mendiang Dr. Abdul Aziz Ar Rantisi**.**

Perkenalan santri dengan tokoh-tokoh Palestina bertujuan untuk menanamkan ruhul jihad serta membangkitkan kesadaran santri terhadap kedzaliman yang diterima oleh saudara-saudaranya. Ini adalah salah satu cara yang ditempuh oleh PP Husnul Khotimah menanamkan militansi Islam serta ghirrah terhadap perjuangan Islam.

5) Pendidikan dan Pembelajaran

Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di PP Husnul Khotimah di bagi menjadi dua jenis yaitu; kegiatan kurikuler dan

kegiatan kokurikuler. Kegiatan kurikuler sebagai kegiatan utama terdiri dari: a) kegiatan akademik, b) halaqoh tarbawiyah, c) tahsin dan tahfidz al-Qur'an, d) pembinaan bahasa. Sedangkan kegiatan yang ekstrakulrikuler (kokurikuler) terdiri dari: a) kelompok ilmiah remaja (KIR), b) kepanduan, c) bela diri, d) teater, f) kaligrafi, g) nasyid, h) olah raga, i) menjahit (keputrian), j) dan jurnalistik.

Kegiatan pendidikan dilakukan dengan strategi pembelajaran dan pembudayaan. Strategi pembelajaran dalam bentuk pengelolaan mata pelajaran untuk mendapatkan keterampilan akademik. Sedangkan strategi pembudayaan dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan konstruktif dan sikap hidup disiplin dalam segala hal; disiplin belajar, disiplin berjamaah, disiplin makan, disiplin mandi, dan disiplin terhadap ketentuan kehidupan pondok yang lain. Proses pembudayaan dilakukan dengan menggiring santri untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, budaya membaca, budaya menulis, budaya berbahasa arab, budaya santun, budaya mengucapkan salam.

Untuk mengembangkan budaya membaca, PP Husnul Khotimah menyediakan sejumlah Surat Kabar (terutama Republika) yang dipasang di sejumlah tempat khusus Surat Kabar, sehingga santri memperoleh akses dengan mudah terhadap informasi baru.

Disamping majalah dinding secara rutin Departemen Bahasa menyediakan Buletin dalam dua bahasa yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris untuk melatih keterampilan berbahasa sekaligus meningkatkan keterampilan menulis. Ada dua buletin yang dikelola yaitu *Al-Arabiyyah Lil Jami'* untuk buletin berbahasa Arab dan English Departemen untuk buletin yang berbahasa Inggris. Budaya berbahasa ini menjadi penting karena bahasa adalah syiar dari PP Husnul Khotimah. Anjuran untuk menggunakan bahasa Arab dan Bahasa Inggris tertulis di hampir setiap gedung.

Pengelolaan kegiatan kurikuler dituangkan dalam sejumlah mata pelajaran. Meskipun mnadrasah yang dikelola oleh PP Husnul Khotimah menginduk ke Kementerian Agama RI, tetapi kurikulum yang di kelola oleh Madrasah Aliyah misalnya mengintegrasikan antara materi pendidikan yang menjadi

kewenangn pondok dan madrasah.

Disamping program tahfidz sebagai program takhassus dan menjadi salahsatu identitas pondok pesantren, ada sejumlah mata pelajaran yang diidentifikasi sebagai pelajaran khas pondok pesantren yaitu; Al-Quran, Aqidah, Balaghoh, Fikih Dakwah, Hadits, Ilmu Hadits, Ilmu Kalam, Ilmu Tafsir, Shorof, Siroh Nabawiyah, Tafsir, Tsaqofah Islamiyah, Ushul Fiqih. Tiga mata pelajaran merupakan khas PP Husnul Khotimah yang boleh jadi jarang ditemukan di ajarakan di sejumlah pesantren atau lembaga pendidikan Islam lain yaitu; Fiqh Da'wah, Siroh Nabawiyah dan Tsaqofah Islamiyah. Tiga mata pelajaran ini disamping aqidah adalah mata kajian yang akrab didalami oleh Jama'ah tarbiyah atau di sajikan dalam training kader PKS.

Materi fiqh da'wah, sirrah nabawiyah dan tsaqofah Islamiyah menjadi penting di ajarkan untuk membekali santri tentang strategi dakwah dan meneladani perjalanan dakwah Rasulullah SAW serta melakukan pemahaman dan kontekstualisasi kegiatan dakwah. Hal ini untuk memelihara komitmen PP Husnul Khotimah sebagai pesantren modern yang berbasis dakwah dan tarbiyah serta memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak kader da'i.

Kegiatan santri dimulai bangun pagi jam 4.00 kemudian melaksanakan kegiatan tilawah, shjolat shubuh berjamaa, kegiatan pembinaan berbahasa, sampai jam 5.30. Selanjutnya santri memprsiapkan diri untuk sekolah dan berangkat ke sekolah pada pukul 06.30. Kegiatan di sekolah berakhir sampai jam 02.00. setalah kegiatan formal disekolah berakhir santri mengikuti berbagai kegiatan ekstra kurikuler sampai sore hari. Masuk asrama untuk bersiap-siap sholat maghrib dan melaksanakan pembelajaran, tahfidzul quran dan aktifitas berbahas. Kegiatan berakhir pada pukul 22.00. Aktifitas berjamaah sholat lima waktu menjadi kegiatan penting dan dianggap sebagai jeda dari setiap rutinitas yang berlangsung.

D. PENUTUP

Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki karakteristik tersendiri dibanding pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Hubungan yang bersifat khusus pesantren ini dengan partai politik dalam hal ini PKS telah memberikan warna tersendiri. Meskipun sering dibantah dan menolak disebut sebagai pesantren PKS peneliti berhasil menemukan fakta bahwa terdapat hubungan historis ideologis antara PKS dengan PP Husnul Khotimah. Relasi ideologis tersebut terartikulasi dalam sejumlah aspek-aspek simbolik baik yang bersifat *tangible* maupun yang bersifat *intangible*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad-Norma Permata, 2008. "*Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia*". Tersedia online dalam http://www.asienkunde.de/content/zeitschrift_asien/archiv/pdf/109_3_diunduh tanggal 22 April 2012.

Azra, Azyumardi, (editor). 2000. *Sejarah Perkembangan Madrasah.* Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI.

Bruinessen, Martin Van, t.t. "*Pesantren And Kitab Kuning: Maintenance And Continuation Of A Tradition Of Religious Learning*", tersedia online dalam http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.vanbruinessen/publications/Bruinessen_Pesantren_and_kitab_kuning.pdf, diunduh tanggal 24 April 2012.

Bruinessen, Martin van, 2009. *Modernism and Anti-Modernism in Indonesian Muslim Responses to Globalisation*. Paper presented at the Workshop "Islam and Development in Southeast Asia: Southeast Asian Muslim Responses to Globalization", organized by JICA (Japan International Cooperation Agency) Research Institute, Singapore, 21-22 November 2009)

Crouch, Harold, 1986. *Militer dan Politik di Indonesia.* Jakarta: Sinar Harapan.

Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol,* Jakarta CV. Rajawali.

Duverger, Maurice, 1982. *Sosiologi Politik*, (diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae), Jakarta: LP3S.

Farish A. Noor, Dr., 2011. "*The Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in The Landscape of Indonesian Islamist Politics: Cadre-Training as Mode of Preventive Radicalisation?*", Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), tersedia online dalam www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP184.pdf. Diunduh tanggal 22 April 2012.

Kementerian Agama RI, 2010, *Buku Statistik Pendidikan Islam TP 2009/1010.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Khariroh, Khariroh, 2010. "*The Women's Movement in Indonesia's Pesantren: Negotiating Islam, Culture, and Modernity*", Faculty of The Center for International Studies of Ohio University, (thesis tidak diterbitkan).

Lyn Parker and R. Raihani, 2011. Democratizing Indonesia through Education? Community Participation in Islamic Schooling, dalam *Journal Educational Management Administration & Leadership*, Tersedia Online; http://ema.sagepub.com/content/39/6/716 diunduh tanggal, 26 April 2012.

Mardiyah, 2012. *Kepemimpinan Kiai Dalam Memelihara Budaya Organisasi,* Malang: Aditya Media Publishing.

Muhtadi, Burhanudin, 2012. *Dilema PKS; Suara dan Syariah,* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Muzakki, Jajang Aisyul, 2011. *Menyulap Hutan Menjadi Pesantren; Sebuah Pengabdian Keagamaan H. Sahal Suhana, SH. dan Keluarga*, Kuningan: Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

Nasir Zakaria, Gamal Abdul, 2010.Pondok Pesantren; Changes and Its Future, *Dalam Journal Of Islamic and Arabic Education*, Vol. 2. 2010.

Noor, Farish A. *at.al*, 2007. *The Madrasa In Asia; Political Activism and Transnational Linkages,* ISIM Series On Contemporary Muslim Societies, Amsterdam University Preess.

Oepen, Manfred dan Wolfgang Karcher, 1988. *Dinamika Pesantren; Dampak Pesantren Dalam Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Parker, Lyn and R. Raihani. 2011. "Schooling Democratizing Indonesia through Education? Community Participation in Islamic Schooling" dalam Jurnal *Educational Management Administration & Leadership*, tersedia online dalam http://ema.sagepub.com/content/39/6/712, diunduh tanggal 22, April 2012.

Pupuh Fathurrahman, 2000. *Hubungan Pendidikan Pesantren Alternatif Pendidikan Terpadu Abad XXI,* Bandung: Tunas Nusantara.

Purwono, Budiyanto Eko, 2007. *Etika Bernegara Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS).* (Thesis tidak diterbitkan). Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo.

Rahardjo, Dawam (Editor), 1985. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Rachman, Budhy Munawwar (ed), 1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.

Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta: ICCE UIN Syari Hidayatullah.

Sawirman, Dr., M. Hum, 2011. "*Issues of Learning Strategies and Discourse Practices at Pesantren Salafiah in Padang Pariaman Regency, West Sumatra, Indonesia*" tersedia online dalam http:www/upi.edu.co.id, diunduh tanggal 23 April 2012.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.

Widiyanta, Danar, dan Miftahudin. t.t." *Dinamika Pemikiran Santri: Studi Atas Pengaruh Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condongcatur Depok Sleman (1998-2005)*, tersedia online dalam http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/DanarWidiyanta, diunduh tanggal 27 April 2012.

Woodward, Mark dkk. 2011. "*A New Cultural Path for Indonesia's Islamist PKS?*". Arizona University: Consortium For Strategic Communication (CSC), tersedia online dalam http://www.comops.org, diunduh tanggal 22 April 2012.

Zamakhsari Dhofier, "*Tradisi Pesantren: Study tentang Pandangan Hidup Kyai*", Jakarta, LP3ES, 1994.

Lyn Parker and R. Raihani, 2011. Democratizing Indonesia through Education? Community Participation in Islamic Schooling, dalam Journal *Educational Management Administration & Leadership*, Tersedia Online; http://ema.sagepub.com/content/39/6/716 diunduh tanggal, 26 April 2012.

PRAKTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PONDOK PESANTREN DAR AL-TAUHID CIREBON

❖ Budi Manfaat
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Keragaman etnik, bahasa serta budaya, merupakaan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam peradaban modern bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi wilayah di globus ini yang hanya di huni oleh satu etnik tertentu atau budaya tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari pelbagai etnik dan budaya. Dalam konteks kehidupan sosial di tengah keragaman, karakter multikultural mutlak diperlukan. Yaitu sebuah karakter yang mampu mengenal, menerima, menghargai dan merayakan keragaman kultur. Penelitian ini mengkaji tentang Arjawinangun, sebuah wilayah kecil di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang telah sejak lama dihuni oleh beragam etnik, budaya, dan agama. Pesantren Dar al-Tauhid dalam hal ini dijadikan sebagai pusat perhatian kajian, sebuah pesantren tua yang dewasa ini dikenal sebagai pesantren yang berhasil mengusung nilai-nilai multikultural dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Pendidikan, Multikultural, Pesantren.*

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman etnik, bahasa serta budaya, merupakaan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam peradaban modern bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi wilayah di globus ini yang hanya di huni oleh satu etnik tertentu atau budaya tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari pelbagai etnik dan budaya[1]. Dalam konteks kehidupan sosial di tengah keragaman, karakter multikultural mutlak diperlukan. Yaitu sebuah karakter yang mampu mengenal, menerima, menghargai dan merayakan keragaman kultur.

Arjawinangun, adalah salah satu contoh sebuah wilayah kecil di sebuah Kabupaten Cirebon Jawa Barat, yang telah sejak lama dihuni oleh beragam etnik, budaya, dan agama. Pesantren Dar al-Tauhid, sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah lama berdiri di tengah-tengahnya, di akui mempunyai peran besar dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.

Di tengah isu-isu konflik antar etnis, budaya, dan agama yang terjadi di berbagai daerah di belahan Indonesia yang terjadi silih berganti, Arjawinangun terbukti masih tetap dalam suasana kehidupan harmonisnya. Kenyataan ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, untuk mengungkap rahasia keberhasilan tersebut.

Urgensi pendidikan karakter%dalam hal ini secara khusus yang dimaksudkan adalah karakter multikultural, dewasa ini kian gencar disuarakan oleh banyak kalangan, utamanya oleh kalangan pendidik. Para pakar pendidikan bersepakat untuk menggagas pentingnya pendidikan multikultural pada tahun 2000, melalui sebuah simposium[2], workshop[3], serta berbagai tulisan[4] di media

[1] M. Nurkholis Setiawan dalam bukunya yang berjudul "PRIBUMISASI ALQURAN: Tafsir Berwawasan Ke-Indonesiaan" (Kaukaba: 2012) hlm 115.

[2] Pada tahun 2000, Jurnal Antropologi Indonesia, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, mengadakan simposium Internaasional di Makasar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, naasionalisme, konflik sosial, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respon lokal terhadap keragaman, dan lain-lain. Simposium serupa diselenggarakan pada 2001 dan 2002 dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar. Lihat buku

masa dan buku. H.A.R Tilaar, Zamroni, Azyumardi Azra, Musa Asy'ari, Abdul Munir Mulkhan, M. Amin Abdullah, dan Abdurrahman Mas'ud adalah diantara pakar pendidikan Indonesia yang mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia.

Sementara itu, pendidikan Islam baik sebagai lembaga maupun sebagai materi, secara umum, oleh para pengamat pendidikan Islam di Indonesia dikritik karena telah mempraktikkan proses pendidikan yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas. Proses pendidikan seperti ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren. Indikatornya, menurut M. Amin Abdullah, terlihat pada proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya yang lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri dari pada keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri[5]. Adapun menurut Mulkhan, indikatornya terlihat pada: (1) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik lainnya dalam sistem pendidikan Islam, sehingga proses pembelajarannya bersifat indoktrinatif; dan (2) fokus pendidikannya hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, dengan materi ajar pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah dan

---

tentang Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, *Membangun Kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural*, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

[3] Pada Juni 2003, *Jurnal Antropologi Indonesia* menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Educatuon in Shouteast Asian Nation: Sharing Experience*.

[4] Untuk mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia, Media Indonesia menerbitkan edisi khusus tentang *Media Indonesia, Edisi Akhir Tahun 2002: Satu Indonesia.* Edisi ini menampilkan tulisan-tulisan khusus tentang berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, hukum, politik, dan ekonomi dalam kerangka kesatuan Indonesia.

[5] Lihat M. Amin Abdullah, "Pengajaran kalam dan Teologi di Era Kemajemukan:mSebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama" dalam *Tashwirul Afkar*, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm. 14.

baik-buruk yang mekanistik[6]. Di pihak lain, Mas'ud menyebutkan tiga indikator proses pendidikan Islam yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas. Ketiga indikator tersebut adalah: (1) guru lebih sering menasehati peserta didik dengan cara mengancam, (2) guru hanya mengejar standar nilai akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak, serta (3) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama[7].

Kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islamnya, seperti yang digambarkan di atas, menurut para pakar pendidikan Indonesia tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan yang monokultural.

Mengaitkan paradigma pendidikan multikultural dengan pesantren sangat relevan, karena eksistensi pesantren secara makro diharapkan dapat berperan aktif dan memberi kontribusi yang berbobot dalam *social engeneering* (rekayasa sosial) dan transformasi sosiokultur.

Atas dasar pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan riset di pesanten dalam kaitannya dengan paradigma pendidikan multikultural. Ada tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus studi ini. *Pertama*, bagaimana proses historis sedemikian hingga Dar al-Tauhid kini dikenal sebagai Ponpes yang sangat kental dengan ciri khas mengibarkan bendera

---

[6] Lihat Abdul Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm. 17-18. Bandingkan dengan Muhammad Ali, "Pendidikan Prulalis-Multikuralis" dalam Harian Kompas, Edisi 26 April 2002, dan Ahmad Fuad Fanani, "Pendidikan Pluralis-Multikultural dan Liberatif" dalam Harian Kompas, Edisi 3 Juli 2002.

[7] Lihat Abdurrahman Mas'ud, "Format Baru Pola Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Sisdiknas" dalam Mu'amar Ramadhan dan Hesti Radinah (ed.), Antologi Studi Agama dan Pendidikan (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2004) hlm 87-88.

multikulturalisme; *Kedua*, Bagaimana Dar al-Tauhid mempraktikkan nilai-nilai multikulturalisme, baik dalam konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formalnya; dan *ketiga*, Apakah Dar al-Tauhid dapat disebut sebagai Ponpes yang telah berhasil dalam mengusung nilai-nilai multikultural.

B. TERMINOLOGI

1. Pendidikan Multikultural

Membicarakan terminologi tentang pendidikan multikultural menurut sangat menarik dimulai dengan dua macam pertanyaan yang sepertinya serupa namun hakekatnya bermakna dan berimplikasi berbeda. Dua pertanyaan itu adalah, pertama, "*Dengan kondisi peserta didik yang multikultural, bagaimana cara mengajarnya?*", dan pertanyaan kedua, "*Bagaimana cara mengajarkan pada peserta didik agar kelak mereka mempunyai karakter multikultural*?"

Dua jenis pertanyaan itu setidaknya menunjukkan perbedaan dalam dua hal: *urgensi* dan *orientasi*. Dalam hal urgensi, pertanyaan jenis pertama mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural hanya perlu jika kondisi peserta didiknya berasal dari latarbelakang kultur yang beragam; sedangkan pertanyaan jenis kedua tidak demikian, pendidikan multikultural diperlukan untuk semua kondisi. Demikian juga dalam hal orientasi, pertanyaan jenis pertama mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural bertujuan agar proses pendidikian tidak diganggu oleh realitas keberagaman latar belakang kultur peserta didiknya; sementara pertanyaan jenis kedua tidak bermakna demikian, proses pendidikan harus melahirkan insan yang mempunyai karakter multikultural, sehingga kemudian mampu hidup rukun dan saling menghormati dalam realitas masyarakat multikultural.

Banyak dijumpai dalam literatur, definisi tentang pendidikan multikultural yang esensinya adalah sebegaimana pertanyaan jenis pertama di atas. Beberapa contoh diantaranya adalah definisi yang dikemumakan beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1.Definisi menurut James A. Banks, bahwa,

pendidikanmultikultural adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik,ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar didalam kelas[8];

2. Definisi menurut Fredrick J. Baker, bahwa pendidikan multikultural adalah gerakan reformasi yang didisain untuk mengubah lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok ras dan etnik yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas[9];

3. Definisi menurut Francisco Hidalgo, bahwa pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya[10]; dan masih banyak lagi definisi serupa.

Sementara dalam penelitian ini, digunakan definisi yang esensinya adalah sebagaimana pertanyaan jenis kedua, dengan mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Ruriko Okada dan Keith Wilson. Menurut Okada, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural[11]. Definisi ini dipilih karena sejalan dengan tujuan kajian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana ponpes Dar al-Tauhid sebagai lembaga pendidikan Islam menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai di tengah masyarakat dengan beragam kultur.

---

[8] James A. Banks & Cherry A. McGee Banks, Multicultural Education: Issues and Perspectives (Boston: Allyn and Bacon, 1989), hal 2.

[9] Lihat Fredrick J. Baker, Multicultural Versus Global Education: Why Not Two Sides of the Same Coin?" dalam http://www.csupomona.edu/~jis/1999/baker.pdf, hlm. 97-98.

[10] Lihat Francisco Hidalgo, "Multicultural Education Landscape for Reform in the Twenty-first Century", dalam http://education.nmsu.edu/faculty/ci/ruchavez/ publication / 8_MULTI CULTURAL % 20 EDUCATION.pdf, hlm. 1.

2. Ukuran Keberhasilan Pendidikan Multikultural

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pendidikan multikultural yang dipraktikkan, maka sangat tepat jika mengacu pada *karakteristik insan yang berkarakter multikultural*, baik sebagai indivudu maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendidikan multikultural dikatakan berhasil jika proses pendidikan tersebut melahirkan insan-insan yang berkarakter multikultural; insan dikatakan berkarakter multikultural jika ia menganal, menghargai, dan merayakan realitas keberagaman kultur; selanjutnya jika insan-insan yang saling mengenal, saling menghargai, dan saling merayakan keberagaman kultur tersebut hidup bersama maka idealnya tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Dengan demikian, indikator keberhasilan dari sebuah pendidikan multikultural adalah kerukunan dan kedamaian.

C. LANDASAN TEORI

1. Pendidikan Karakter: dari mana memulainya?

Ratna Megawangi, dalam bukunya, *Semua Berakar Pada Karakter mencontohkan*, mencontohkan bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan karakter sejak awal tahun 1980-an. Menurutnya, pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses *knowing the good, loving the good, and acting the good*. Yakni, suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart, and hands[12].

Implemantasi pendidikan karakter di Indonesia tidak jauh dari konsep yang diterapkan di Cina tersebut. Menurut Kemendiknas, pendidikan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan

[11] Lihat Ruriko Okada, Multikultural Education in Japan: "What Can Japan Learn from Multicultural Australia?", dalam http://themargins.net/fps/student/okada.html, hlm 1.

[12] Ratna Megawangi, *Semua Berakar Pada Karakter* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007).

(*habit*)[13]. Secara visual, model tahapan pembentukan karakter di Cina dan di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tahapan Pendidikan Karakter di Cina

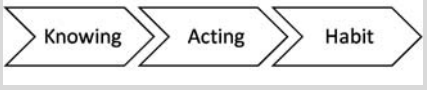

Tahapan Pendidikan Karakter di Indonesia

Dalam praktiknya, pendidikan karakter di Indonesia secara umum belum dapat dikatakan berhasil. Masih banyak lembaga pendidikan yang hanya menyentuh aspek pengetahuan semata. Padahal, pendidikan karakter tidak hanya membutuhkan teori atau konsep semata. Selama ini sudah cukup banyak teori tentang kepribadian, akhlak, budi pekerti, karakter, yang telah dirumuskan dan diurai jelas dalam berbagai artikel, buku, dan banyak hasil penelitian. Menurut Suswandi[14], pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah lebih tepat melalui pendekatan modeling, keteladanan (*uswah*) yang dilakukan oleh guru. Karena karakter merupakan perilaku (*behaviour*), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh peserta didik, maka harus diteladankan bukan diajarkan. Jadi dalam mendidik karakter sangat dibutuhkan sosok yang menjadi model. Model yang dapat ditemukan oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik butuh contoh nyata, bukan hanya contoh yang tertulis dalam buku apalagi contoh khayalan.

Oleh karena itulah, penelitian ini didasarkan pada kerangka *teori belajar sosial (Social Learning Theory)* yang dikemukakan oleh Bandura. Dalam teori ini dinyatakan bahwa seorang individu mempelajari suatu perilaku melalui proses observasi terhadap perilaku orang lain. Dinyatakan bahwa model belajar modeling atau keteladanan merupakan cara yang efektif dalam mengubah

[13] Kemendiknas Tahun 2010-1014, Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter di SMK (Jakarta: Renstra Direktorat 2011) hlm. 56.

[14] Sebagaimana dikutip Wahid, A., (2009). Budi Pekerti Harus Diteladankan, Bukan Diajarkan. http://tribunjabar.co.id.

perilaku seseorang, lebih dari sekedar ceramah atau perintah. Bandura menekankan pentingnya keberadaan model panutan (*role model*) dalam pengembangan karakter.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Potret Pondok Pesantren Dar al-Tauhid

Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, tepatnya terletak di Jalan K.H. A. Syathori Nomor 10-12 Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Pondok Pesantren Dar al-Tauhid didirikan oleh K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang selanjutnya diteruskan oleh putranya, K.H. A. Syathori. Tanggal, bulan, dan tahun didirikannya tidak tercatat. Akan tetapi, pesantren ini diperkirakan didirikan pada awal abad XX, dikarenakan bertepatan dengan K.H. A. Syathori, putra K.H. Sanawi bin Abdullah, pulang dari menuntut ilmu keislaman dan diteruskan memimpin pesantren, yaitu pada tahun 1932.

Dalam hal akademi pesantren, latar belakang pendidikan K.H. A Syathori sangat beragam. Beberapa pesantren yang pernah dijadiakan tempat belajar *ngaji* ilmu agama Islam adalah Pesantren Kuningan pada K.H. Shobari, Pesantren Babakan Ciwaringin pada K. Ismail bin Adzra bin Nawawi dan K. Dawud, Pesantren Asmoro Majalengka pada K.H. Abdul Halim, Pesantren Jamsaren Solo pada K.H. Idris, dan terakhir di Pesantren Tebuireng Jombang pada K.H. Hasyim Asyari (pendiri NU).

Keragaman pendidikan pesantren ini ternyata menjadi dasar bagi K.H. A. Syathor untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan pesantren yang menjadi amanah K.H. Sanawi bin Abdullah. Dalam sistem pendidikan pesantren, K.H. A Syathori menggunakan metode yang sudah popular di kalangan pesantren, yaitu *halaqoh* atau yang dikenal dengan *bandongan* dan *sorogan.* Di samping itu juga mengenalkan sistem madrasah (klasikal).

Proses pendidikan pesantren dilakukan dengan penjenjangan pembelajaran dengan menggunakan sebutan *sifir awal* (nol pertama), *sifir tsani* (nol kedua), dan *sifir tsalits* (nol tiga). Tiap *sifir*

mempunyai tiga jenjang A,B, dan C sehingga semuanya berjumlah sembilan jenjang. Sebutan ini pada perkembangan selanjutnya dekenal dengan istilah *Ibtidaiyah* (enam tahun), dan *Tsanawiyah* (tiga tahun).

Dalam kepemimpinannya, K.H. A. Syathori juga melakukan pengembangan dan pembaruan, baik fisik maupun akademik pesantren. Pertama kali didirikanlah Madrasah Wathaniyah yang bisa berarti sekolah nasional atau sekolah lokal. Disebut demikian dikarenakan pembantu atau pengajar pada waktu itu sepenuhnya dari daerah lokal (*abna al-wathan)* sekitar pesantren. Atau, sebutan semacam itu bisa juga merujuk dalam rangka untuk mengenang perjuangan kebangsaan (*wathaniyah)* yang dikobarkan K.H. Hasyim Asyari bersama ulama-ulama lain, termasuk K.H. A Syathori.

K.H. A Syathori juga melakukan renovasi bangunan fisik pesantren yang semula hanya satu dua kompleks, kemudian berkembang menjadi delapan kompleks. Yang menarik dan unik nama-nama kompleks pesantren menggunakan abjad Latin A, B, C, D, E, F, G, dan H, dan tidak menggunakan nama atau abjad Arab. Dibangun pula mushala di tempat yang lebih luas, sedangkan mushala lama dijadikan kompleks asrama dengan nama kompleks H.

Jadi, termasuk salah satu pemikiran dan praktik modern K.H. A Syathori adalah beliau mendirikan pengajaran dengan sistem *madrasi*. Ada suatu peristiwa yang sangat menarik dan pantas dicatat, ketika K.H. A. Syathori mengenalkan sistem *madrasi* dengan menggunakan ruangan, kapur, dan papan tulis. Peristiwa itu adalah beberapa tokoh masyarakat sempat protes karena ayat-ayat Al-Qur an dan teks-teks Hadits ditulis dengan kapur yang kemudian dihapus dan debuanya beterbangan ke lantai. Kejadian ini oleh sementara tokoh-tokoh masyarakat dianggap merupakan bentuk penghinaan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, K.H. A. Syathori berhasil meyakinkan mereka bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mengagungkan Al-Qur'an dan meresapkan ayat- ayatnya pada hati murid-murid, sedangkan yang beterbangan adalah debu-debu kapur belaka. Mungkin karena kekuatan argumentasi atau mungkin karena ketokohannya, akhiirnya mereka dapat menerima pendapatnya.

Tatkala K.H. A. Syathori wafat pada 19 Februari 1969, umur putra beliau yang kelak menjadi pengganti, K.H. Ibnu Ubaidillah, baru berusia 20 tahun dan sedang melakukan proses belajar. Oleh karena itu, untuk sementara waktu pengelolaan Pesantren Dar al-Tuhid dipegang bersama-sama oleh para anak menantu, yaitu K.H. A. Badlawi, K.H. Muhammad Asyrafuddin, dan K.H. Mahfudz Thaha, Lc.

K.H. Ibnu Ubaidillah sendiri lahir di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat pada 10 Mei 1949. Sebelum diserahi tugas untuk menggantikan ayahnya, K.H. Ibnu Ubaidillah *nyantri* ke berbagai pesantren sebelum akhirnya menemukan pesantren yang sesuai dengan keinginannya, yaitu Pesantren K.H. Muslih di Tanggir Tuban, Jawa Timur. Selama enam tahun beliau belajar di pesantren ini, dan kemudian melanjutkan belajarke Makkah al-Mukarramah dalam asuhan Syekh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki selama dua tahun.

Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1982, K.H. Ibnu Ubaidillah memegang pimpinan pesantren dibantu oleh kakak-kakak ipar dan keponakannya, yaitu Dr. K.H. Khozin Nasuha, K.H. Husein Muhammad, K.H. A. Zaeni Dahlan, K.H. Hasan Thuba, Dr K.H. Ahsin Sakho, Kiai Luthfillah Baidlawi, dan K.H. Mahsun Muhammad, MA. Ketika beberapa pengasuh sudah pulang ke Rahmatullah dan beberapa yang lain menetap di luar daerah, seperti K.H. Hasan Thuba menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tanggir Tuban, K.H. A. Zaeni Dahlan menetap di Bandung, dan Kiai Luthfillah Baidlawi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar Al- Qur'an Batanghari Jambi, maka dewan Pengasuh Pesantren di pegang oleh empat orang, yaitu Drs. K.H. Husein Muhammad, Dr. K.H. Ahsin Sakho, Prof. Dr. K.H. Khozin Nasuha, K.H. Mahsun Muhammad, MA., dan ditambah Dr. K.H. Marzuki Wahid, dengan pimpinan (*Syaikh Al Ma'had)* tetap dipegang oleh K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori. Jadi, dalam struktur kepengasuhan dapat dikatakan bahwa K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori adalah sebagai pengasuh pokok, sementara lima yang lainnya sering disebut dengan Dewan Pengasuh.

Pada masa kepemimpinannya, K.H. Ibnu Ubadillah juga melakukan renovasi bangunan fisik pesantren. Pada awalnya

pesantren ini dikenal dengan sebutan al-Mahad al-Islami, kemudian K.H. Ibnu Ubaidillah mengganti namanya menjadi Mahad Dar al-Tauhid al-Alawi al-Islami, dan terakhir disederhanakan menjadi Mahad Dar al-Tauhid al-Islami. Beliau juga melakukan beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan pesantren. Berbagai lembaga-lembaga lain non-pendidikan, juga tumbuh subur melengkapi detak kehidupan santri-santri di pesantren.

Untuk fasilitas pesantren berupa gedung sekolah dan asrama santri oleh K.H. Ibnu Ubaidillah diganti nama-namanya yang semula menggunakan abjad latin menjadi nama Badar, Uhud, Hudaibiyah, dan Khandak (asrma santri putra), sedangkan asrama santri putri gedung lama bernama Ummu Kaltsum dan gedung baru Fathimah al-Zahra (lambang keteguhan, kepatuhan, kemandirian, dan kesabaran).

2. Realitas Multikultural Arjawinangun

Tidak ada catatan pasti kapan Arjawinangun mulai ramai dihuni. Konon pada tahun 1917-an di zaman Belanda kawasan itu adalah kompleks pabrik gula. Pondok Dar Al-Tauhid yang didirikan KH. Syathori, ditengarai bekas sentral pabrik gula dan perkebunan tebu. Dituturkan oleh Ubaidillah atau Kang Ubed[15], pada zaman Belanda, seputar pabrik hanya ramai oleh aktifitas buruh pabrik. Sebagian besar mereka berasal dari Jamblang dan berbagai daerah lain sekitar Cirebon. Kawasan pabrik mulai jadi pemukiman ketika para buruh menetap. Waktu itu, kawasan blok Depok awal mula dihuni.

Dari asal mulanya itu, tidak salah kiranya jika Arjawinangun digolongkan sebagai daerah Urban. Sebab menurut Kang Ubed, tidak ada warga yang betul-betul asli pribumi. Hampir seluruh warga pendatang. Karena itu hingga kini masyarakat di sekitar Arjawinangun tidak mengenal nenek moyang (Ki Buyutnya) masing-masing. Dalam perjalanannya, keberadaan pabrik telah memicu lahirnya pasar tradisional. Potensi ekonomi itu menyedot lebih banyak lagi orang-orang luar masuk. “biarpun kemudian pabrik ditutup, Arjawinangun tetap bergairah sebagai sentral

ekonomi apalagi jumlah penduduknya yang terus bertambah," jelas Kang Ubed.

Pesona Arjawinangun sebagai sumber ekonomi yang cukup menjanjikan diduga kuat pula menjadi daya tarik bagi etnis Tionghoa berinvestasi. Sepanjang jalan kawasan pasar, ruko-ruko didirikan, dan hingga kini kawasan itu menjadi sentral pasar Arjawinangun-Junjang. Aktivitas bisnis Tionghoa telah memicu laju ekonomi bergerak lebih cepat. Umumnya Tionghoa sebagai pemilik grosir bahan-bahan kebutuhan pokok, sedangkan pribumi pedagang eceran. Selama bertahun-tahun, hubungan dagang itu telah membentuk pola relasi sosial antara warga dan etnis Tionghoa lebih terbuka, toleran, dan dinamis.

Arjawinangun mulai ramai sekitar th 1980-an ketika para pelancong dari kota-kota Solo, Klaten, dan Sukoharjo mulai masuk. Sebelumnya suku Sunda lebih dulu berbaur, dan baru etnis Batak muncul belakangan. Kusnan[16], ketua Paguyuban Rantau Bersatu (PRB) salah satu organisasi perkumpulan perantau dari Jawa (Jawa Tengah-Jawa Timur) di Arjawinangun, memperkirakan ada 30 KK orang Jawa yang menetap dan menjadi anggotaPRB. Di luar itu, kata Kusnan, terdapat lebih dari 100 KK. Orang orang Jawa tinggal menyebar dan tidak ngeblok di satu wilayah. Mereka hidup berbaur dengan warga. Profesi mereka bermacam-macam mulai dari dagang baso, es, jamu, rokok, sampai Pegawai Pemerintahan atau Swasta, juga ada yang menjadi TNI.

Dibandingkan dengan orang Jawa, populasi Tionghoa di Arjawinangun lebih banyak, mencapai 150 KK. Hok[17], tokoh Tionghoa setempat menyebutkan bahwa pertambahan komunitas Tionghoa dalam pengamatannya relatif stabil. Hampir tidak ada kenaikan yang signifikan, hal ini karena daerah penyebarannya terus meluas. Semula di seputar pasar, kini pemukiman Tionghoa tersebar di beberapa titik lain. Menurut Hok, profesi komunitasnya sejak dulu menggeluti bisnis dagang. Hal itu dikarenakan kebijkan

[15] Sebagaimana dimuat dalam BLAKASUTA Edisi 13 Tahun 2008 hlm 5.
[16] Ibid hlm 6.
[17] Ibid hlm 6.

pemerintah Orde Baru yang menutup profesi lain bagi Tionghoa. Kondisi mulai berubah pasca reformasi bergulir, di mana peluang bagi Tionghoa terbuka masuk ke ranah mana pun. Sebagian Tionghoa mulai meninggalkan dagang sebagai profesi turun temurun dari leluhurnya. Mereka memilih bidang lain seperti perkantoran, pemerintahan, kedokteran, dan lain-lain.

Lebih jauh Kang Ubed menuturkan bahwa, "Tradisi bisnis dan perdagangan di Arjawinangun, selain karena peran Tionghoa, juga karena mengikuti jejak orang-orang Pekalongan". Istilahnya "ngeber", yakni cara berjualan dengan menjajakan pakaian berkeliling dari kampung ke kampung. Banyak diantara para pemilik modal besar kemudian memilih menetap di Tegalgubug. Salah satu daerah yang hingga kini dikenal sebagai sentral komoditi sandang murah terbesar di Jawa.

Selain etnis Jawa dan Tionghoa, Arjawinangun menarik pula bagi etnis Batak untuk datang dan menjalankan bisnisnya. Meski jumlahnya lebih sedikit, di Arjawinangun orang-orang Batak tinggal berkelompok di kawasan Perumnas. Mereka diperkirakan pertama kali masuk Th. 1990-an.

3. Praktik Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid

Di Pesantren Dar al-Tauhid, pendidikan dalam rangka untuk membentuk insan berkarakter multikultural dapat terlihat dari aktifitas kajian yang sengaja diprogramkan. Adanya Forum Musyawarah Qubra dan Bahtsul Masail, misalnya, adalah bentuk pembelajaran yang akan mengasah santri peka terhadap perbedaan dan belajar bagaimana menyikapinya. Musyawarah Qubra adalah forum yang diikuti semua santri Dar al-Tauhid untuk membahas berbagai fenomena sosial yang muncul yang selanjutnya mencoba dilihat dalam perspektif Islam. Forum ini diadakan dalam satu bulan dua kali, yang terkadang mendatangkan nara sumber dari luar pesantren. Dituturkan, Gus Mus panggilan akrab K.H. Mustafa Bisri pernah diundang sebagai nara sumber dalam forum ini.

Forum Bahtsul Masail adalah ajang santri untuk berpendapat

dalam menyikapi permasalahan sosial dan mencari kesimpulan hukumnya dalam Islam. Tentu dalam Forum Bahtsul Masail santri secara tidak langsung belajar berbeda dan harus menghargai perbedaan itu. Posisi Pondok Pesantren Dar al-Tauhid yang berdekatan dengan Greja dan Wihara menarik juga untuk dipaparkan. Pada kenyataannya, santri ternyata bisa berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda akidah. Bahkan, dalam acara-acara ritual mereka dapat lebur sekedar meramaikan. Misalnya, pada peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, selain tampil bentuk kesenia seperti *hadraoh* dan kosidah juga ditampilkan Barong Sai dari masyarakat Tionghoa. Hal ini ditegaskan sendiri oleh pandangan pengasuh pesantren ini, K.H. Ibnu Ubaidillah, bahwa bagian dari pola pikir humanisme, kalangan pesantren tidak menghalangi pergaulan dengan kelompok-kelompok lain walaupun berbeda agama. Selain itu, dengan keberadaan santri yang datang dari berbagai daerah, dituturkan misalnya, dari Medan, Jambi, palembang, Lampung, NTT, Indaramayu, Brebes, dan lainnya adalah corak tersendiri dalam perbedaan. Mereka akan saling belajar memahami budaya yang berbeda dan bagaimana cara hidup bersama dalam perbedaan.

Praktik kehidupan multikultural juga terlihat dari interaksi sosial kemasyarakatan antar etnis dan agama di Arjawinangun. Seperti diceritakan, misalnya Babah Liem (kakek Hok) dikenal dekat dengan warga dan KH. Syathori. Ia sering berkunjung ke pesantren dan memberikan makanan kepada santri. Kyai pun mengajarinya berbagai do'a penyembuhan dari Al-Qur'an dan Hadits, tanpa memaksanya untuk memeluk agama Islam. Ilmu penyembuhan itu kini diturunkan ke anak cucunya. Dengan begitu Perbedaan etnis dan agama bukan kendala dalam menjalin hubungan sosial. "Saya merasa asli orang sini, hampir seluruh teman saya pun asli Arjawinangun dan Junjang" tambah Hok. Soal kesenjangan ekonomi antara Tionghoa dan pribumi, Hok tidak memungkirinya itu bisa menyulut konflik. Tetapi hal itu baginya tidak masalah sebab antara warga dan Etnis Tionghoa di Arjawinangun sejak lama dalam relasi ekonomi satu sama lain sudah saling membutuhkan.

Kalaupun ada isu-isu etnis yang menyulut konflik, hal itu

kata Kang Ubed, seringkali hanya merupakan imbas dari isu nasional. Ini dibenarkan oleh Hok, bahwa tidak ada isu-isu lokal terkait langsung dengan keberadaan Tionghoa di Arjawinangun yang bernuansa konflik. Tidak berbeda dengan Tionghoa, etnis Jawa pun mampu menyesuaikan diri. Kusnan, yang hampir 27 tahun tinggal di Arjawinangun menyatakan bahwa; "Dalam pergaulan sehari-hari orang-orang Jawa tidak menghadapi kendala. Apalagi kultur atau "unggah-ungguh" orang Jawa dan orang Cirebon punya banyak kesamaan.

Bahkan dari kalangan etnis Jawa banyak dipercaya peran-peran penting di lingkungan tinggalnya, seperti ketua RT, RW, dan pengelola Mushola". Karakter masyarakat urban dengan beragam etnis itu, tidak menyebabkan kehidupan sosial Arjawinangun terkotak-kotak. Pergaulan antar etnis berjalan cair dan dinamis. Tidak ada sekat sekat pemisah yang membatasi hubungan sosial mereka. Dalam hal pendidikan misalnya; siapapun baik Jawa, Sunda, Batak, dan Tionghoa boleh bersekolah di SD dan SMP yang sama. Tidak ada sekolah khusus etnis tertentu. Dalam ekspresi kebudayaan, warga Tionghoa bebas memunculkan tradisi-tradisi mereka dalam moment-moment peringatan keagamaan. Kebiasaan berbaur dan bergaul sejak kecil mulai dari pendidikan, budaya, maupun sosial menyebabkan kesan ekslusif dari etnis Tionghoa relatif tidak muncul sama sekali.

Di wilayah sosial, peran-peran komunitas Tionghoa tidak dibatasi. Bahkan tergolong menonjol. Mereka aktif terlibat di setiap kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pembukaan posko bencana, dan pembagian sembako bagi masyarakat miskin. Aktivitas sosial mereka betul-betul dilandasi misi kemanusiaan, bukan misi keagamaan. Sementara, ketika pesantren atau para tokoh Kyai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, komunitas Tionghoa tak ketinggalan ikut berpartisipasi. Peran sosial etnis Tionghoa diakui Kyai Ma'mun Saad cukup baik. Salah seorang tokoh pesantren itu mengaku dirinya seringkali bekerjasama dengan kalangan Tionghoa dalam aktivitas sosial dan agama. "Mereka baik, respek pada kegiatan agama dan sosial kita" katanya.

Begitupun ketika hajatan sunatan dan kawinan warga, Etnis Tionghoa umumnya mau hadir jika diundang. Bagi Kyai Ma'mun

Saad sikap Tionghoa seperti itu tidaklah aneh, sebab perilaku saling menghormati itu telah ada sejak dulu, sejak masa hidupnya Babah Leim. "Babah Leim itu bukan muslim, tetapi sangat respek terhadap kegiatan agama Islam dan acara sosial kemasyarakatan" kata Kyai Ma'mun.

Beberapa contoh interaksi di atas adalah praktik nyata bentuk keteladanan yang dilakukan oleh tokoh atau pemuka antar etnis dan agama, yang mudah diikuti oleh para pengikut atau penganutnya. Sangat dimungkinkan, bahwa praktik kehidupan multikultural seperti demikian lebih efektif daripada sekadar melalui kajian-kajian yang baru sebatas pengetahuan dan pemahaman.

4. Potensi Konflik

Sekalipun hingga kini (2012) tidak pernah terjadi konflik serius dalam komunitas plural Arjawinangun, namun potensi meletusnya konflik pasti ada. Ibarat bom waktu, konflik di komunitas plural kapanpun siap meledak. Namun itupun sangat tergantung dari pola relasi sosial dan komunikasi antar etnis dan komunitas agama yang ada.

Memang riak-riak kecil sempat muncul dan menimbulkan pergesekan, tetapi tidak sampai meletus hebat. Hal itu tidak dipungkiri oleh Kang Ubed[18], menurutnya konflik Tionghoa dan pribumi beberapa kali pernah terjadi. Perselisihan bermula dari kasus kriminal biasa. Situasi makin panas, ketika persoalan ditarik-tarik ke wilayah SARA (suku, ras, dan agama). Untungnya gesekan-gesekan itu tidak pernah berkembang lebih jauh.

Para tokoh dari berbagai elemen masyarakat baik pesantren, gereja, maupun Tionghoa segera mengambil langkah-langkah dialog untuk meredam konflik. Sampai sekarang Arjawinangun aman dan damai. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak pernah muncul kasus-kasus pergesekan yang murni dipicu oleh isu etnis atau agama. Hal itu dikuatkan oleh fakta pada Mei 1998 ketika beberapa wilayah lain bergejolak, Arjawinangun tidak

[18] Ibid hlm 8

terkena imbas. Kerusuhan Mei tidak berpengaruh apapun. Kondisi kondusif diakui beberapa tokoh karena para tokoh lintas etnis dan agama selalu berkomunikasi dan melakukan dialog.

E. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan tiga hal:

Kesimpulan Pertama, Dar al-Tauhid kini dikenal sebagai Ponpes yang sangat kental dengan ciri khas mengibarkan bendera multikulturalisme ditengarai didukung oleh dua hal: pertama, kondisi realitas keragaman etnis dan agama sejak lama ada di Arjawinangun. Kedua, latar belakang pendidikan pendiri dan pengasuh pesantren Dar al-Tauhid yang beragam, bahkan luar negeri, sehingga pengalaman-pengalaman itu yang kemudian mewarnai pemikiran dan cara hidup dalam kebersamaan di tengah keragaman.

Kesimpulan kedua, Dalam rangka untuk membentuk insan berkarakter multikultural, yakni insan yang mengenal, menerima, menghargai dan merayakan keberagaman, Dar al-Tauhid menempuhnya melalui dua hal, yaitu pertama melalui ruang-ruang kajian yang dapat membuka wawasan santri untuk dapat mengenal perbedaan, dan kedua melalui keteladanan dalam bentuk interaksi sosial.

Kesimpulan ketiga, praktik pendidikan multikultural yang dilakukan oleh Dar al-Tauhid baik melalui kajian maupun keteladanan, keduanya dapat dikatakan membuahkan hasil yang memuaskan, ditandai dengan realitas kehidupan sosial yang harmonis, tidak atau belum pernah terjadi konflik serius antar etnis atau agama.

Daftar Pustaka

Abdullah.M. Amin, "Pengajaran kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001.

Baker. Fredrick J., Multicultural Versus Global Education: Why Not Two Sides of the Same Coin?" dalam http://www.csupomona.edu/~jis/1999/baker.pdf.

Cherry A. James A. Banks &. McGee Banks, Multicultural Education: Issues and Perspectives (Boston: Allyn and Bacon, 1989).

Francisco Hidalgo, "Multicultural Education Landscape for Reform in the Twenty-first Century", dalam http://education.nmsu.edu/faculty/ci/ruchavez/ publication / 8_MULTI CULTURAL % 20 EDUCATION.pdf.

Jurnal Antropologi Indonesia, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, mengadakan simposium Internaasional di Makasar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, naasionalisme, konflik sosial, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respon lokal terhadap keragaman, dan lain-lain. Simposium serupa diselenggarakan pada 2001 dan 2002 dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar.

Mas'ud. Abdurrahman, "Format Baru Pola Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Sisdiknas" dalam Mu'amar Ramadhan dan Hesti Radinah (ed.), Antologi Studi Agama dan Pendidikan (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2004).

Megawangi. Ratna, *Semua Berakar Pada Karakter* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007).

Mulkhan. Abdul Munir, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam

Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm. 17-18. Bandingkan dengan Muhammad Ali, "Pendidikan Prulalis-Multikuralis" dalam Harian Kompas, Edisi 26 April 2002, dan Ahmad Fuad Fanani, "Pendidikan Pluralis-Multikultural dan Liberatif" dalam Harian Kompas, Edisi 3 Juli 2002.

Setiawan.M. Nurkholis, "PRIBUMISASI ALQURAN: Tafsir Berwawasan Ke-Indonesiaan" (Kaukaba: 2012), hlm 115.

Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, *Membangun Kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural*, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Pada Juni 2003, *Jurnal Antropologi Indonesia* menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Educatuon in Shouteast Asian Nation: Sharing Experience*.

Ruriko Okada, Multikultural Education in Japan: "What Can Japan Learn from Multicultural Australia?", dalam http://themargins.net/fps/student/okada.html.

Kemendiknas Tahun 2010-1014, Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter di SMK (Jakarta: Renstra Direktorat 2011).

Wahid, A., (2009). Budi Pekerti Harus Diteladankan, Bukan Diajarkan. http://tribunjabar.co.id.

BLAKASUTA Edisi 13 Tahun 2008.

KONSISTENSI PENDIDIKAN KARAKTER DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UN DESA KEPUH PALIMANAN CIREBON

❖ NURYANA
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Kekhawatiran banyak pihak mengenai situasi bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, menjadi perhatian serius bagi beberapa lembaga pendidikan termasuk didalamnya pondok pesantren. Berbagai penyakit moral yang sangat akut, korupsi, penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, seks bebas, terorisme, kekerasan yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan, separatisme dan krisis moral lainnya. Sebabnya adalah masyarakat Indonesia telah tercerabut dari nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Oleh karena itu pendidikan karakter merupakan keniscayaan yang harus diimplemntasikan oleh lembaga pendidikan. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Kata Kunci:: *Konsistensi, Pendidikan dan Pesantren.*

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang pendidikan, seakan kita dihadapkan pada mata rantai persoalan yang tidak jelas ujung pangkalnya dan dari mana harus memulainya. Begitu banyak persoalan yang muncul, sehingga acapkali membuat kita kesulitan dalam upaya memformulasikan solusinya. Bahkan sampai hari ini, persoalan-persoalan dimaksud masih saja menyelimuti gerak roda pendidikan kita baik persoalan yang bersifat teknis-praktis di lapangan maupun pesoalan-persoalan yang bersifat non teknis berupa paradigma, arah dan kebijakan.

Secara *real*, problem pendidikan kita terlihat terutama pada upaya pelaksanaan pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan. Pendidikan dilaksanakan tetapi belum mampu mengubah perilaku kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan membanggakan. Masyarakat tampak begitu rentan dengan berbagai krisis yang menghampirinya, akibat rendahnya ilmu pengetahuan, wawasan dan kesadaran (Suyanto dan Hisyam, 2003:196). Begitupun pada kalangan generasi muda misalnya, maraknya tawuran diantara pelajar, pergaulan bebas di kalangan remaja, terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang, tidak patuh dan tidak memiliki rasa hormat pada guru dan orang tua, cenderung mudah meninggalkan perintah-perintah agama seperti; shalat, puasa, mengaji dan lain-lain adalah membuktikan bahwa upaya pendidikan moral di negeri ini belum berhasil (Khoe Yao Tung, 2002:52). Bahkan pendidikan agama Islam sekalipun, sebagai media transformasi keilmuan yang menaruh perhatian besar pada aspek pembentukan budi pekerti atau akhlak siswa disinyalir masih belum juga mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang sejak lama diharapkan dapat menjadi *agent of change* bagi kehidupan masyarakat juga masih dipertanyakan eksistensinya. Pondok pesantren diorientasikan untuk pembentukan akhlak atau budi pekerti bagi kalangan santri atau masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana penuturan Abdurahman Wahid (1998:59) bahwa kemampuan pesantren untuk tetap dapat mempertahankan

identitas dirinya yang bersifat subkuturil sedang diuji. Bahkan, masih menjadi pertanyaan besar mampu atau tidaknya pesantren menyerap perubahan demi perubahan kulturil yang sedang dan akan berlangsung di masyarakat, minimal dengan tidak kehilangan tata nilai yang telah dimilikinya selama ini. Di tengah suasana kemasyarakatan di mana kata-kata kejujuran, kesungguhan, kepatuhan dan kesederhanaan tengah mengalami pemutar balikan pengertian secara sinis, niscaya merupakan tragedi bagi pesantren bila harus mengalami pemutar balikan tata nilai yang telah dimilikinya selama ini.

Dalam sejarah, pesantren tempat di mana para santri belajar, dicatat bahwa sejak lama sebetulnya telah mampu menghantarkan anak-anak bangsa menjadi pribadi yang kuat, mandiri, tawadhu, santun, sederhana, dan berilmu pengetahuan, meskipun dominan pada ilmu-ilmu agama. Pesantren dianggap telah mampu menjadi media transformasi keilmuan yang dapat membentuk diri pribadi santri yang berkarakter baik. Nyaris dalam berbagai kehidupan social kemasyarakatan, pesantren telah memainkan peranan yang sangat penting, terutama sebagai media *transfer of value*. Melalui pengajaran yang diberikan, pesantren berupaya menginetrnalisasikan nilai-nilai agama pada setiap kehidupan individu santri.

Namun demikian, seiring dengan pesatnya arus perkembangan zaman, di abad modern sekarang ini di mana arus globalisasi dan informasi yang begitu pesat tampak telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk pesantren. Dengan gempuran budaya asing yang begitu dahsyat, sedikit banyak telah membawa dampak bagi upaya penanaman nilai-nilai agama pada disi santri. Itu sebabnya, upaya pendidikan di Indonesia termasuk pesantren, pada aspek pendidikan karakter sampai hari ini mengalami tantangan yang begitu berat. Bahkan dalam realitas, pendidikan pesantren disinyalir masih belum berhasil dalam membentuk budi pekerti atau akhlak siswa secara optimal. Menurut Suyata (1998:73), kekurangoptimalan pesantren dalam membentuk karakter santri boleh jadi disebabkan banyak factor, salahsatunya ialah pada belum optimalnya upaya penerapan dan pengembangan metode

adalam kegiatan pendidikan atau pengajaran. Para kyai dan ustadz misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar cenderung lebih teraksentuasi pada pengembangan metode *rout learning* dan lebih bersifat tekstual. Dalam pengajaran, para kyai dan ustadz diduga masih kurang memperhatikan aspek-aspek lain yang mampu mengembangkan daya pikir siswa yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri dan berkepribadian (Dawam Raharjo, 1993:8). Pengajaran pesantren, seolah hanya bermuara pada satu titik, yakni ranah kognitif dengan target kemampuan dapat membaca dan memahamai kitab-kitab klasik secara tekstual. Padahal, dalam pendidikan agama Islam begitu sarat dengan nilai-nilai yang relevan dengan aturan kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan pada Pondok Pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa dalam pengajaran, kyai dan para ustadz cenderung masih konsisten dengan materi-materi pengajaran pesantren yang mengkaji kitab-kitab klasik sebagaimana pesantren di Indoenesia pada umumnya. Kurikulum yang dibangun tentunya tidak saja materi-materi pengajaran yang bersifat konvesional, tetapi juga materi-materi pengajaran kekinian seperti tentang wawasan keterampilan dan keilmuan lainnya. Namun demikian, sejalan dengan misi besar pendidikan pesantren untuk membetuk muslim yang berkepribadian atau pribadi muslim yang shaleh dan shalehah, kiranya upaya pendidikan peantren dengan berbasis karakter perlu dilihat konsistensinya. Adakah upaya kyai dan para ustadz dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran tidak saja bersifat tekstual, tetapi juga secara kontekstual yang lebih diorientasikan pada pengembangan nilai-nilai karakter? Bagaimananakah upaya pesantren dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran yang relevan dengan upaya pembinaan karakter santri?

Oleh karena itu, atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian secara mendalam guna mengatahui bagaimana "konsisitensi sistem pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon".

Isu ini penting untuk diteliti, mengingat pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang konsen pada pengembangan tata nilai, perlu untuk diproyeksikan dengan sistem pengajaran yang berbasis karakter. Bagi Kyai dan para ustadz dalam mengajar kiranya penting untuk senantiasa mengembangkan muatan nilai-nilai pengajaran berbasis karakter. Dalam sistem pengajaran pesantren perlu penggunaan dan pengembangan metode secara tepat dan memadai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sistem pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana konsistensi pelaksanaan pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep sistem pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah.
2. Mengkaji bentuk konsistensi pelaksanaan pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al ma'unah.
3. Menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan pesantren berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pondok pesantren; agar lebih mengetahui bagaimana konsistensi sistem pengajaran berbasis karakter yang dikembangkan
2. Masyarakat Desa Panongan; agar lebih mengetahui bagaimana kensep dan pengembangan pembelajaran berbasis karakter pada pondok pesantren Al Ma'unah.
3. Aparat terkait meliputi Kuwu, Camat dan Bupati yang berhubungan dengan pemberdayaan pesantren sehingga dapat mengakomodir apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan pondok pesantren dan masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Pondok Pesantren

Istilah pesantren, menurut Soegarda Poerbakawatja (dalam Haidar Putra Daulay, 2004:26) berasal dari kata santri, dengan mendapat awalan pe-dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Menurutnya bahwa pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat "tradisional" untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian.

2. Tipologi Pesantren

Menurut Mas'ud dkk, (2002:149-150) ada beberapa tipologi atau model pondok pesantren yaitu :

a. Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi-I-din*) bagi para santrinya.

b. Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal.

c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di dalam naungan Kemenag) maupun sekolah (sekolah umum di bawah DEPDIKNAS) dalam berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai Perguruan Tinggi yang tidak hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan meliankan juga fakultas-fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur adalah contohnya.

d. Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam di mana para santrinya belajar di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi di luarnya. Pendidikan agama di pesantren model ini diberikan di luar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.

3. Sistem Pendidikan Pesantren

Menurut Zamaksari Dhofier (1998:17) bahwa unsure-unsur pesantren paling tidak meliputi; pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik atau ilmu-ilmu agama dan kyai. Adapun dilihat dari pola pengajarannya sebagaimana pendapat Haidar Putra Daulay (2004:27-30) terdiri dari; pola I, yaitu pesantren yang masih terikat kuat dengan sistem pendidikan Islam sebelum zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Ciri-ciri dari pesantren pola 1 adalah; Pertama, pengkajian kitab-kitab klasik. Kedua, dengan menggunakan metode sorogan, wetonan, dan hafalan di dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Ketiga, tidak memakai sistem klasikal. Pengetahuan sesorang diukur dari sejumlah kitab yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama mana ia berguru. Keempat, tujuan pendidikan adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi

semangat, menghargai nilai-nilai spiritual, dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkahlaku yang jujur dan bermoral serta menyiapkan para santri untuk hidup dan bersih hati.

Pola II, yaitu pesantren sebagai kelanjutan dari pola I. Jika Pola I inti pelajaran adalah pengkajian kitab-kitab klasik dengan menggunakan metode sorogan, wetonan, dan hafalan. Sedangkan, pada pesantren Pola II lebih luas dari itu. Pada pesantren Pola II inti pelajaran tetap menggunakan kitab-kitab klasik yang diajarkan dalam bentuk klasikal dan nonklasikal.

Pola III, yaitu pesantren yang di dalamnya program keilmuan telah diupayakan menyeimbangkan antara ilmu agama dan umum. Ditanamkan sikap positif terhadap kedua jenis ilmu itu kepada santri. Selain itu, ciri Pola III ini adalah adanya upaya penanaman berbagai aspek pendidikan seperti; kemasyarakatan, keterampilan, kesenian. Kejasmanian, kepramukaan dan pengembangan masyarakat.

Pola IV, yaitu pesantren yang mengutamakan pengajaran ilmu-ilmu keterampilan di samping ilmu-ilmu agama sebagai mata pelajaran pokok. Pesantren ini mendidik para santrinya untuk memahami dan dapat melaksanakan berbagai keterampilan guna dijadikan bekal hidupnya. Dengan demikian, kegiatan pendidikannya meliputi kegiatan kelas, praktik di laboratorium, bengkel, kebun atau lapangan.

Pola V, yaitu pesantren yang mengasuh beraneka ragam lembaga pendidikan yang tergolong formal dan nonformal. Pesantren ini juga dapat dikatakan sebagai pesantren yang lebih lengkap dari pesantren yang telah disebutkan di atas. Kelengkapannya itu, ditinjau dari segi keanekaragaman bentuk pendidikan yang dikelolanya.

4. Pendidikan Karakter dalam Islam

Istilah karakter sebagaimana didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin (dalam Majid & Andayani, 2012:11) bahwa secara therminologi mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), , mencintai kebaikan (*loving the good*)

dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu seringkali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku.

Dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam. Dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan. Bagi kebanyakan muslim segala yang dianggap halal dan haram dalam Islam dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam Islam terdapat tiga nilai utama, yaitu akhlak, adab dan keteladanan.

Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari'ah dan ajaran Islam secara umum. Sedangkan term adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkahlaku yang baik. Dan keteladanan merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik, mengikuti keteladanan nabi Muhammad SAW. Ketiga nilai inilah yang menjadi pilar pendidikan karakter dalam Islam.

5. Akhlak atau Karakter Pesantren

Kata "akhlak" dalam bahasa Indonesia lebih dimaknai sebagai budi pekerti, sopan santun atau kesusilaan. Dalam bahasa Inggris, kata "akhlak" diidentikan dengan kata "moral" atau "ethic" yang berarti adat kebiasaan. Namun demikian, akhlak di pesantren dilihat dari kedudukannya sebagaimana penuturan Tamyiz Burhanudin (2001:42), paling tidak meliputi; (1) akhlak sebagai amalan utama disbanding lainnya (2) Akhlak sebagai media untuk menerima nur dan ilmu Allah dan (3) akhlak sebagai sarana mencapai ilmu manfa'at.

Di lihat dari prinsip pengajarannya, pesantren lebih menitikberatkan pada prinsip ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, mengagungkan ilmu, pengamalan, hubungan orang tua-anak, estafet, kolektifitas, kemandirian dan kesederhanaan. Adapun metode pendidikan akhlak setidaknya dapat lakukan melalui; (1)

metode keteladanan, (2) latihan dan pembiasaan, (3) mengambil pelajaran (ibrah), (4) nasehat (mauidzah) (5) kedisiplinan (6) pujian dan hukuman (targhib wa tahdzib).

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Studi Sujari (2007) menemukan bahwa dalam perspektif pendidikan Islam Indonesia, pendidikan pondok pesantren tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan nasional yang memberikan pencerahan bagi peserta didik secara integral, baik kognitif (*knowlagde*), afektif (*attucude*) maupun psikomotorik (*skill).*

Sedangkan Patoni (2007) menyebutkan bahwa selain mempertahankan kitab-kitab Islam klasik sebagai upaya pelestarian khazanah yang lama, pondok pesantren juga lebih progresif memasukan pelajaran-pelajaran umum. Pada pondok pesantren Tebuireng telah dikembangkan pembaharuan terhadap kurikulum dan sistem pengajarannya. Sementara itu, Ali Saefullah (1995) dalam mengkaji tentang pondok modern Gontor Darussalam menunjukan bahwa meskipun telah modern dalam sistem pendidikan dan pengajarannya, lembaga ini tetap mempertahankan ideologi pendidikan pondok, dengan harapan dapat dikembangkan nilai-nilai positif yang tersimpul di dalamnya dan dipertahankan kontinuitas sejarah dengan lembaga pendidikan pondok pesantren tradisional.

Adapun Saleh Widodo (11995) dalam meneliti pesantren Darul Falah berkesimpulan bahwa pergaulan antara santri, ustadz dan karyawan cukup erat, karena mereka hidup dalam satu perkampungan. Saling berkunjung di antara mereka merupakan hal yang umum dilakukan. Pergaulan seperti itu bisa memberikan pengaruh terhadap hasil pendidikan yang ditujukan pada pembentukan pribadi yang bisa menjadi Pembina perubahan.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al

Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan yaitu, awal bulan Mei 2012 sampai dengan akhir bulan Juli 2012

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982:18), antara lain; 1) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data terurai dalam bentuk kata-kata; 2) peneliti merupakan instrument kunci; 3) analisa data cenderung secara induktif, dan 4) "makna" merupakan suatu yang esensial bagi pendekatan kualitatif. Bentuk deskriptif kualitatif yakni berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang (Robert, 1994:15).

Berkaitan dengan itu penelitian ini dimaksudkan bukan untuk mengkaji hipotesis tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variable, gejala atau keadaan, karena penelitian deskripsi berupaya mencermati sedetail mungkin individu atau fenomena, gejala sebuah kelompok dan sebagainya atau sebuah unit secara mendalam (Lexy J. Moleong, 2004:18). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek, artinya data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang berintegrasi. Dalam hal ini akan berfokus pada kajian tentang konsistensi system pengajaran di pesantren dengan berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari 1 orang kyai, 5 orang ustadz, 10 santri 3 orang tokoh masyarakat/tokoh agama dan Kepala Desa. Dengan demikian, jumlah total dari keseluruhan responden berjumlah 19 orang. Pertimbangan yang mendasari diambilnya responden sebagaimana dikemukakan di atas adalah pertimbangan waktu dan biaya penelitian, serta karakteristik responden yang relative homogen, sehingga jumlah ini dianggap

cukup representative dalam memberikan informasi yang diperlukan.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling, di mana sampel diambil bukan tergantung pada populasi, melainkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (1998:81) bahwa penggunaan teknik purposive sampling adalah peneliti cenderung memiliki informasi yang dianggap tahu dan dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap serta mengetahui masalahnya secara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan di atas, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

   Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai lokasi penelitian, karakteristik informan, dan bentuk konsistensi tanggung jawab pendidikan agama dalam keluarga di lokasi penelitian

b. Studi Dokumentasi

   Studi dokumentasi, ini dilakukan untuk memperoleh data tentang kondisi objektif dari lokasi penelitian, meliputi keadaan geografis, keadaan informan dan lain sebagainya.

3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah atau memenuhi taraf kepercayaan yang tinggi diperlukan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data. Tiga cara dikemukakan oleh Cuba dalam Moloeng, yaitu; 1) memperpanjang waktu tinggal 2) Observasi dengan tekun, dan 3) menguji secara triangulasi (Noeng Muhajir, 1992:153) atau dapat juga ditambah dengan teknik-teknik seperti pembahasan syarat, kecukupan refresial dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, selalu melakukan observasi mendalam secara tekun sekaligus memperpanjang kebersamaan dalam

berbagai kesempatan, gejala dan penggunaan triangulasi (khususnya triangulasi sumber dan triangulasi penyidik). Dengan trianggulasi sumber peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat keabsahan data-data atau informasi yang peneliti peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda, sedangkan dengan triangulasi penyidik, peneliti dapat bekerjasama dengan pengamat lain atau peneliti lain atau ahli dalam masalah tersebut, sehingga dapat membuat mengurangi kemencengan dalam pengumoulan data.

4. Tenik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses melihat secara mendalam dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lain, catatan lapangan, juga bahan-bahan lain untuk meningkatkan pemehaman peneliti tentang apa yang diteliti dan dapat menyajikan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen, 1982:28). Analisa data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Hal ini dilakukan terus sampai dengan akhir penelitian, yakni sampai dengan tahap penyusunan laporan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menyajikan deskripsi lokasi penelitian dan profil pondok pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Sedangkan pembahasan menyajikan hasil penelitian terutama terkait dengan konsistensi pesantren dalam penerapan pendidikan dan pengajaran berbasis karakter.

1. Sejarah Pondok Pesantren Al Ma'unah

Secara geografis, pondok pesantren Al Ma'unah terletak di Desa Kepuh Blok Sembung Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Sebelah barat dibatasi dengan jalan baru blok pedut yang menghubungkan desa Kepuh dengan Panongan, sebelah utara dibatasi dengan makam penduduk blok Sembung, sebelah selatan berbatasan dengan tanah perkebunan masyarakat dan sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk blok sembung.

Pondok pesantren Al Ma'unah meskipun posisinya berada

sekitar 100 meter ke dalam dari Jln. By Pass Ki Ageng Tepak Palimanan - Keramat - Cirebon, secara geografis termasuk strategis karena mudah untuk dijangkau dari berbagai arah kendaraan baik roda dua, tiga ataupun empat. Dengan posisi yang strategis itu, sehingga tidak sedikit santri yang belajar di pondok Al Ma'unah berasal dari berberbagai daerah seperti Jakarta, Karawang, Bekasi, Tegal, Brebes, Indramayu Kuningan, Majalengka bahkan dari Palembang, Lampung termasuk masyarakat sekitar terdekat di Kota atau Kabupaten Cirebon..

Berdasarkan historis, sebagaimana penuturan pengasuh pondok pesantren Al Ma'unah yakni K.H. Bahrudin Yusuf (55 th) (Wawancara tgl. 11 Oktober 2012), bahwa cikal bakal berdirinya pondok pesantren Al Ma'unah adalah pertamakali didirikannya pondok pesantren di Blok Sembung Desa Kepuh oleh Kyai Hammad pada sekitar tahun 1700 Masehi yang lalu, dengan jumlah santri sekitar 30 orang. Apa yang dilakukan Kyai Hammad pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Syekh Pasir Raga Depok yang masih ada keterkaitan dengan silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Namun demikian, setelah masa Kyai Hammad, pondok pesantren tersebut yang belum jelas namanya mengalami kevakuman hingga dua periode.

Pada peridoe ketiga, pesantren tersebut dilanjutkan oleh Kyai Nurhamam kemudian Kyai Juned sampai tahun 1930-an. Setelah itu dilanjutkan oleh Kyai Abdurrahim pada tahun 1974, terus dilanjutkan oleh putra kyai Muhammad tahun 2002. Kondisi pesantren tersebut relatif masih belum berkembang, sampai pada akhirnya setelah Kyai Muhammad wafat tahun 2003, terus dikembangkan menjadi pesantren Kedungdampul blok Sembung.

Suatu ketika seorang dermawan bernama H. Samaun bin H, Mansur dari Balerante, melalui seorang tokoh masyarakat dan sekaligus Nyai yaitu Hj. Ipah menawarkan pada KH. Bahrudin Yusuf untuk kesediaannya memelihara tanah milik H. Sama'un yang ketika itu masih berupa jurang. Dengan tawaran itu, K.H. Bahrudin Yusuf menerima dengan ikhlas tanah itu sebagai bentuk wakaf dari H. Sama'un. Itulah kemudian, pada tahun 2004 di atas tanah itu dirintis oleh KH. Bahrudin untuk dibangun pondok pesantren dan madrasah sebagai perluasan dari pondok pesantren

sebelumnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada yang wakaf, maka nama H. Sama'un diabadikan menjadi nama pondok pesantren yaitu Al Ma'unah. Jadi, nama Al Ma'unah diambil dari nama orang yang wakaf tanah yaitu H. Sama'un atau H. Ma'un menjadi Al Ma'un dan dilajutkan Al Ma'unah.

Pada tahun 2004 pula pondok pesantren Al Ma'unah mulai dipadukan dengan pendidikan formal mulai dari TK , Madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Sementara itu, materi yang diajarkan meliputi antara lain; dasar huruf-huruf Arab, meyuarakan huruf Arab , Tata bahasa Arab, Shorof, Sastra Arab,, Ushul Fiqih, Materi-materi akhlak, dan lain-lain. Adapun metode yang dikembangkan yaitu; hafalan, musyawaraoh, sorogan, bandongan, dan praktek langsung dengan mengalami.

Dilihat dari struktur kepengurusan pondok pesantren Al Ma'unah, maka secara organisatoris tergambar sebagaimana terlampir.

2. Konsep Pondok Pesantren Al Ma'unah dalam Mendidik dan Mengajar Santri Berbasis Karakter

Istilah karakter yang diidentikan dengan akhlak ataupun moral, bagi kalangan pesantren sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dahulu ketika pertamakali pesantren dirintis oleh para wali di Indonesia hingga sekarang, orientasi pendidikan dan pengajaran pesantren diarahkan kepada upaya pembentukan akhlak, etika, moral atau sekarang yang sedang hangat diperbincangkan ialah pembentukan karakter.

Namun demikian, seiring dengan arus perkembangan zaman, pola dan system pendidikan pesantren dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, perubahan dan pergeseran. Mulai dari model pesantren bercorak salaf hingga khalaf, bahkan sekarang pesantren terus mengalami perkembangan yang semakin luas dan kompleks. Perubahan dan perkembangan terjadi dalam berbagai hal mulai dari kurikulum, pengelolaan, materi, metode, media dan lainnya. Sehingga dengan demikian, dimungkinkan berdampak pula pada bagaimana konsistensi pesantren dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran berbasis akhlak atau karakter.

Pada bagian ini, sebelum dibahas tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan pesantren dengan berbasis karakter, terlebih dahulu dibahas tentang konsep pendidikan berbasis karakter di pondok pesantren Al Ma'unah Desa Kepuh Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon. Ketika peneliti berkunjung ke kediaman pengasuh pondok pesantren Al Ma'unah, sore itu hari Sabtu tanggal 15-9-2012 pkl. 15.00 Wib. Peneliti berkesempatan untuk mewawancara K.H. Bahrudin Yusuf (55 Thn) seputar konsep pendidikan dan pengajaran pondok pesantren Al Ma'unah.

Punten… menawi kula kirang sopan… (Bahasa Jawa; maksudnya ma'af bila Saya kurang sopan) tutur peneliti. *Niiki kang Bach…ari selerese konsep pesantren puniki dalam mendidik lan ngajar santri ingkang berdasar akhlak atanapi karakter niku kados pundi nggih?* (Maksudnya; Ini kang Bach atau Kyai sesungguhnya persoalan konsep pendidikan dan pengajaran yang berbasis akhlak atau karakter di pondok ini seperti apa?). *Bhrd menjawab:"… pertami menurut kula teng riki ya konsepe ndidik lan ngajar niku kepripun saged mbakta santri menuju kersane gusti Allah Ta'ala. Ya temtose saged dijabaraken secara luas…kaping kalie pripun saged mbentuk akhlak atanapi capene karakter santri ing dalem segala perilaku kehidupan…(*Maksudnya: pertama, menurut saya (*Bhrd*) di pondok ini, konsep mendidik dan mengajar itu bagaimana bisa membawa santri menuju Allah SWT… Ya tentunya bisa dijabarkan secara luas. Kedua, bagaimana bisa membentuk akhlak atau karakter santri dalam segala hal perilaku kehidupan).

Di pondok pesantren Al Ma'unah, menurut penuturan Pengasuh (*Bhrd*) bahwa konsep terpenting dalam mendidik dan mengajar santri ialah bagaimana berupaya dalam membawa santri agar kenal dan dekat dengan Tuhannya. Untuk dapat kenal dan dekat dengan Tuhannya, maka para kyai dan ustadz dituntut agar dapat menjadi mediator atau fasilitator. Sementara itu, seberapa besar kedekatan santri dengan Tuhannya tercermin pada bagaimana akhlak atau karakter yang muncul baik terhadap Tuhan maupun sesamanya.

Dalam kehidupan, yang menjadi standar pembentukan akhlak atau karakter di pondok pesantren Al Ma'unah menurut

Bhrd ialah mengacu pada akhlak atau karakter sebagaimana yang pernah ditunjukan oleh para nabi, sahabat, ulama hingga sekarang para kyai dan para ustadz. Perilaku-perilaku positif tersebut kiranya menjadi standar contoh dan sekaligus inspirasi bagi para santri dalam berperilaku.

Sementara itu, terkait dengan konsep pendidikan dan pengajaran pesantren berbasis karakter atau akhlak, seorang ustadz yakni Ust. Agus (38 th) yang selanjutnya disebut *Ags* dalam kesempatan lain menegaskan bahwa pondok pesantren itu adalah *bengkelnya* akhlak. Dengan demikian, dalam pendidikan dan pengajaran sangat mungkin berkait dengan materi atau muatan akhlak atau karakter. Menurutnya, ketika di rumah para orang tua tidak sepenuhnya dapat membentuk dan menjaga anak-anaknya untuk berakhlak atau berkarakter, maka di pondok pesantrenlah para santri ditanamkan untuk menjunjung tinggi akhlak. etika, moral atau yang sekarang disebut dengan karakter.

Secara substansial materi pengajaran yang terkait dengan akhlak atau karakter secara spesifik sebetulnya tidak dibahas dalam suatu kitab, akan tetapi secara implicit tersebar dalam berbagai pembahasan kitab. Menurut ustad Mudrik (30 th), selanjutnya disebut *Mdrk* menerangkan bahwa kitab yang dipelajari terkait dengan materi akhlak atau karakter antara lain; Ihya Ulumuddin, Ta'lim Muta'alim, Taisaril Khalaq, Adabun Nabawi, Hikam, Wasaya, dan lainnya, termasuk kegiatan dzikir yang secara berjama'ah *diwudawamakan*.

Adapun dilihat dari metode pendidikan dan pengajarannya, sebagaimana penuturan *Bhrd* bahwa di pondok pesantren Al Ma'unah, materi disampaikan melalui metode sorogan, bandongan, hafalan, musyawarah, kerja bhakti dan tadabur alam. Sedangkan dalam rangka pendidikan dan pembinaan karakter atau akhlak didekati dengan metode pembiasaan, perintah, larangan, hukuman, teladan, praktek langsung dan kisah. Menurutnya metode tersebut tidak tertulis, tetapi secara aplikatif tercermin dalam berbagai kegiatan pondok pesantren.

3. Konsistensi Pelaksanaan Pendidikan Pesantren Berbasis Karakter

Pada hari Rabu siang, 17-10-2012 sekitar pkl. 13.00. Wib. Peneliti kembali mewawancarai Ust. Agus. Di kediamannya pondok pesantren Al Ma'unah, *Ags* mengatakan bahwa:"*sampe seniki pondok pesantren Al Ma'unah boten nyukani materi khusus tentang moral atanapi karakter, namung perilaku sedinten-dinten niku diarahaken dateng pembentukan akhlak atanapi cape disebute karakter, mulai sing awit cara berpakaian, dahar, belajar, tilem lan sanese diawasi lan dikontrol*". (Maksudnya: hingga sekarang pesantren tidak memberikan materi khusus tentang moral, tetapi perilaku sehari-sehari diarahkan pada pembentukan karakter. Mulai dari mandi, berpakaian, sarapan, belajar sampe tidur dan lainnya diawasi dan dikontrol).

Hal senada sebagaimana diungkapkan oleh Ust. Mudrik (28 th) bahwa para ustadz dalam mendidik santri tidak memberikan arahan secara detail, tentang apa, kenapa dan untuk apa? Akan tetapi langsung santri diarahkan untuk berbuat atau melakukan. Sehingga dengan demikian semua proses pendidikan yang dilakukan dan ditanamkan bersifat praktis. Menurut *Mdrk,* ketika santri diharuskan untuk berkopiah dan bersarung, maka tidak pernah dibahas atau dikaji, bahkan ditanyakan oleh santri kenapa dan agar apa harus berkopiah dan bersarung.

Demikian dibenarkan oleh seorang santri, yakni Anam (18 th). Menurut *Anm* para santri memakai sarung dan kopiah merasa bahwa itu selain merupakan kebiasaan di pondok pesantren juga bagian dari tata krama kesopanan santri. Para santri merasa tidak pernah dijelaskan oleh kyai atau ustadz. Lain halnya dengan *Anm*, ketika ditanya Lutfi (17 th) menuturkan bahwa memakai kopiah dan sarung bukan karena disuruh kyai atau ustadz, tetapi karena mengikuti kakak-kakak tingkat yang lebih dulu.

Dalam proses pembelajaran, tempat penginapan, dapur, toilet dan lainnya antara laki-laki dan perempuan secara tegas dikelompokan dan dipisah. Di lingkungan pondok, terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di luar kegiatan formal dianggap suatu hal yang tabu. Selain malu bila berdekatan antara laki-laki dan perempuan juga para santri takut bila ditindak oleh

ustadz. Sebab, sebagaimana pernyataan Amir (17 th) seorang santri putra bahwa meskipun tidak tertulis, ustadz tegas menerapkan hukuman bagi yang melanggar kode etik di pondok pesantren.

Meskipun tidak terjadwal secara tertulis, para santri sudah terbiasa disiplin dengan berbagai kegiatan yang ada di pondok. Sebagaimana keterangan dari Ust. Iman (42 th) bahwa selama belajar di pondok para santri putra dan putri terpola dengan kegiatan pondok mulai dari bangun tidur pagi sampai siang, sampai tidur lagi dan bangun lagi. Menurut *Ust. Imn* dan santri *Alf*, *Fth*, *Msr* dan *Anm* bahwa sejak bangun tidur terus shalat subuh, para santri melaksanakan shalat subuh berjama'ah dan membaca Al Qur'an dengan cara sorogan masing-masing kelompok 3 orang dengan dibimbing oleh ustadzah Nafisah (36 th) sampai pkl 06.00. Wib. Setelah itu para santri melakukan piket, mandi dan sarapan sampai pukul 07.00. Wib.

Pada pkl. 07.00 Wib para santri berangkat ke sekolah yang lokasinya masih berada sekitar komplek pondok pesantren Al Ma'unsh. Kecuali yang tidak sekolah, mereka akan belajar tafsir Al Qur'an bersama Ust. Abdul Hakim (38 Th) pada pkl. 09.00 Wib sampai pkl. 12.00. Wib. Sedangkan mereka yang besekolah, pulang dari sekolah pkl. 12.30. Wib. Dilanjutkan dengan makan dan shalat berjama'ah pada pkl. 13.30.. kemudian para santri diberi kesempatan istirahat sampai pkl.14.30 dan setleah itu, belajar atau mengkaji kitab nahwu sharaf bersama kyai dan ustdz secara berkelompok sanpai pkl. 16.00. Wib. Pada pkl. 16.00 Wib tersebut santri melaksanakan shalat Ashar berjama'ah. Dan dilanjutkan piket sampai pkl. 17.00. Wib. Kemudian belajar bahasa Arab bersama Ust. Imron, LC dan Ust. H. Karyono sampai pkl. 17.30. Wib. Selesai itu, santri mandi dan menjelang shalat magrib berjama'ah para santri membaca asma'ul husna secara bersama-sama tetapi terbagi dalam kelompok putra di mushala dan kelompok putrid di Aula Putri.

Shalat Magrib dilaksanakan secara berjama'ah putra dan putrid, kemudian setelah itu mujahadah Al Qur'an secara bersama-sama dengan bimbingan K.H. Bahrudin Yusuf, sampai masuk waktu Isya. Tiba saatnya waktu Isya para santri shalat berjama.ah dilanjutkan kemudian dengan belajar Al Qur'an bersama Ustadzah

Nafisah dan Ust. H. Karyono sampai pkl. 20.00 Wib. Selanjutnay mengkaji kitab sesuai jadwal yang ditentukan bersama K.H. Bahrudin Yusuf sampai pkl. 21.00 Wib. Selesai mengkaji kitab dilanjutkan dengan musyawarah oleh para santri yang dipimpin seorang santri yang ditunjuk sampai pkl. 22.00. Wib. Seetelah itu, tepat pkl. 22.00 Wib para santri kembali ke pondok penginapan dan belajar sekaligus.

Para santri bangun tidur pkl. 04.30. Wib langsung ke Aula untuk membaca Asmaul husna. Kemudian mandi dan shalat shubuh berjama'ah bersama kyai atau ustadz. Demikian seterusnya berjalan secara rutin di pondok pesantren Al Ma'unah. Menurut *Ust. Ags* bahwa semua program yang dilaksanakan di pondok pada dasarnya mengandung unsur pendidikan dan pengajaran. Artinya, apa yang menjadi target dalam pembinaan akhlak atau karakter sudah inklud di dalamnya. Proses pembiasaan, perintah, larangan dan hukuman terefleksikan dalam program kegiatan pesantren.

Selain program yang dilaksanakan santri secara rutin, pondok pesantren Al Ma'unah juga melaksanakan kegiatan *mujahadah* setiap malam Jum'at pkl. 23.00 Wib sampai dengan pkl. 12.30. Wib. Menuurt Ust. Mudrik bahwa kegiatan mujahadah tersebut diikuti tidak hanya oleh kalangan santri, tetapi juga oleh kalangan masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Beberapa orang peserta mujahadah dari kalangan masyarakat yakni *Atyh (48 Th)* , *Symn (50 Th) dan Amn (52 Th)* menyatakan bahwa ada sekitar 80-an lebih peserta mujahadah dari kalangan masyarakat.

4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan pesantren berbasis karakter di Pondok Pesantren Al Ma'unah

Secara umum pendidikan dan pengajaran pesantren berbasis karakter atau akhlak di pondok pesantren Al Ma'unah berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan. Namun demikian, seiring dengan progam kegiatan yang dikembangkan, dalam hal tertentu disinyalir masih saja terdapat kendala atau hambatan. Setidaknya kendala atau hambatan itu dapat dipetakan dalam faktor-faktor penyebab internal dan eksternal. Selengkapnya, sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut.

a. Faktor Penyebab Internal

Pada saat Ust. Abdul Majid (37 Th) selesai mengajar kitab sekitar pkl. 16.00 Wib. kepada peneliti menerangkan bahwa beberapa kendala dalam proses pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren Al Ma'unah yang disebabkan oleh faktor internal antara lain; motivasi belajar santri yang relatif rendah dan latar belakang kehidupan santri yang relatif heterogen atau beragam.

Menurut *Ust. Ags* yang juga diamini oleh *Ust. Mdrk*, bahwa dukungan fasilitas penidikan dan pembelajaran sampai hari ini disinyalir masih belum memadai secara optimal. Meskipun secara umum apa yang menjadi kebutuhan pondok untuk tetap konsisten pelakukan pendidkan dan pengajaran berbasis karakter atau akhlak dapat dibilang sudah cukup karena telah tersedianya asrama penginapan, mushala, aula, lapangan dan lainnnya.

b. Faktor Penyebab External

Kendala pondok pesantren Alma'unah dalam pendidikan dan pengajaran berbasis karakter atau akhlak, selain faktor internal sebagaimana di atas, juga disebabkan oleh faktor eksternal. Beberapa faktor dari luar yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pesantren berbasis karakter atau akhlak, antara lain; sebagaimana pernyataan *Ust. H. Kryn* bahwa faktor lingkungan masyarakat yang mengitari lingkungan pondok pesantren memberi dampak tersendiri bagi perilaku dan pandangan kehidupan santri. Bagaimana corak dan warna kehidupan masyarakat baik dalam berbicara, bersikap atau bertingkahlaku akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku kehidupan santri.

Selanjutnya, kendala lain yang membutuhkan kesiapan pondok pesantren untuk mengahadapinya ialah globalisasi dan arus perkembangan zaman. Godaan duniawi untuk hidup maju seperti orang lain, bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang besar sebagaimana orang pada umumnya merupakan tantangan tersendiri tidak saja bagi para santri, tetapi juga para ustadznya.

Itulah makanya dengan pendekatan mujahadah melalui dzikir dan perenungan yang dilaksanakan di kalangan santri dengan bimbingan *muassis* (pengasuh pondok pesantren) diharapkan bisa membawa para santri untuk tetap lebih istiqomah dalam belajar dan mendalami ilmu agama. Dengan suatu keyakinan bahwa bila kita mencari dunia maka hanya dunia yang kita dapat, tetapi jika akherat yang kita kejar maka insya Allah tidak hanya akherat, dunia pun akan kita raih.

Faktor kendala lain yang juga memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku santri adalah dukungan orang tua, keluarga dan lingkungan masyarakat di mana para santri tinggal. Ketika di pondok mereka merasa diawasi dan dikontrol oleh para ustadz dan sistem pondok, tetapi di rumah mereka seperti merasa bebas dan bisa untuk istirahat dari sistem pondok pesantren.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Konsep pendidikan dan pengajaran pesantren Al Ma'unah dengan berbasis karakter atau akhlak menekankan pada prinsip "membawa santri untuk dekat dan kenal dengan Tuhannya". Melalui pengajaran kitab-kitab yang terkait dengan muatan materi akhlak atau karakter seperti; Ihya Ulumuddin, Ta'lim Muta'alim, Taisaril Khalaq, Adabun Nabawi, Hikam, Wasaya, dan lainnya, termasuk kegiatan dzikir yang secara berjama'ah *diwudawamakan*. Santri dididik dan dibina akhlak atau karakternya melalui pembiasaan, perintah, larangan dan hukuman. Hal demikian direfleksikan pada semua aspek kahidupan santri di pondok pesantren Al Ma'unah.
2. Apa yang menjadi konsep dalam pendidikan dan pengajaran pesantren berbasis karakter atau akhlak, di pondok pesantren Al Ma'unah diaktualisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan santri mulai dari bangun tidur membaca Asmaul Husna, shalat berjama'ah, belajar al Qur'an, mengkaji kitab, mujahadah, kerja bhakti, piket kebersihan, musyawarah, sampai bagaimana cara

hormat kepada kyai, ustadz dan sesama teman, cara berpakaian, cara makan, cara belajar, cara bicara, dan lain-lain. Semuanya diterapkan lewat pembiasaan, perintah, larangan dan hukuman.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelakasnaan pendidikan dan pengajaran pesantren dengan berbasis karakter atau akhlak di Ponpes Al Ma'unah ialah terbagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab internal antara lain; latar belakang kehidupan santri yang relatif heterogen atau beragam. Sedangkan faktor ekstrenal ialah faktor lingkungan masyarakat yang mengitari lingkungan pondok pesantren. Bagaimana corak dan warna kehidupan masyarakat baik dalam berbicara, bersikap atau bertingkahlaku akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku kehidupan santri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid dan Dian Andayani.2012.*Pendidikan Karakter Perspektif Islam*.Rosdakarya:Bandung

Abdurahman Wahid.1995.*Pesantren sebagai Subkultur*.LP3ES:Yogyakarta

Ahmad Zayadi dan Abdl Majid, 2005. *Tadzkirah: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Pendekatan Kontekstual.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Arief Rachman, 2003. *Mengurai Benang Kusut Pendidikan.* Transformasi UNJ: Jakarta.

Basyirudin Usman, 2002. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam.* Ciputat Pers: Jakarta.

Bogdan, Robert, C., & Biklen, Sari, Knopp. (1982).*Qualitative Reseacrh for Education an Introduction to Theory and Methods*.London:Allyn and Bacon.Inc

Dawam Rahardjo.1995.*Pesantren dan Pembaharuan*.LP3ES:Yogyakarta

Fatchul Mu'in.2011.*Pendidikan Karakter*.Arruz Media:Yogyakarta

Hadari Nawawi, 1993. *Pendidikan dalam Islam*. Al Ikhlas: Surabaya.

Haidar Putra Daulay.2004.*Pendidikan Islam*.Prenada Media:Jakarta

John M. Echols & Hassan Shadily, 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. PT. Gramedia: Jakarta.

Khoe Yao Tung, 2002. *Simphoni Sedih Pendidikan Nasional*. Abdi Tandur: Jakarta.

Moloeng J. Lexy.1994.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Suyanto, dan Hisyam, 2001. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Adicita Karyanusa: Yogyakarta.

Suyata.1995.*Pesantren dan Alam Pendidikan Nasional*.LP3ES:Yogyakarta

Tamyiz Burhanudin.2001.*Akhlak Pesantren: Solusi Bagi Kerusakan Akhlak*..ITTAQA Press:Yogyakarta

Thomas Lickona.1992.*Educating For Character*.Bantam Book:New York

Zamakhsyari Dhofier.2009.*Tradisi Pesantren*. Newesea Press:Yogyakarta

Zakiah Daradjat, 1997. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Penerbit Bulan Bintang: Jakarta.

PENGARUH KEPEMIMPINAN KYAI TERHADAP KECERDASAN EMOSI SANTRI DI PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU BABAKAN CIWARINGIN CIREBON

❖ Muzaki
Dosen IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

ABSTRAK

Banyak orang telah mengenal bahwa kyai merupakan seorang panutan masyarakat dengan berbagai kelebihan baik pengetahuan tentang Islam, dalam hal kerohanian dan juga kharismatik bahkan dikeramatkan. Lebih-lebih Kyai yang memegang sebuah pondok pesantren, hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Pimpinan pondok pesantren merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sebuah pesantren yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan pondok pesantren dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehingga begitu perlu kepemimpinan sang Kyai terdhadap kecerdasan emosi santri di Pondok Pesantren.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Kecerdasan Emosi, Pondok Pesantren.*

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan dengan pola asrama seperti pesantren adalah merupakan lingkungan dimana individu tinggal dengan segala atribut yang ada tentu dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi santri. Dan atribut pokok di pesantren yang dapat mempengaruhi santri antara lain kyai, peraturan pesantren, kurikulum dan kitab kuning (Dhofir, 1984,78)

Dalam pesantren, santri hidup dalam suatu komunitas yang khas, dengan kyai, ustadz, santri dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu kampus yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan yang tersendiri. Pesantren merupakan suatu keluarga besar di bawah asuhan seorang kyai atau ulama, dengan dibantu beberapa ustadz. Dalam dunia pesantren santri mempunyai dua orang tua, yaitu bapak-ibu yang telah melahirkannya dan kyai yang mengasuhnya. Ia mempunyai dua saudara, yaitu saudara sesusunan dan saudara seperguruan sesama santri. (Mastuhu, 1994,67)

Melihat kepemimpinan kyai yang ada di pondok pesantren, jelas-jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan emosi santrinya. Hal ini dapat dilihat bagaimana hubungan antara kyai dangan para santri tidak sekedar hubungan antara seorang guru dengan murid belaka. Tetapi lebih dari itu yakni hubungan timbal balik, di mana santri menganggap kyai sebagai bapaknya sendiri. Sedangkan kyai menganggap santrinya sebagai titipan Tuhan yang harus dilindungi (hubungan antara orang tua dan anak) (Galba, 1995, 98). Peranan kyai sebagai guru ditunjukkan dengan dijadikannya kyai sebagai tempat bertanya santri, sedang perannya sebagai orang tua, kyai merupakan tempat dimana santri mengadu, terutama jika santri mempunyai masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri.

Corak kehidupan kyai dan santri begitu besar membuat kedudukan pondok pesantren sebagai berfungsi multidimensi. Kyai tidak hanya dikategorikan seabagai elite agama, tetapi dalam konteks pondok pesantren mereka memiliki otoritas yang tinggi penerusnya yang bersifat kolektif yakni Nyai Hj. Masriyah Amva bersama puteranya yakni Ustad H. Asror Muhammad dengan

saudara-saudaranya.

Dalam lingkungan yang sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan suasana pesantrenya, namun usaha untuk mempengaruhi kecerdasan emosi dengan model kepemimpinan kyai yang demikian itu, maka diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan kecerdasan emosi para santri secara maksimal. Sehingga upaya-upaya pembinaan santri dengan melalui kepemimpinan kyai dilakukan secara kontinyu dengan berbagai pendekatan baik secara formal, umum hingga taraf personal.

Kenyataan ini memberi motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang masalah *Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Kyai terhadap Kecerdasan Emosi Santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon?*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model kepemimpinan kyai pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon?
2. Bagaimanakah bentuk pembinaan santri dalam meningkatkan kecerdasan emosi santri pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon?
3. Adakah pengaruh kepemimpinan kyai terhadap peningkatan kecerdasan emosi para santri pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk menjelaskan model kepemimpinan kyai pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon.
2. Untuk mendiskripsikan bentuk pembinaan santri pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon.

3. Untuk menguraikan pengaruh kepemimpinan kyia terhadap peningkatan kecerdasan emosi santri pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

George R. Terry mengatakan bahwa, "*Leadership is the activity of influencing people to strive willing for group objectives*" (Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan) (Buchari Alma,2001,127). Kepemimpinan dalam intensitasnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam mendayagunakan kepemimpinannya dalam suatu komunitas mempunyia fungsi yang harus diemban oleh seorang pemimpin yaitu mengoptimalisasikan kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Demikian pula di kalangan pondok pesantren seorang kyai sebagai pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yangmenyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam, maka dengan sendirinya seorang kyai tersebut berperan sebagai pemimpin di pondok pesantren dan mempunyai tugas kepemimpinan secara ikhlas dalam mengajar dan memberi bimbingan keagamaan kepada santrinya serta masyarakat sekitar tanpa lelah dan meminta imbalan atau ongkos (Dhofer, 1994, 87).

Kepemimpinan kyai di pondok pesantren adalah kepemimpinan pribadi (personal) segala masalah kepesantrenan bertumpu pada kyai, akhirnya timbullah corak kepemimpinan yang sangat bersifat pribadi yang berlandaskan pada penerimaan masyarakat sekitar secara mutlak. Fenomena ini karena ciri utama kepemimpinan kyai adalaha watak kharismatik.

House (dalam Yukl, 1994) mengatakan bahwa seorang pemimpin kharismatik mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pengikutnya untuk patuh terhadap pemimpin tersebut. Pengikut merasa semua keyakinan dari pemimpin adalah benar dan pengikut merasa mempunyai kinerja kerja yang tinggi.

Sehingga dengan adanya pola kepeminpinan kharismatik yang ada di pondok pesantren akan memberi pengaruh terhadap meningkatnya kecerdasan emosi bagi para santrinya.

Predikat kyai berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan secara suka rela kepada ulama Islam pimpinan masyarakat setempat. Gelar ini merupakan suatu tanda kehormatan bagi suatu kedudukan sosial dan bukan gelar (akademis) yang diperoleh malalui pendidikan formal (Ziemek; 1986; 56).

Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama Islam atau biasanya memiliki ilmu atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya (Dhofier; 1982; 44). Kyai merupakan predikat yang diberikan masyarakat kepada tokoh agama oleh kalangan masyarakat Jawa. Umumnya orang yang disebut kyai memimpin sebuah pesantren, tetapi ada juga yang tidak memimpin sebuah pesantren tetapi menunjukkan keaktifannya mengajar agama. Kyai menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan hidup masyarakatnya dan mereka mendapatkan arti dan tempat tersendiri (Wahid; 1999; 89). Oleh karena itu, pertumbuhan suatu pesantren tergantung kepada kemampuan pribadi kyainya, keahliannya, kedalaman ilmu wibawa dan kharismatikanya.

Bruinessen (1994; 48) mengatakan bahwa kyai sebagai *patron* (pendukung) masyarakat, memainkan peran lebih dari sekedar guru, kyai tidak hanya mendidik dan mengajar santrinya tetapi dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat sekitarnya, menenangkan hati masyarakat, dan menggerakkan pembangunan, memberikan ketetapan hukum tentang berbagai masalah yang aktual, bahkan tidak jarang diminta untuk mengobati orang sakit.

Eksan (2000; 75) mengatakan bahwa pada umumnya di masyarakat, kata kyai disejajarkan dengan pengertian dengan ulama, dalam khazanah Islam yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang disinyalir oleh Al Qur'an sebagai hamba-hamba Allah yang paling takut dan orang-orang yang menjadi pewaris Nabi.

Berbicara mengenai kepemimpinan kyai bahwa, memiliki pesantren dapat dikatakan obsesi kyai. Hal ini dapat dilihat dari kasus kebanyakan kyai di Jawa yang beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan suatu kerajaan kecil, dimana merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangannya (Dhofier; 1982; 55). Dalam sistem semacam ini kyai dapat dikatakan sebagai raja yang mutlak berkuasa atas semua urusan pesantren yang telah didirikannya. Oleh karena itu kyai mempunyai tanggung jawab yang amat besar dan di tangannyalah terletak kunci pembaharuan, karena kyai tampaknya pusat segala-galanya di lingkungan pesantren bahkan di lingkungan masyarakat.

Yang menjadi masalah dalam bentuk kepemimpinan kyai seperti ini adalah, *pertama,* sekitar problem penerus kepemimpina kyai sendiri. Hal ini terjadi karena anak kyai yang menggantikannya sering kali tidak bisa mempunyai kharismatik kepemimpinan seperti ayahnya. Bagi para kyai sekarang penurunan kualitas kepemimpinan itu juga disebabkan karena kepemimpinannya tidak bisa mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya. *Kedua,* kepemimpinan pesantren tengah menghadapi atau berada pada suatu perubahan zaman yang cenderung memperlihatkan seorang pemimpin. Pada saatnya nanti, bukan hal yang mustahil bila santri juga tidak memperhatikan lagi soal kharismatika kyainya, hubungan santri dengan kyai mungkin menjadi layaknya hubungan murid dengan gurunya.

Mastuhu (1994; 89) mengatakan bahwa, ada kecenderungan terjadinya perubahan secara gradual antara gaya kepemimpinan pesantren yang satu dengan yang lain. Kecenderungan perubahan tersebut :

a. Dari jenis kharismatik menuju ke rasional
b. Dari otoriter kebapakan menuju ke diplomatik partisipatif.
c. Dari *laiser-faire* menuju ke birokratik

Peneliti berpendapat walaupun telah terjadi perubahan pola kepemimpinan kharismatik terutama kepemimpinan kyai yaitu kharismatik tetap dipertahankan walaupun sedikit berkurang akibat adanya pengaruh yang masuk ke dalam lingkungan pesantren. Antara lain masuknya pendidikan formal di dalam

pesantren.

Sifat kharismatik dan otoritas yang dimiliki kyai terhadap pengikutnya terutama para santri seringkali dipandang negatif oleh masyarakat non pesantren. Mereka memandang bahwa kepatuhan "mutlak" santri pada kyai menggambarkan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, seperti tuan dan hamba dan bukan dalam kesamaan derajat atas dasar ketundukan pada Allah. Pendapat tersebut adalah tidak benar karena pola hubungan masyarakat pesantren memiliki nuansa yang komplek. Terdapat nuansa kultural, akhlak, ilmu, karomah, integritas keimanan dan sebagainya di pesantren. Santri patuh dan taat serta hormat pada kyai hakekatnya tidak ditujukan paa orangnya, jabatan ke-kyai-annya atau apapun gelar yang disandangnya, melainkan ditujukan pada karomahnya yang diberikan Allah pada kyai. Karomah tersebut bisa karena ke-aliman ilmunya, ketinggian akhlaknya dan sebagainya (Asy'ari; 1996; 59).

Bagaimana dengan kecerdasan emosi itu sendiri? Kecerdasan emosi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Cherniss (2000; 67) mengatakan bahwa sebenarnya kecerdasan emosi telah ada sejak lama, hal ini dapat dilihat pada penelitian dan teori-teori di dalam psikologi kepribadian dan sosial. Walaupun demikian masalah kecerdasan emosi tetap menarik untuk diteliti karena sangat penting di dalam dunia kerja.

Berbicara mengenai kecerdasan terkait dengan kemampuan kognitif seseorang dalam menggunakan aspek pikirannya (kognitif) untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Para ahli psikolog memandang konsep kecerdasan dalam suatu istilah yang disebut intelegensi. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, namun untuk menentukan satu kebulatan definisi tidak pernah dapat disepakati.

Menurut Wechshler (1985; 27), intelegensi adalah suatu kemampuan secara global pada individu untuk bersikap secara tepat, berfikir secara rasional dan dapat mengahadapi lingkungan secara efektif. Definisi sejalan dengan definis yang dikemukakan oleh Sternberg bahwa intelegensi merupakan kemampuan mental seseorang dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk lingkungan (1977; 78). Dan Baron (1996; 86) menjelaskan bahwa intelegensi

merupakan kemampuan berfikir secara abstrak dan belajar dengan cepat dari pengalaman.

Melihat banyaknya definisi tentang intelegensi, memunculkan pengertian tentang kecerdasan emosi itu sendiri. Salovey dan Mayer (1990; 99) sebagai orang yang pertama kali memunculkan istilah kecerdasan emosi *(emotional intelligence)* mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai respon-respon yang terorganisir melewati batas-batas psikologis meliputi kognitif, motivasi dan pengalaman. Emosi biasanya muncul dari keadaan-keadaan internal maupun eksternal, baik itu yang berakibat positif maupun negatif bagi kehidupan manusia.

Cooper dan Sawaf (1993; 47) menyatakan bahwa emosi manusia merupakan suatu wilayah dari perasaan, lubuk hati, naluri tersembunyi dan sensasi emosi. Martani mengemukakan bahwa emosi perlu dikelola agar kekuatan yang terkandung dalam emosi bisa dimanifestasikan dengan baik sehingga seseorang mempunyai emosi yang cerdas (1996; 56).

Emosi merupakan refleksi dari hubungan individu dengan lingkungannya, baik teman, keluarga dan masyarakat bahkan lebih jauh adalah hubungan individu dengan pengalaman masa lalu. Misal, kegembiraan berarti mengingatkan individu kepada kesuksesan seorang teman, sedangkan kesedihan mengingatkan individu kepada kekecewaan terhadap orang lain. Sementara kecerdasan emosi merupakan kemampuan individu untuk mengenal kembali maksud dan bentuk-bentuk emosi yang ada untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan hal-hal tersebut.

Salovey dan Mayer (2000; 49) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai bagian dari kecerdasan sosial yang meliputi kemampuan manusia dalam mengendalikan perasaan dan emosi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, dan memilah-milah semuanya kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membimbing fikiran dan tindakan.

Selanjutnya Cooper dan Sawaf (1998; 54) mengatakan bahwa kecerdasan emosi sebagai suatu kemampuan untuk mengindera, memahami dan dengan efektif menerangkan kekuasaan dan

ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi dan pengaruh. Agustian (2006; 42) mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk merasa, dan kunci kecerdasan emosi ini adalah pada kejujuran hati. Suara hati ini yang seharusnya dijadikan pusat pentingnya kebijaksanaan. Sehingga lebih lanjut Agustian mengatakan bahwa kecerdasan emosi harus menjadi dasar dalam setiap kegiatan perilaku manajemen.

Patton (1997; 34) mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan, produktif dan meraih keberhasilan. Orang yang kecerdasan emosinya tinggi cenderung akan mengalami kesuksesan. Hal senada dikatakan oleh Agustian mengatakan bahwa inti kemampuan pribadi dan sosial yang merupakan kunci utama keberhasilannya sesungguhnya karena kecerdasan emosi yang dimilikinya (2006; 42).

Mengacu pada teori-teori di atas, kecerdasan emosi pada penelitian ini mengikuti teori Goleman (1996; 34) yang mengartikan bahwa kecerdasan emosi sebagai kemampuan seseorang untuk raotivasi diri sendiri dan orang lain, kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan mengendalikan emosi dan kemampuan berhubungan dengan orang lain.

Para ahli psikologi memandang konsep kecerdasan emosi dalam suatu istilah yang disebut dengan intelegensi. Wechsler (1958, 34) mengatakan intelengensi adalah suatu kemampuan secara global pada individu untuk bersikap secara tepat, berfikir secara rasional dan dapat mengahadapi lingkungan secara efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas, penelitian tentang pengaruh antara kepemimpinan kyai dengan kecerdasan emosi santri terasa masih dibutuhkan sebagai bahan pengembangan khasanah keilmuan yang berkembang di pondok pesantren.

E. Pembahasana dan analisa Hasil Penelitian

Kebon Jambu didirikan oleh KH. Muhammad dan Nyai Hj. Masriyah Amva pada tanggal 20 Nopember 1993 diatas tanah wakaf yang diberikan oleh ayah dari Nyai Hj. Masriyah yaitu KH. Amrin Hannan. Lima bulan sesudah menikah, keduanya berangkat

menunaikan haji. Bulan-bulan selanjutnya hambatan dan halangan begitu santer datang mengganggu kelangsungan serta ketentraman Pondok Kebon Melati, yang waktu itu jumlah santri sudah sangat banyak yakni 925. Sehingga pada tanggal 7 Nopember 1993, Akang dan para santri memilih untuk mengembangkan dan pindah ke Kebon Jambu, tanah wakaf dari keluarga KH. Amrin Hanan, ayahanda Ny. Masriyah.

Mengomentari muncul berbagai macam pendidikan sekolah di lingkungan pesantren, Beliau mengatakan bahwa sekolah memang merupakan satu jalan guna lebih meningkatkan wawasan santri, terutama dalam ilmu umum di samping ilmu agama. Namun, dengan adanya sekolah, Beliau memandang banyak santri yang tidak khusyu' mengaji, sehingga ketika terjun masyarakat tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat. "Prioritaskanlah kepentingan pondok dari pada kepentingan sekolah", pesan Beliau menegaskan.

Akang berargumen bahwa santri yang dapat menyelesaikan urusan ngaji, pasti akan dapat pula mengatasi problem-problem di sekolah, dan prestasinya akan sama-sama memuaskan. Beliau mengatakan hubungan antara pondok dan sekolah tetap Beliau jaga. Dan Pondok Kebon Jambu selalu mempererat hubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan Babakan yang di dalamnya terdapat santri Pondok Kebon Jambu, dengan maksud dapat mengontrol kegiatan belajar dan tingkah laku santri barang kali ada yang malas atau nakal.

Suasana duka menyelimuti langit yang mulai redup diselimuti semilir angin malam yang mulai menghembus menusuk pori-pori kulit. Sang pendiri pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy akhirnya Pulang kealam keabadian dipanggil Sang Maha Penyayang. Dengan diiringi sahutan azdan Magrib di seantaro Alam kota wali Cirebon Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hati Rabu, 1 November 2006 Masehi Pukul 17:50 WIB bertepatan dengan 9 Syawal 1437 Hijriyah. Beliau dikebumikan di halaman depan Gerbang Utama Pesantren peda hari kamis 10 Syawal 1437 H. Doaku Menyertai Engkau Selalu.. engkau akan tetap hidup di hatiku…

Sejak itu, tampuk kepemimpinan dipegang oleh istrinya Nyai Hj. Masriyah Amva. Di samping itu, dibentuklah Dewan Pengasuh yang dipimpin oleh K. Asror Muhammad (Putra ke-2) dan beranggotakan K. Syafi'i Atsmari (menantu), K Syamsul Maarif (menantu), K. Shodikin, dan K Muhyidin untuk melanjutkan kepemimpinan Pesantren dibantu oleh *ahlil-bait* yaitu keluarga kyai dan MPP (Majelis pembimbing Pesantren) yang beranggotakan para alumni yang tinggal disekitar Pesantren.

Dalam teori kepemimpinan disebutkan, bahwa kepemimpinan menyangkut orang lain terutama bawahan atau para pengikutnya, pemimpin berhasil atau tidak apabila seorang pemimpin tersebut pandai merangkul dan melibatkan bawahan atau pengikutnya dalam segala aktivitas. Kepemimpinan juga menyangkut distribusi kekuasaan dan tanggung jawab, serta kepemipinan menyangkut penanaman pengaruh dari seseorang kepada bawahannya atau pengikutnya.

Ada tiga pendekatan utama dalam masalah kepemimpinan, pertama pendekatan psikologis sebagian besar didasarkan atas pengakuan umum bahwa perilaku individu untuk sebagian ditentukan oleh struktur kepribadian. Pendekatan sifat-sifat menyatakan bahwa terdapat sifat-sifat tertentu yang ada pada diri seorang pemimpin antara lain; memiliki kekuatan fisik dan keramahan serta memiliki intelegensi yang tinggi. Kedua adalah pendekatan perilaku *(Behavioral Approach)*, perilkau pemimpin ini berorientasi pada tugas dan hubungan antar pengikutnya dan ketiga pendekatan situasi yang mencoba mengembangkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Hanya pemimpin yang mengetahui situsi dan kebutuhan organisasi yangdapat menjadi pemimpin yang efektif (Sutrisno, 2009).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa model dalam kepemimpinan yang bisa dikenal ketika menjalankan kegiatan manajerial di suatu lembaga atau organisasi, model-model kepemimpinan tersebut antara lain;

a. Model pemimpin Kharismatik, yakni merupakan kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang diikuti oleh pengikutnya. Pemimpin semavam ini mempunyai

kekuatan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

b. Model paternalistik, yakni bersikap melindungi pengikutnya sebagai seorang bapak atau sebagi seoang ibu yang penuh kasih sayang, model seperti ini kurang memberikan peluang atau kesempatan kepoada pengikutnya untuk mempunyai inisiatif dan mengambil keputusan.

c. Model militeristik, yakni banyak menggunakan perintah, sistem komando dari pemimpin kepada pengikutnya, sifatnya keras, sangat otoriter, menghendaki agar pengikutnya takut, patuh penuh secara otomatis.

d. Model otokrasi, yakni kepemimpinan berdasarkan kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpin semacam ini berperan sebagai pemain tunggal, menjadi raja dengan kekuasaan absolut.

e. Model laissez faire, yakni pengikutnya berbuat semaunya sendiri, semua kegiatan dan tanggung jawab dikerjakan oleh pengikutnya, pemimpin semacam ini tidak mempunyai ketrampilan hanya sebagai simbol saja.

f. Model populis, yakni mampu menjadi pemimpin rakyat yang berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional.

g. Model administratif, yakni pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif dan,

h. Model demokratis, yakni pemimpin yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Model semacam ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerja sama yang baik antara pemimpin dengan pengikutnya, kekuatan organisasi terdapat pada partisipasi aktif dari setiap pengikutnya (Alma, 2001 dan Sutrisno, 2009).

1. Model Kepemimpinan Kyai Pondok Pesantren Kebon Jambu

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui, bahwa setelah KH. Muhammad wafat pada 1 November 2006 Masehi Pukul 17:50 WIB bertepatan dengan 9 Syawal 1437 Hijriyah yang semula kepemimpinan pondok pesantren Kebon Jambu berada di tangan beliau, maka setelah wafatnya KH. Muhammad baik Ketua Yayasan, dewan Penasehat, dewan Pembimbing dan dewan Pengasuh semua mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam mengelola keberadaan pesantren tersebut terutama dalam pengembangan dan memajukan eksistensi pesantren di tengah-tengah masyarakat Babakan Ciwaringin. Oleh karena itu, model kepemimpinan yang digunakan adalah kepemimpinan kolektif (Wawancara dengan Ustad Ajad Sudrajat tanggal 20 Oktober 2012).

Kepemimpinan kolektif ini diperlukan karena banyaknya santri yang tinggal dan mencari ilmu di pondok ini, sementara sepeninggalan beliau sangat memerlukan tokoh pimpinan sebagai penggantinya akan tetapi belum ada figur tunggal yang dapat menggantikan secara mutlak kepemimpinan KH. Muhammad (al Marhum).

Satu sisi kepemimpinan yang bersifat kharismatik dan juga otokrasi seperti komunitas feodal, model kepemimpinan semacam ini dijalankan oleh Nyai Hj. Masriah Amwa misalnya dalam penentuan siapa Muballigh yang akan diundang ketika akhirus sanah, penentuan takjir bagi santri termasuk di dalamnya adalah sanksi bagi santri yang melanggar susila (pacaran) dan kepemimpinan demokratis yang dilakukan oleh Kyai H. Asror, menurut beliau kepemimpinan demokratis ini digunakan untuk membangun sistem yang berlaku di dalam pesantren bukan penekanan pada figur kyainya, hal semacam ini dimungkinkan ada kesempatan untuk para pengurus bisa memberi masukan demi kebaikan bersama. (Wawancara dengan M. Abdul Hakim tanggal 25 Oktober 2012). Ternyata dengan model dua kepemimpinan yang diterapkan oleh Nyai Hj. Masriah yakni model kharistik dan otokrasi dan kepemimpinan demokratis yang diterpakn oleh KH. Asror ternyata dapat menimbulkan perpindahan suasana hati dan

terjadi peningkatan kecerdasan emosi para santri.

Kepemimpinan kharismatik dan otokrasi yang dimiliki Nyai Hj. Masriah Amwa, sering kali dipandang negatif oleh masyarakat non pesantren. Kepatuhan "mutlak" santri pada Nyai Hj. Masriah Amwa menggambarkan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, seperti tuan dan hambanya bukan dalam kesamaan derajat atas dasar ketundukan kepada Allah. Pendapat tersebut adalah tidak benar karena pola hubungan masyarakat pesantren memiliki nuansa yang komplek, terdapat nuansa kultur, akhlak, ilmu, karomah, integritas keimanan dan sebagainya. Santri patuh pada kyai pada hakekatnya tidak ditujukan pada orangnya, jabatan ke-kyai-an atau pun gelar yang disandangnya, melainkan ditujukan pada karomah yang diberikan Allah pada kyai tersebut dan karomah tersebut bisa karena ketinggian ilmunya dan ketinggian akhlaknya.

2. Bentuk Pembinaan Santri dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosi

Cooper dan Sawaf dalam Agustian (2005) menjelaskan, bahwa metode dan bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosi adalah dengan jalan : Meluangkan waktu dua atau tiga menit dan bangun lima menit lebih awal daripada biasanya,- "Duduklah dengan tenang, pasang telinga hati, keluarlah dari pikiran dan masuklah dalam hati-yang penting merasakan apa yang diinginkan". Dengan cara seperti ini biasanya langsung mendatangkan kejujuran emosi (dalam hati), menghadirkan nilai-nilai kebijaksanaan dalam jiwa, dan menghantarkannya dan dapat digunakannya secara efektif sehingga dapat memberikan "makna" pada kehidupan seseorang.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebenarnya hampir sama seperti halnya dengan pondok pesantren yang lainnya, berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari tentunya dengan tujuan bukan saja untuk menambah dan menggali ilmu pengetahuan

keagamaan, akan tetapi juga untuk meningkatkan kecerdasan emosi para santri. Oleh sebab itu, di pondok pesantren Kebon Jambu, bentuk kegiatan pengajian rutin seperti yang telah dijelaskan pada bab III, serta kegiatan wejangan atau nasehat dari para pengasuh dan pembimbing yang dilakukan setelah pengajian rutin tersebut merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan juga untuk meningkatkan kecerdasan emosi santrinya (Wawancara dengan Ustad Marzuki tanggal 25 Oktober 2012).

Disamping kegiatan-kegiatan rutin tersebut, masih ada juga kegiatan lain, seperti: Masa Ta'aruf Santri Baru, memperbanyak melakukan shalat sunah baik shalat dluha, qiyamul lail, membiasakan melakukan puasa sunah baik itu puasa senin-kamis, puasa sunah akhir dan awal tahun, puasa 'asyura, puasa nisfu sa'ban dan masih banyak lagi puasa-puasa sunah yang lainnya. Kegiatan-kegiatan ini berdampak dalam pembentukan kepribadian santri yang shaleh, taat atau patuh, sabar, ikhlas, rela berkorban dan istiqomah (Wawancara dengan Ustad Muhyidin tanggal 30 Oktober 2012).

Masih ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di pondok pesantren Kebon Jambu, baik itu dilakukan dengan mandiri, yakni pondok mengadakan pelatihan-pelatihan, seperti; LDKS (Latihan Kepemimpinan Dasar Santri) dengan nara sumber para pengasuh dan para pembimbing, ataupun dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak luar, seperti kegiatan yang dilaksanakan kerja sama dengan Kapolrest Cirebon, pengurus dan pengasuh melakukan Study Banding ke pondok-pondok pesantren: Pondok Modern Darul Hikmah Tegal, Pondok Hikmah 2 Bumiayu, pondok Sidogiri Purwokerto, pondok API di Magelang. Serta kegiatan Safari Ramadlan (PPL) mulai akhir Sakban sampai hari raya Idul Fitri bagi santri yang ditunjuk (kurang lebih 35 santri) untuk melakukan dharma bakti pengabdian di tengah masyarakat Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka dan ada juga kegiatan temu alumni (pemantapan bagi aktifis keagamaan) (Wawancara dengan Ustad Ajad Sudrajat tanggal 7 Nopember 2012).

Menurut peneliti, semua bentuk kegiatan yang telah dilakukan di pondok pesantren Kebon Jambu tersebut, adalah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosi santri. Santri yang tinggal dan mencari ilmu di situ diharapkan memiliki akhlak yang baik dan kesalehan sosial yang tinggi, santri diharapkan memiliki kepribadian yang sabar, rajin, jujur, sopan santun, ikhlas, taat, rendah hati, optimis, punya motivasi yang tinggi, empati pada sesama, saling menghormati, dan berguna bagi masyarakat.

3. Pengaruh Kepemimpinan Kyai terhadap Kecerdasan Emosi Santri

Ada asumsi, bahwa keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok manusia secara tidak langsung ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam kontek ini, Henry Pratt Fairchild (1960) mengatakan bahwa pemimpin secara luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memperkarsai tingkah laku sosial dengan cara mengatur, menggerakkan, mengorganisir dan mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam suatu kegiatan sering dianggap sebagai inti yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai yang ada di pondok pesantren Kebon Jambu walaupun dilakukan dengan cara kepemimpinan yang kolektif ternyata dimungkinkan adanya pengaruh kepemimpinan kyai dalam meningkatkan kecerdasan emosi para santrinya.

Seperti kita ketahui, bahwa dunia pesanten yang di dalamnya telah berlangsung proses pendidikan agama selama 24 jam, di mana kyai, guru/ustad, dan santri tinggal secara bersama dalam lingkungan tertentu. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi yang intensif antara sesama penghuni pondok pesantren. Hal ini akan menambah pemahaman dan pengetahuan kyai atau ustad tentang perkembangan dan dinamika sosial, emosi dan

intelektual santri. Berbeda dengan konsep pendidikan yang lain, seperti sekolah umum, interaksi di pesantren terjadi pada tataran pembelajaran di kelas dan di luar kelas serta menyentuh aspek-aspek psikologis anak yang sesungguhnya.

Perbedaan lain dengan sekolah umum adalah kedudukan guru, keberadaan kyai atau ustad di pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pengajar dan media transfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan dan figur bagi para santri dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku mereka menjadi pesan yang lebih menyentuh aspek emosi dan sosial santri. Pesan yang terpancar dari sosok kyai lebih memberi kesan mendalam dibanding anjuran yang bersifat teoritik.

Hubungan antara kyai dan santri tidak hanya sekedar hubungan seorang guru dengan muridnya belaka tetapi lebih dari itu, yaitu telah terjadi hubungan timbal balik di mana santri menganggap kyai sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai menganggap santri sebagai titipan Allah yang senantiasa harus dilindungi.

Interaksi semacam ini menurut Goleman (2000) memungkinkan terjadinya perpindahan suasana hati dan pertukaran emosi antara sesama penghuni pesantren. Hubungan emosi tercermin dari kedekatan sesama penghuni pesantren yang dapat membentuk singkroni antara kyai, ustad dan santri. Singkroni tersebut mencerminkan seberapa jauh hubungan yang dirasakan, semakin erat singkroni maka semakin besar pula perasaan bersahabat, bahagia, motivasi tinggi, taat atau patuh, disiplin, jujur, optimis, rendah hati, empati kepada sesama, saling menghormati (jika berpapasan harus mengucap salam), saling tolong dan masih banyak lagi dalam masalah kesalehan sosial. Hal tersebut juga sebagaimana dikatakan salah seorang pengurus pondok, yaitu Ustad Aje Jamaludin dan Ustad Kartaji bahwa kepemimpinan kyai yang ada di pondok pesantren Kebon Jambu sangat mempengaruhi dalam peningkatan perilaku saleh. (Wawancara tanggal 25 Oktober 2012)

Persepsi santri terhadap barokah kyai juga dapat

mempengaruhi dalam meningkatkan kecerdasan emosi santri di pesantren, apalagi jelas-jelas kepemimpinan kyai tersebut mempunyai sifat kharismatik yang tinggi, yang mempunyai otoritas dan kewenangan mutlak terhadap kehidupan dan lingkungan pesantren termasuk di dalamnya para santrinya. Hal ini tentu dapat berpengaruh dalam membentuk tingkahlaku, aktivitas, perbuatan dan emosi santri.

F. KESIMPULAN

1. Model kepemimpinan kyai yang ada di pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, sepeninggal wafatnya KH. Muhammad model kepemimpinan yang ada merupakan model kepemimpinan kolektif, yakni gabungan model kepemimpinan kharismatik dan otokrasi yang diterapkan oleh Nyai Hj. Masriyah Amwa serta model kepemimpinan demokratis yang dijalankan oleh KH. Asror. Penerapan model kepemimpinan seperti ini dimaksudkan bahwa bukan figur yang ditonjolkan melainkan sistem yang ada agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
2. Bentuk pembinaan dalam rangka peningkatan kecerdasan emosi santri yang dilaksanakan di pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, diantara; Masa Ta'aruf Santri Baru, memperbanyak melakukan shalat sunah baik shalat dluha, qiyamul lail, membiasakan melakukan puasa sunah, LDKS (Latihan Kepemimpinan Dasar Santri) dengan nara sumber para pengasuh dan para pembimbing, ataupun dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak luar, seperti kerja sama dengan Kapolrest Cirebon, pengurus dan pengasuh melakukan Study Banding ke pondok-pondok pesantren. Serta kegiatan Safari Ramadlan (PPL) bagi santri yang ditunjuk (kurang lebih 35 santri) untuk melakukan dharma bakti pengabdian di tengah masyarakat Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka dan ada juga kegiatan temu alumni (pemantapan bagi aktifis keagamaan).

3. Pengaruh Kepemimpinan Kyai terhadap Kecerdasan Emosi Santri, ternyata cukup positif, dilahat dari proses pendidikan agama selama 24 jam, di mana kyai, guru/ustad, dan santri tinggal secara bersama dalam lingkungan tertentu. Melihat kondisi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi yang intensif antara sesama penghuni pondok pesantren. Hal ini akan menambah pemahaman dan pengetahuan kyai atau ustad tentang perkembangan dan dinamika sosial, emosi dan intelektual santri. Keberadaan kyai atau ustad di pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pengajar dan media transfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan dan figur bagi para santri dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku mereka menjadi pesan yang lebih menyentuh aspek emosi dan sosial santri. Pesan yang terpancar dari sosok kyai lebih memberi kesan mendalam dibanding anjuran yang bersifat teoritik, hal ini memungkinkan terjadinya perpindahan suasana hati dan peningkatan kecerdasan emosi antara sesama penghuni pesantren. Adanya perasaan bersahabat, bahagia, motivasi tinggi, taat atau patuh, disiplin, jujur, optimis, rendah hati, empati kepada sesama, saling menghormati, saling tolong dan masih banyak lagi dalam masalah kesalehan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Ary Ginanjar, 2005 : "*Rahasian Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual; ESQ,*" Jakarta, Penerbit ARGA

Alma, Bukhari, 2001 : "*Kewirausahaan*", Bandung, CV ALFABETA

Asy'ari, Zubaidi Habibullah, 1996 : *Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta, LKPSM

Baron,RA, 1996 :"*Essentials of Psychology*", Boston, Allyn and Bacon Inc

Bashori, Khaerudin, 2006 :" *Psikologi Santri*", Yogyakarta, LKiS

Bruenessen, Martin Van, 1995 : "*Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*",

Bandung, Mizan

Burn, J.M, 1994 ;*"Leadership"*, New York, Harper & Row

Cherniss, C, 200 :*"Emotional Intellegence: What it is and Why in Matters"*, www.eiconsertium.org

Cooper, R.K dan Sawaf, A., 1998: *Executive EQ, Kecerdasan Emosional* dalam *Kepemimpinan dan Organisasi* (Alih Bahasa Kantjono), Jakarta, Gramedia

Darajat, Zakiyah, 1993: *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta, Bumi Aksara

....., 1983 : *Memahami Persoalan Remaja*, Jakarta Bulan Bintang

.....,1974 : *Problematika Remaja di Indonesia,* Jakarta, Bulan Bintang

Departeman Agama RI, 1984/1985 :*"Nama dan Data Potensi Pondok-Pondok Pesantren seluruh Indonesia",* Jakarta

Dhofier, Z, 1984: *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES

Ekowarni, E, 1992 : Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi Perkembangan, Buletin Psikologi, 2,24-27

Eksa, Moch, 2000 :*"Kiai Kelana (Biografi Kiai Michit Muzadi)",* Yogyakarta, LKiS

Frey, G dan Grey, B, 1997; *Tradisional Radikal Persinggungan NU-Negara*, Yogyakarta, LkiS

Galba, Sindu, 1995 : *Pesantren sebagai Wadah Komunikasi,* Jakarta, Depdikbud dan Rineka Cipta

Gibbs, N, 1995 :*"The Emotional Question Faktor", Time,* 2, 60-66

Goleman, D, 2000; *Kecerdasan Emosi,* Alih Bahasa Hermaya, T, Jakarta, PT> Gramedia Pustaka Utama

.....,1995: *Working with EQ,* London, Clays Ltd. St Ives plc

Harawi, Dadang, 1997: *Al qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental,* Jakarta, Intermesa

Horikoshi, 1987 : *Kyai dan Perubahan Sosial,* (Alih Bahasa oleh Djohan

Efendi dan Muntaha Azhari), P3M, Jakarta

Kartidirjdo, Sartono, 1990 :*"Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial"*, Jakarta, LP3ES

L, Zulkifli, 1986 : *Psikologi Perkembangan Remaja,* Surabaya, Usaha Nasional

Lazarus, RC, 1991 : Emotion and Adaptation, Oxford New York, Oxford University Press

Madjid, NurKholis, 1997 :*"Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan"*, Jakarta, Paramadina

Mastuhu, 1994 :*" Dinamika Pendidikan Pesantren"*, Jakarta, INIS

Mayer, DJ. David RC, and Peter, S., 2000 : *Emotional Meet Traditional Standart for an Intellegence*, 27, 267-298

Mayer, DJ, Peter, S, and David, C., 2000: *Models of Emotional Intelligence, Handbook of Intelligence*, Cambridge, UK, Cambridge Unversity Press

Patton, P, 1998 :*"Emotionals Intellegence di tempat Kerja"* (Alih Bahasa oleh Zaini Dahlan), Jakarta, Pustaka Dellapratasa

Poerbakawatja, Soegarda, 1980 : "*Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*", Jakarta, Gunung Agung

Snyder, CR, Coping : *The Psycology of What Works,* London, Oxford University Press

Sukamto, 1999 ; *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren,* LP3ES, Jakarta

Sutrisno, Edy, 2009 : "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Jakarta, Kencana

Raharjo, Dawam, 1988 :*"Pesantren dan Pembaharuan",* Jakarta, LP3ES

Verna, MA, and James, RC, 1999: *The Effecs of Home Environment on Academic Achievment,* http//Eric,web,te,Colombia

Wahid, Abdurrahman, 1978 :*"Kepemimpinan dalam Pengembangan Pesantren"*, Jakarta, CV Dharma Bakti

Walgito, B, tt :*"Psikologi Kelompok, Hand Out"*, Yogyakarta

Wimbardi, S, 2000: *Kecerdasan Emosi, Apa dan Bagaimana*

Mengelolanya, Bunga rampai Psikologi Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Yulk, GA, 1994 :*Leadership in Organizations",* New Jersey, Prentice Hall

Zaini, A Wahid, et.al, 1995 ; " *Santri dalam Era Globalisasi: Dinamika Kaum Santri"*, Yogyakarta, LKPSM

ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN PESANTREN
(Studi Terhadap Pengelolaan Ma'had Aly di PP. Babakan Ciwaringin dan PP. Asembagus Situbondo)

❖ Saifuddin
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Institusi pendidikan sebagai institusi yang selalu berkembang seiring dengan denyut nadi perkembangan zaman tampaknya tidak terlepas dari dampak globalisasi ini. Arus globalisasi juga melanda pondok pesantren yang merupakan institusi pendidikan tertua di Indonesia. Namun demikian, pondok pesantren terus berupaya mengikuti dan mengimbangi irama dan alur perkembangan globalisasi. Pendidikan pesantren dapat dikatakan sebagai modal sosial dan bahkan soko guru bagi perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan penting moral keagamaan sebagai perilaku sehari-hari. Melihat perkembangan dunia yang begitu cepat, bagi banyak kalangan telah memunculkan respon dan spekulasi yang beragam. Tidak terkecuali bagi umat islam, perubahan-perubahan yang terus muncul belakangan ini di dalamnya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, aspek ekonomi hingga aspek nilai-nilai moral.

Kata Kunci: *Pengembangan, Pendidikan Tinggi, Pesantren.*

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah lembaga asli Indonesia yang dalam praksis pendidikannya sangat mewarnai perjalanan hidup bangsa Indonesia, banyak tokoh Nasional yang lahir dari pesantren, bahkan salah satu Presiden RI yang tercatat sebagai alumni pesantren dan sekaligus pengasuh pesantren tidak ada lain yaitu KH. Abdurrahman Wahid tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang santri yang mencapai karir tertinggi di bidang politik.

Dalam perkembangannya, pesantren sudah banyak mengalami perubahan kultur akademik, dalam pengertian tidak hanya berkutat pada proses transformasi ilmu yang berkisar pada "kitab kuning" atau *turats* melainkan telah mengembangkan disiplin ilmu yang beragam dengan mendirikan lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga pergururan tinggi (Ishom, dkk, 2006:1)

Fenomena tersebut memberikan gambaran jelas bahwa pesantren merupakan institusi inklusif yang terbuka dengan perkembangan zaman, bahkan berupaya memenuhi harapan masyarakat yang cukup besar dengan berusaha semaksimal mungkin mengadopsi manajemen modern dengan modernisasi pesantren yang secara historis sudah dimulai pada awal abad ke-20 (Lemlit, 2009:358)

Adanya upaya diversifikasi lembaga pendidikan yang berkembang di lingkungan Pesantren disatu sisi merupakan perkembangan positif, namun di sisi lain terkesan keluar dari pakem pengembangan pesantren secara umum sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* karena ada juga fenomena pengembangan Pendidikan Tinggi di Pesantren lebih berorientasi pasar dengan mendirikan misalnya Akademi Keperawatan (Akper), maupun jenis lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Dengan fenomena di atas sejatinya pesantren nampaknya membuat keseimbangan yang cukup signifikan dalam pengembangan ilmu dengan mengembangkan disiplin ilmu lainnya selain displin ilmu keagamaan, namun pertanyaan mendasarnya apakah diversifikasi ilmu yang dikembangkan di Pesantren tersebut sudah dilakukan dengan pertimbangan matang

dengan melihat visi dan misi pesantren yang asasi sebagai lembaga pendidikan yang mengusung "*tafaquh fi al-din*", pendalaman agama.

Adanya pendidikan tinggi di pesantren sesunguhnya membuat nilai tambah yang cukup signifikan karena disamping melengkapi pesantren dengan lembaga yang notabene memberikan peluang pengembangan pribadi santri maupun masyarakat sekitar, juga menambah kepercayaan masyarakat dalam hal pendidikan, dengan asumsi jika sepanjang proses pendidikan anak-anak hingga dewasa dapat dilalui di satu tempat yaitu pesantren maka masyarakat semakin percaya pada sistem pendidikan pesantren.

Kelengkapan lembaga pendidikan di pesantren lebih memberikan peluang dinamisasi pesantren karena fakta Perguruan Tinggi sebagai *agent of change* sudah lama terbukti. Dengan demikian, seberapa besar upaya pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren relevan dengan kiprah dan peranan Kyai dalam mengatur kebijakan pendidikan secara umum dalam lingkup pesantren termanifestasikan dalam praksis pendidikannya.

Kearah mana Pendidikan Tinggi dikembangkan di lingkungan pesantren, apalagi pesantren dalam kategori besar sangat menarik diteliti jika dihubungkan dengan cara pengelolaan dan peran serta Kyai sebagai figur sentral di Pesantren. Kolaborasi ini tak ayal semakin memperkokoh entitas pesantren sebagai lembaga yang sudah teruji dalam bidang pendidikan Islam, atau mungkin sebaliknya Pendidikan Tinggi yang dikembangkan di Pesantren lebih karena "trend" sebagai upaya legitimasi agar pesantren tidak ketinggalan zaman.

Salah satu hal yang menarik lainnya adalah pada umumnya pendidikan tinggi yang dikembangkan di lingkungan pesantren adalah salah satu jenis pendidikan tinggi dalam kategori PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) yang notabene salah satu jenjang pendidikan yang sedang digarap pemerintah untuk bisa eksis dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun sebenarnya ada juga jenis pendidikan tinggi yang

tengah dikembangkan sebagai pendidikan tinggi 'Khas Pesantren' yang disebut dengan Ma'had Aly, pengembangan Ma'had Aly tidak terlepas dari keprihatinan kalangan pesantren untuk mencetak calon-calon generasi penerus Ulama yang saat ini sangat sulit didapatkan dengan kompetensi yang menguasai cabang-cabang keilmuan Islam yang komprehensif. Maka kajian tentang eksistensi Ma'had Aly merupakan kajian yang menarik dilihat dari strategisnya peran Ma'had Aly sebagai upaya serius pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren.

Beberapa penelitian yang relevan telah dilakukan seperti yang dilakukan Marzuki Wahid dkk (2000), menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang diselenggarakan Ma'had Aly tidak lebih dan tidak kurang seperti pondok pesantren dengan berbagai kultur dan tradisi yang melingkupinya. Hanya saja karena kekhususannya, dalam hal-hal tertentu Ma'had Aly di berbagai pesantren diberi fasilitas khusus, seperti asrama, ruang kelas, perpustakaan, dan sarana aktualisasi seperti penerbitan atau ceramah di luar pondok pesantren.

Juga yang membedakan dengan yang lain adalah metode pembelajarannya, yang melibatkan santri sebagi subyek belajar, dan tingkatan kitab kuning yang dikaji relatif tinggi, serta cara mengkajinya secara lebih kritis, maka tentu memberikan nuansa lain seperti yang terjadi di perguruan tinggi umum dengan sistem belajar mandiri, namun tempatnya di pesantren yang notabene biasa mengkaji dengan bandungan dan sorogan dibawah asuhan dan bimbingan Kyai secara langsung.

Dalam tulisan Agus Muhammad (2008) disebutkan bahwa Ma'had Aly sebagai sebuah model pendidikan tinggi di pesantren bisa digolongkan dalam dua jenis; pertama, Ma'had Aly yang secara kelembagaan organisasional dan administratif memang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi yang berbasis pada tradisi intelektual dan keilmuan pondok pesantren. Dalam pengertian ini, Ma'had Aly memang dikelola oleh suatu lembaga resmi yang ditopang dengan manajemen dan administrasi yang profesional.

Kedua, Ma'had Aly secara substansial. Berbeda dengan yang

pertama, model yang terakhir ini tidak dilengkapi dengan kerangka kelembagaan dan organisasi-administratif yang secara khusus mengelola sistem penyelenggaraan pendidikan ini, tetapi dalam praktiknya, pendidikan Ma'had Aly terus-menerus dilaksanakan.

Perbedaan kedua model ini terutama terletak dalam pengelolaannya yang sistematis dan terstruktur sebagaimana manajemen pendidikan pada umumnya.Dalam kategori kedua, banyak pondok pesantren yang bisa dimasukkan di sini. Ukuran tradisi akademik dan intelektual klasik tingkat tinggi itu adalah selain standar kitab kuning yang, menurut orang pesantren, tinggi, juga proses pembelanjarannya tidak saja mengandalkan pembacaan literal dan pemahaman tekstual dari isi kitab dan pemikiran seorang ulama, melainkan telah masuk kedalam analisis isi (*dirasah tahliliyyah*), pembacaan kontekstual (*qira'ah siyaqiyah*), dan lebih-lebih kritik atas isi kitab dan produk pemikiran tersebut (*dirasah naqdiyyah*). Meski tidak seluruhnya terpenuhi, beberapa pondok pesantren bisa dimasukkan dalam kategori ini, yakni misalnya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Maslakhul Huda Kajen Pati, Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, Pondok Pesantren Sarang, Pondok Pesantren Al-Ihya' Kesugihan Cilacap, dan lain-lain.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak lain adalah untuk memperoleh informasi sekitar hal-hal berikut:

1. Perencanaan operasional Ma'had Aly yang dilakukan pengasuh PP. Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP. Asembagus Situbondo.
2. Pelaksanaan pengelolaan Ma'had Aly di PP. Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP Asembagus Situbondo.
3. Peran Kyai dalam merumuskan kebijakan Ma'had Aly di lingkungan PP. Babakan Ciwaringin dan PP. Asembagus Situbondo.

4. Evaluasi pengelolaan Ma'had Aly di lingkungan PP Babakan Ciwaringin dan PP. Asembagus Situbondo dilaksanakan.

C. Manfaat Penelitian

Dengan mendasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah:

a. Manfaat Teoretis

1. Dapat diperoleh beberapa generalisasi, prinsip atau dalil-dalil yang terkait dengan arah pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan pesantren.
2. Bagi disiplin ilmu manajemen pendidikan, penelitian ini sebagai sumbangsih pengembangan teori dan praktek manajemen pengelolaan lembaga pendidikan tinggi di lingkungan pesantren.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi kepala lembaga Pendidikan di lingkungan Pesantren dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menemukan kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan dijadikan rujukan dalam penelitian yang sejenis terutama dalam bidang manajemen pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia dalam perjalanan kiprahnya menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai respon positif pesantren, namun apakah pengelolaan pendidikan tinggi itu sejalan dengan visi dan misi

pengasuh pesantren yang direpresentasikan oleh Kyai sebagai pemegang otoritas keilmuan di pesantren. Rumusan tersebut dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan operasional Ma'had Aly yang dilakukan pengasuh PP Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP. Asembagus Situbondo?
2. Bagaimanan pelaksanaan pengelolaan Ma'had Aly di PP. Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP. Asembagus Situbondo?
3. Bagaimana peran Kyai dalam merumuskan kebijakan Ma'had Aly di lingkungan PP. Babakan Ciwaringin dan PP. Asembagus Situbondo?
4. Bagaimana evaluasi pengelolaan Ma'had Aly di lingkungan PP Babakan Ciwaringin dan PP. Asembagus Situbondo dilaksanakan?

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah dalam sebuah pengelolaan pendidikan tinggi memerlukan banyak instrumen pendukung yang dapat menopang keberlangsungan program pendidikan tersebut, dari kacamata manajemen pengelolaan pendidikan tinggi upaya tersebut harus melewati proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang berjalan secara simultan.

Di dunia pesantren ada satu faktor yang tiadak mungkin dilupakan sebagai entitas utama dari sekian entitas di pesantren yaitu Kyai, Kyai dipandang secara individual maupun sebagai institusi cukup signifikan peran dan kiprahnya dalam menentukan perkembangan pesantren, apakah kharisma dan kiprahnya juga menentukan dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang notabene lembaga yang cukup potensial mengembangkan pesantren dari sisi interaksi ilmiahnya. Untuk lebih memahamkan dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

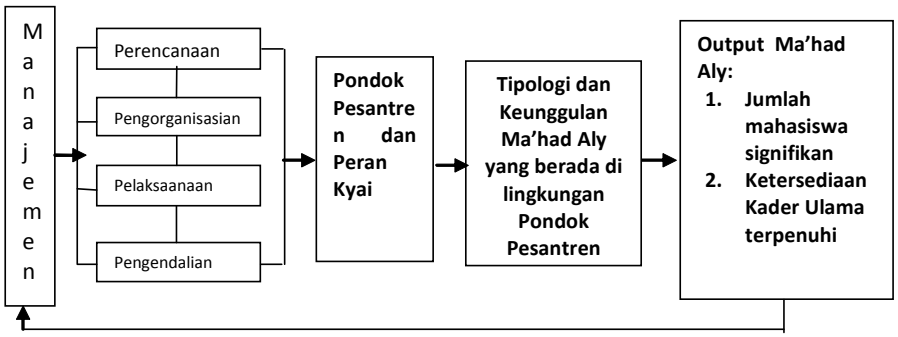

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam karena pada dasarnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2003:5).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian ini memiliki karakteristik alami *(natural setting),* sehingga proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.(Moleong, 2000:3)

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan eksplorasi untuk mencari kejelasan terhadap obyek langsung melalui penjelajahan dengan *grant tour question*.(Sugiyono, 2005:22) Selain wawancara mendalam *(indepth interview)* penelitian dilakukan melalui deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga permasalahan akan dapat ditemukan secara jelas. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Penggunaan metode penelitian kualitatif tidak lain untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan PP. Babakan Ciwaringin

Cirebondan PP Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejoyang merupakan lokasi penelitian.

Penelitian kulitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung tentang perilaku pengasuh pesantren dalam membina dan mengelola pendidikan tinggi dalam lingkungan pesantren yang diasuhnya.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bukan karena alasan *trend*, atau enggan berurusan dengan angka-angka seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dipilihnya metode kualitatif semata-mata karena masalah yang diteliti berkaitan dengan aspek pelaksanaan pengelolaan sebuah institusi penting yang merupakan bagian integral dari pesantren di zaman modern ini yang tentunya melibatkan pengalaman, perasaan, mental, nilai, norma dan budaya yang lebih memungkinkan didekati dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode kualitatif akan diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, dan komprehensif sehingga memiliki kredibilitas tinggi. Dengan begitu, tujuan penelitian akan tercapai. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi non partisipan.

G. Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sesuai pendekatan kualitatif. Analisa data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain (Bogdan, 1982). Dalam penelitian kualitatif analisis dilakukan sebelum di lapangan, selama di lapangan saat pengumpulan data, dan setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2005:90-91).

Analisis sebelum memasuki lapangan, dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis selama

di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila terasa belum memuaskan akan dilanjutkan kembali sampai diperoleh data yang dianggap kredibel dan jenuh data. Kegiatan analisis selanjutnya meliputi reduksi data *(data reduction)*, display data *(data display)*, dan penarikan kesimpulan *(conclusion drawing/verification)*. Tahapan tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut,

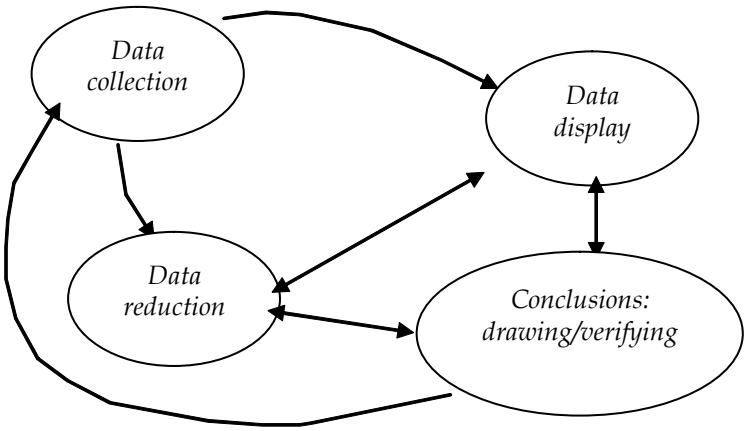

Gambar 1.2. Alur Analisis Data Miles dan Huberman

(Komponen Analisis Data, Miles and Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2005)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari data-data yang terkumpul, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya, sehingga diperoleh gambaran lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data lebih lanjut. Display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya melalui teks yang bersifat naratif, untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi. Sedangkan tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan bukti-bukti yang valid sampai diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan kredibel.

H. Hasil-hasil Penelitian

1. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PP Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang merupakan salah satu pesantren besar di Cirebon. Ukuran besar ini didasarkan dari jumlah santri yang menuntut ilmu di pesantren tersebut. Saat ini tidak kurang 5000 orang santri yang sedang menimba ilmu dengan berbagai tujuan dan jenjang di sana.

PP. Babakan Ciwaringin sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Cirebon, selain Buntet dan Gedongan tentu memiliki kekhasan tersendiri yang cukup dipandang menarik oleh peneliti, salah satunya adalah bahwa di PP. Babakan Ciwaringin sepanjang observasi pendahuluan yang peneliti lakukan memiliki 2 perguruan tinggi yaitu STAIMA (Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali) dan STID Al-Biruni yang tentu merupakan sebuah terobosan penting dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan 2 disiplin yang berbeda walaupun masih dalam rumpun ilmu keagamaan.

Setelah peneliti memasuki wilayah penelitian, yaitu di PP. Babakan Ciwaringin, selain 2 institusi PT yang formal yang telah disebutkan di atas, ada juga satu institusi PT ala pesantren yang disebut Ma'had Aly yang merupakan satu manajemen dari MHS (Madrasah Al-Hikmatus Salafiyah) yang saat ini mengelola madrasah pesantren mulai tingkat ibtidaiyah, wustho dan Ulya.

Melihat lokasi yang cukup jauh dari pusat komunitas baik Kabupaten maupun kota Cirebon, perguruan tinggi yang berada di lingkungan PP. Babakan Ciwaringin tentu memiliki daya tarik tersendiri sehingga dapat eksis dalam menjalankan visi dan misi kependidikannya, terlepas dari mutu kedua perguruan tinggi tersebut agaknya pendidikan tinggi di lingkungan pesantren memiliki hubungan yang erat dengan *trust* yang diperoleh dari lingkungan pesantren itu sendiri.

Sementara itu PP. Asembagus Situbondo Pesantren yang berdiri di Sukorejo ini, pada awalnya adalah sebuah hutan lebat. Setelah mendapat saran dari Habib Musawa dan Kiai Asadullah

dari Semarang, Kiai Syamsul Arifin, sebagai pendiri pondok, segera membabat hutan lebat tersebut sekitar tahun 1908 untuk mendirikan pesantren. Dipilihnya hutan yang banyak dihuni binatang buas tersebut, berdasarkan hasil istikharah. Kini pesantren tersebut telah menjadi agen pembangunan bagi masyarakat sekitarnya. Sosoknya tidak seperti berdiri di menara gading, tetapi justru terbuka dan menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Tak heran, kalau masyarakat Situbondo merasakan manfaat atas kehadiran pondok pesantren ini.

Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo berlokasi di Desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih didirikan tahun 1914 oleh Kiai Syamsul Arifin. Pondok pesantren ini menempati areal seluas 11,9 ha. Ciri khas pondok ini adalah perpaduan antara sistem salaf dan modern. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sudah sangat berkembang dengan jumlah santri mencapai kurang lebih 15.000 santri.

Para santri berasal dari seluruh Indonesia dan juga terdapat santri dari Singapura, Malasyia, dan Brunei Darussalam. Lembaga pendidikan yang dikembangkan di pesantren ini mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Saat ini pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah di asuh oleh KH.R. Achmad Fawaid As'ad.

Di pondok ini selain dikembangkan pendidikan gaya pesantren, juga ditumbuhkan pendidikan umum, SMP, SMA, Ma'had Aly dan Institut Agama Islam Ibrahimy.

Pengasuh PP Salafiyah Safi'iyah dari awal sampai sekarang adalah: 1. KH. Syamsul Arifin (pengasuh dan pendiri); 2. KH. As'ad Syamsul Arifin (alm); 3. KH. Ahmad Fawaid (pengasuh saat ini)

Pemilihan kedua lokasi yang berbeda jauh baik jarak maupun profil pesantrennya tidak lain untuk memberikan perbandingan kualitatif agar ada dialog antara kekuatan dan kelemahan diantara keduanya sebagai langkah penyempurnaan.

2. Paparan Umum Hasil Penelitian

PP. Babakan Ciwaringin dari sisi lokasi menempati ujung Barat bagian Selatan Kabupaten Cirebon, tidak jauh dari perbatasan dengan kabupaten Majalengka, sejak tahun 60-an sudah banyak dirintis berdirinya Perguruan Tinggi di lingkungan PP Babakan Ciwaringin, sehingga ada *joke* yang sering dilontarkan, bahwa di PP. Babakan ciwaringin sudah banyak "kuburan" Perguruan Tinggi.

Maka, tidak heran saat ini di PP Babakan Ciwaringin ada 3 institusi PT yang sekarang eksis yaitu: Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly (STAIMA), Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Biruni, dan Ma'had Aly yang berkolaborasi dengan STID Al-Biruni. Ketiga institusi tersebut di bawah kepengurusan Yayasan yang berbeda, yang merupakan Keluarga Besar PP. Babakan Ciwaringin.

Model kolaborasi Ma'had Aly dan STID Al-Biruni merupakan terobosan yang cukup bermanfaat di era global ini karena santri/mahasiswa yang telah lulus akan memperoleh pengakuan secara formal, disamping itu kolaborasi kedua institusi sifatnya saling melengkapi, melihat realitas yang berkembang di masyarakat, jika hanya mengandalkan kompetensi lulusan Ma'had Aly PP. Babakan Ciwaringin sudah tidak diragukan lagi, hanya saja di masyarakat sisi formalitas sudah menjadi kebutuhan, maka keberadaan Ma'had Aly yang berkplaborasi dengan STID Al-Biruni merupakan model arah pengembangan PT yang berorientasi kemaslahatan bersama.

Ma'had Aly di PP. Babakan Ciwaringin juga dipercaya oleh Kemenag Pusat menyelenggarakan pendidikan kader ulama dengan jenjang pendidikan S.2 dalam konsentrasi Fiqih-Ushul fiqih yang merupakan salah satu *pilot project* bersama salah satu Ma'had Aly lain yaitu Ma'had Aly Seblak dalam konsentrasi Ilmu Falak. Seperti dituturkan oleh KH. Lukman Hakim, selaku Direktur ma'had Aly, "kita ingin menawarkan satu formula pendidikan pasca dimana mengawinkan kajian keilmuan yang berasal dari pesantren dengan kajian akademik". Selama ini terjadi

ketimpangan yang cukup besar anatara lulusan pesantren dan lulusan PTAI, lulusan pesantren dinilai menguasai materi/*content* tapi lemah dari sisi metodologi, demikian sebaliknya lulusan PTAI cukup kuat metodologinya, namun *content* terkadang lemah. Sehingga perlu adanya upaya agar sisi lemah keduanya dapat diatasi dengan mengawinkan model pembelajaran ala pesantren dan ala Perguruan Tinggi.

Dalam pelaksanaan KBM, dosen melakukan dengan strategi tim teaching dalam satu majelis satu kyai yang berlatar belakang pesantren dan satu lagi yang berlatar belakang akademisi, sehingga diharapkan keduanya bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan keahliannya masing-masing dan membekali mahasiswa bagaimana "mengawinkan" dan menyelaraskan dua paradigma yang berbeda agar berjalan dengan baik, apalagi disisplin Fiqih-ushul Fiqih sangat akrab dengan perbedaan pendapat maupun ijtihad.

Selama rekruitmen peserta se-Indosesia sejumlah 345 orang pendaftar dan yang diterima dalam program hanya 25 orang dengan kegiatan Studium general akan dilaksankan tanggal 18 Nopember 2012 di Ma'had Aly.

Keberadaan Ma'had Aly tidak lepas dari eksistensi Madarasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS). MHS merupakan kelanjutan dari Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Tingkat Aliyah. MHS sendiri didirikan oleh para ulama, khususnya di Pesantren Babakan Ciwaringin pada tahun 1959. MHS ini merupakan pengembangan dari pondok pesantren yang ada di Babakan Ciwaringin Cirebon. MHS didirikan dengan tujuan melahirkan kader-kader ulama yang dapat berkiprah mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat.

Seiring dengan perputaran roda zaman, MHS dari tahun ke tahun tetap menempakkan perkembangannya, ini terbukti pada tahun 1966 M. Muncul suatu gagasan untuk merencanakan pembangunan gedung madrasah. Gagasan ini muncul pertama kali dari pemikiran KH. Syaerozie yang

kemudian mendapat dukungan penuh dari seluruh Dewan Asatidz.

Dengan penuh perhatian yang khusus, walupun dalam kesehatan yang kurang baik, dan dengan dukungan Kyai Sholihin, Kyai Anwar Fathoni mulai mengadakan musyawarah pembentukan panitia pembangunan gedung madrasah di rumah kediaman KH. Amin Halim. Dari musyawarah ini menghasilkan keputusan bahwa sebagi ketua panitia ditunjuk KH. Amin Halim dan pembantu umum diserahkan kepad KH. Syaerozie, Ust. Yunus dari Watu Belah dan Ust. Ribban dari Gondok.

Memasuki tahun 1967 M, pembangunan Madrasah mulai dilaksanakan dan sebagai langkah awal dibuatlah bata sebanyak 85.000 buah di kebun milik putra-putri Kyai Madamin, menurut kesepakatan lokasi madrasah telah dipersiapkan di blok Gondang Manis yang bersifat ibadah milik KH. Makhtum Hannan, melihat kurang luasnya tanah yang akan dibangun gedunga MHS, maka diperlukan beberapa areal tanah lagi sementara di sebuah rumah (sekarang dihuni oleh KH. Makhtum Hannan) KH. Amrin Hannan meminta bantuan KH. Syaerozie untuk mencari para dermawan yang dapat membeli tanah ukuran 70 bata milik Bapak Ahid yang beriringan dengan tanah MHS, tidak berapa lama akhirnya KH. Syaerozie mendapatkan tiga dermawan yang hendak membeli tanah tersebut, yaitu Bapak H. Ghozali Dukuhpuntang, Bapak H. Hamid Babadan dn Bapak H. Hamid Dadap.

Dengan demikian setelah persiapan dianggap cukup matang, maka tepat pada hari Ahad tahun 1967 M, dimulailah peletakan batu pertama pembanguna Madrasah Al-Hikamus salafiyah (MHS). Turut hadir pada kesempatan itu KH. Amin Sepuh, KH. Muhammmad Sanusi, KH. Masduqi Ali dan Kyai Sholihin. Juga beberapa ulama se-Cirebon diantaranya: KH. Ridlwan Balerante, KH. Ali Bombang, KH. Umar Kempek dan KH. Syatori Arjawinangun yang turut memberikan do'a.

Selang dua tahun kemudian, tahun 1969 M. KH. Syaerozie mengusulkan kepada Kyai Anwar Fathoni agar Madrasah Al-Hikamus Salfiyah (MHS) diadakan tingkat Aliyah sebagai kelanjutan dari tingkat tsanawiyah. Setelah gagsan tersebut dipertimbangkan, maka pada tahun 1970 M. MHS tingkat aliyah mulai digelar pada bulan Syawal tahun itu juga.

Terdorong rasa tanggung jawab akan kemajuan Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS), pada bulan Dzul Qo'dah tahun 1970 M, Kyai Anwar beserta kyai lainnya berunding dalam sebuah rumah (sekarang dihuni KH. Makhtum Hannan) untuk membagi tugas dalam mengatur roda kegiatan dari masing-masing tingkatan, hasil dari rembukan itu menetapkan KH. Syaerozie sebagai Kepala tingkat Ibtidaiyah dan Kyai Anwar dipercaya untuk memimpin tingkat Tsanawiyah sementara tingkat Aliyah ditunjul KH.Amin Halim.

Akibat dari perkembangan zaman saat itu (tahun 1972 M), muncul gagasan dari pihak keluarga yang bermukim di Babakan dan luar Babakan agar tingkat Aliyah MHS dinegrikan. Berbagai pertimbangan mengenai hal itu segera diajukan yang kemudian menghasilakn kesepakatan untuk mengutus perwakilan dari MHS menghadap Mentri Agama (waktu itu KH. M. Dahlan) atas nama delegasi MHS, KH. Ali, KH. Masduqi Ali, KH. Syaerozie dan KH. Hariri selaku jubir mendapat dua SK. Setelah menghadap Mentri Agama. SK yang disahkan adalah SK MAN dan SK IAIN EKSISTENSI Fak. Tarbiyah.

Setelah satu tahun kedua SK itu berjalan pada tahun 1973 M, pihak Departemen Agama mengangkat kepala MAN baru sebagai pengganti kepala tingkat Aliyah lama. Dan sudah barang tentu semua kebijakan Madrasah ada ditangan DEPAG.

Berawal dari landasan berpijak didirikannya MHS, KH. Syaerozie bersama KH. Amin Halim berupaya mengembalikan kemurnian MHS dengan meneruskan

kembali tingkat aliyah sebagaimana sebelum menerima SK, kesepakatan ini kemudian diajukan kepada Kyai Anwar, setelah mempertimbangkan kemaslahatan hal itu, kemudian diadakanlah musyawarah di rumah kediaman Kyai Anwar. Setelah mempertimbangkan kemaslahatan hal itu, kemudian diadakanlah musyawarah di rumah kediaman KH. Syaerozie. Turut hadir pada kesempatan itu : Kyai Anwar, KH. Amin Halim, KH. Syaerozie dan KH. Amrin Hannan. Keputusan yang diambil menetapkan bahwa Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Tingkat Aliyah diteruskan kembali dengan kepalanya yang telah ditetapkan dahulu (KH. Amin Halim). Dengan penuh keyakinan dan percaya diri pada akhirnya tingkat aliyah MHS tetap berjalan sampai sekarang.

Dilatarbelakangi oleh satu kerisauan bahwa semakin maju yang dilakukan pesantren-pesantren dalam rangka penyesuaian kurikulum dan segala aturan pendidikan formal lainnya, dikhawatirkan justeru orang-orang yang alim fiqh (*fuqaha'*) akan semakin kecil. Berbeda dengan yang terjadi di awal abad XX, pesantren begitu berperan dalam mencetak ahli-ahli fiqh, untuk tampil sebagai panutan umat. Justeru ketika pesantren begitu maju, selalu ingin menyesuaikan dengan lingkungan, orang yang ahli dalam bidang hukum Islam semakin berkurang. Dari sinilah kemudian muncul ide pendirian sebuah institusi Pendidikan Tinggi pasca pesantren yang mereka sebut *Madrasah* digulirkan. Dan atas kesepakat para masyayikh di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yang diprakarsai oleh KH. Makhtum Hannan, maka MHS tingkat aliyah dilanjutkan dengan jenjang pendidikan tinggi Madrasah Al-Hikamus Salafiyah dalam bentuk Ma'had Aly.

Ma'had Aly Madrasah Al-Hikamussalafiyah (MHS) didirikan dengan tujuan mempersiapkan bagi siswa-siswa lanjutan, terutama kelanjutan siswa tingkat Aliyah dengan mempelajari berbagai disiplin keilmuan, diantaranya :

1. Mata Kuliah Penunjang (Al-Musa'idah), 50 SKS

NO	MATERI	KITAB PEGANGAN	Jumlah SKS
1	*Nahw-sharf*	*a. Alfiyyah Ibn Malik* *b. Syarh Ibn 'Aqil* *c. Mughni Labib* *d. Kifayatul Ashab* *e. Dahlan* *f. Al-Ashmuni*	
2	Balaghah	*a. Jauhar al-Maknun* *b. 'Uqudul Juman*	
3	Ushul Fiqh	*a. Jam' AL-Jawami'* *b. Waraqat* *c. Ghayatul Wushul* *d. Lubb Al-Ushul*	
4	Ulum Al-Qur'an/ Ulum At-Tafsir	*a. Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an* *b. Zubdatul Itqan* *c. Al-Wafi* *d. Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*	
5	Ulum Al-Hadis	*a. Manhaj Dzawin Nadhar* *b. Syarh Ibn Shalah*	
6	Al-Qawa'id Al-FIqhiyyah	*a. Al-Asybah Wan-Nadhair* *b. Faraid al-Bahiyyah*	
7	Manthiq	*a. Sulam al-Munauraq* *b. As-Sulam* *c. Syarh As-Syamsyiyyah*	

2. Mata Kuliah Pokok (Al-Asasiyyah), 60 SKS

NO	MATERI	KITAB PEGANGAN	Jumlah SKS
1	Fiqh	*Kifayatul Akhyar, Fath al-Wahhab, I'anat at-Thalibin, al-Adillat al-Fiqhiyyah*	
2	Fiqh Muqaran	*Bidayat al-Mujtahid, Madzhahib al-Arba'ah*	
3	Fiqh Mawaris	*'Iddatul Farid Rahbiyyah*	
4	Tauhid/ Ilmu Kalam	*Ad-Dasuqi, Ummul Barahin, Syarh Fathul Majid, Al-Milal Wan-Nihal*	
5	Tasawwuf	*Ihya Ulum ad-Din, Syarh Hikam Bidayat al-Hidayah*	
6	Tafsir	*Tafsir al-Munir, Tafsir Baidlawi, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Maraghi, Shafwat at-Tafasir*	
7	Hadis	*Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Al-Muwaththo*	

3. Materi Pelengkap (Al-Idhofiyah), 50 SKS

NO	MATERI	*KITAB PEGANGAN*	*Jumlah **SKS***
1	Falaq	*Sullam an-Nayyirain, Syamsul Hilal, Khulashoh al-Wafiyyah*	
2	'Arudl	*Mukhtashor Syafi, Al-Kafi*	
3	Bahasa Arab	*Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah*	
4	Bahasa Inggris		
5	Sosiologi		
6	Metodologi Riset		
7	Bahasa Indonesia		
8	Skripsi		
9	KKN		

Tenaga Pengajar

Secara kurikuler tenaga pengajar di Lembaga ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Al-Muhadhirun*, yaitu beberapa tenaga pengajar yang secara temporal memberikan kuliah umum dengan tema-tema sentral yang meliputi Masail Fiqhiyah, Ushul Fiqh, Sosial Politik, Tasawwuf dan Filsafat.
2. *Al-Mudarrisun,* yaitu beberapa tenaga pengajar yang secara rutin memberikan kuliah dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditentukan.
3. *Al-musyrifun,* yaitu beberapa tenaga pengajar yang bertugas sebagai pendamping harian, dengan mengawasi dan membimbing santri secara intensif.

Dalam proses rekrutmen tenaga edukatif, ada dua hal yang dilakukan, yaitu :

1. Ada rekomendasi kelayakan dari Dewan Masyayikh.
2. Ujian/tes kelayakan secara tidak langsung melalui seminar/ diskusi.

Peserta Didik

Penerimaan santri baru Madrasah melalui dua tahapan, yaitu pendaftaran dan seleksi. Persyaratan bagi calon santri Madrasah adalah harus menyerahkan surat rekomendasi dari Pondok Pesantren yang mengirimnya. dan atau menyerahkan identitas diri.

Demikian sekilas profil Ma'had Aly PP. Babakan Ciwaringin yang diakui oleh KH. Lukman Hakim berdiri secara resmi sejak 2005 yang pada awalnya hanya kajian takhasus-takhasus. Demikian pula ditambahkan bahwa Ma'had Aly lebih mengedepankan kompetensi karena memang para dewan pengajaranya kalau dari sisi formal sangat beragam dan semuanya berlatarbelakang pesantren.

Sejatinya Ma'had Aly yang berkolaborasi dengan STID Al-Biruni yang merupakan pola *ala* PP. Babakan Ciwaringin merupakan bentuk keprihatinan pihak pesantren, seperti yang diutarakan Direktur Ma'had Aly, "kita melihat pendidikan tinggi Islam berjalan sendiri- sendiri, kita ingin mengolaborasi, mensinergikan antara tradisi akademik dan tradisi pesantren".

Dengan kurikulum berbasis kitab, walau nomenklaturnya sama dengan mata kuliah tapi *base*-nya kitab, juga selain itu ditawarkan juga jika tidak sama dengan nomenklatur mata kuliah maka diberikan sesui dengan nama kitabnya, seperti fiqih mu'ashir misalnya.

Dalam hal mahasiswa yang hanya memiliki keterangan atau ijazah madrasah pondok pesantren maka apabila resmi mengikuti pendidikan STID akan menggunakan keterangan *mu'adalah* (kesetaraan) yang diterbitkan oleh Kemenag Pusat. Inilah terobosan yang cukup berarti bagi sebagian santri yang akan

meneruskan jenjang pendidikannya terutama ketika mengikuti pendidikan formal jenjang perguruan tinggi.

Ma'had Aly PP. Asembagus Situbondo

Salah satu yang membuat Ma'had Aly PP. Asembagus Situbondo memiliki nama yang harum di tingkat nasional, adalah realitas alumni Ma'had Aly yang telah muncul sebagai intelektual muda di tingkat nasional, seperti Abd. Moqsith Ghozali dan Imam Nakhoi.Kemunculan intelektual muda tersebut secara sederhana merupakan bukti keseriusan dan kesungguhan pihak pondok untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Dalam struktur PP. Asembagus Situbondo, posisi Ma'had Aly mempunyai hubungan kesetaraan di bawah koordinasi bagian pendidikan tinggi yang menaungi Ma'had Aly dan Institut Agama Islam al-Ibrahimy.

Dalam PBM antara Ma'had Aly dan Institut Agama Islam tidak ada hubungan, dalam arti semua melakukan PBM secara mandiri dan independen, semua memiliki jadwal dan kegiatan tersendiri, yang menghubungkannya secara akademik, ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi jika mahasiswa tersebut menjadi pelajar di kedua institusi perguruan tinggi itu.

Saat ini Ma'had Ali dipimpin oleh *Mudiir Am*: KH. Hariri Abd.Adhim sedangkan mudir: KH. Hasan Basyri, dimana posisi mudir sama dengan direktur di PP. Babakan Ciwaringin.

Ada beberapa kegiatan yang cukup khas bagi Ma'had Ali, yaitu: menerima mahasiswa setiap 3 tahun sekali dan hanya menerima sekitar satu kelas mahasiswa yang jumlahnya 25-30 orang, hal ini menunjukkan komitmen kualitas lebih didahulukan daripada kuantitas. Dengan penerimaan 3 tahun sekali, maka masalah teknis teratasi, misalnya mahasiswa terpantau dengan baik progres kuliahnya sehingga kemungkinan lulus tepat waktu akan tercapai

Sementara itu, untuk menyaring kualitas mahasiswa telah dibentuk madrasah i'dady selama 2-3 tahun dan tidak semua yang masuk i'dad akan diterima tergantung seleksi. Dan masih bisa

dilakukan sebelum selesai idadi untuk ikut seleksi masuk ma'had aly

Dosen-dosen Ma'had Aly sebagian besar dari PP. Asembagus, apabila ada yang dari luar pasti berlatarbelakang pesantren. Hal ini dilakukan agar transmisi keilmuan ala pesantren tidak akan lepas.

Kesamaan Ma'had Aly PP. Asembagus dengan Ma'had Aly PP. Babakan Ciwaringin juga pernah menerima program pengkaderan ulama pada tahun sebelumnya.

FATWA PLURALISME DAN PLURALITAS AGAMA MUI (Majlis Ulama Indonesia) DALAM PERSPEKTIF TOKOH ISLAM CIREBON

❖ Ilman Nafi'a
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Pluralisme agama di haramkan oleh MUI, karena dianggap upaya pencamur-adukan berbagai agama dalam satu paham. Dan Pemaknaan terhadap pluralisme dan Pluralitas keagamaan nampaknya menjadi salah satu persoalan pro dan kontra terhadap fatwa MUI tentang "keharaman" pluralisme agama, termasuk di kalangan tokoh Islam di Cirebon, baik dari Kyai-Kyai Pesantren ataupun akademisi. Hasil dari wawancara dengan tokoh-tokoh Islam tersebut, baik yang merasa mengetahui ataupun tidak mengetahui tentang terminologi "pluralisme dan pluralitas agama", mereka cenderung tidak bisa membedakan antara kedua term tersebut. Dalam pemahaman tokoh-tokoh Islam "kedua istilah" tersebut bermuara pada pemaknaan yang cenderung sama yaitu penghormatan terhadap keragaman dan keperbedaan. Jadi, meskipun mereka juga pro dan kontra terhadap pluralisme, tetapi mereka sepakat untuk menghormati keragaman agama yang ada di Cirebon khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: *Pluralisme, pluralitas dan fatwa.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ada satu hal menarik dari hasil survey yang diperoleh oleh The Wahid Institut (2009). Institusi ini menemukan suatu fakta akan adanya peningkatan fantastik pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, berpendapat dan berekpresi di Indonesia, yang pada tahun 2007 berjumlah 137 kasus, kini meningkat menjadi 232 kasus sepanjang tahun 2008. Yang menarik dari eskalasi ini adalah diperolehnya survey, bahwa pelanggar terbesar dalam konteks ini berada di tangan Negara dan MUI, selain milisi sipil.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dan dalam hal apa MUI memiliki kemungkinan untuk memiliki andil dalam pelanggaran tersebut. Meresponi pertanyaan ini tentu saja memerlukan kejelian dan penelusuran akademik untuk mengungkap fenomena tersebut. Disinilah penelitian ini, menurut hemat penulis, memiliki signifikansinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia yang terbentuk dalam rangka mengnaungi dan mengakomodir berbagai kegelisahan umat Islam Indonesia, terkait dengan ketentuan hukum suatu masalah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksanggupan semua orang memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi "ajaran agama". Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, dan fatwa MUI merupakan salah satu solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Dalam berbagai kasus keagamaan belakangan ini, beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seringkali menuai kontroversi. Pro dan kontra terhadap eksistensi fatwa tampak menyelimuti berbagai perdebatan seputar kecenderungan MUI pada penguatan agenda-agenda Islamist. Fatwa MUI oleh sebagian golongan dinilai alih-alih akan menghadirkan solusi ataupun kemaslahatan bagi

umat, malah sebaliknya ia malah membuat masyarakat Indonesia merasa terbebani dengan hadirnya fatwa tersebut, dan yang sangat ironis, menjadi pemicu tindakan anarkhis dengan justifikasi fatwa tersebut.

Salah satu fatwa MUI yang diangap kontraversial dan dianggap mengkhawatirkan keselamatan bangsa adalah fatwa tentang pluralisme dan pluralitas agama. Fatwa ini dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk "ketidakpahaman" MUI dalam memahami persoalan dan wacana pluralisme yang dipahami komponen masyarakat lain. Bahkan dalam pandangan yang lain, MUI dianggap tidak memahami "taklif" dalam terminologi hukum Islam, karena "taklif" hanya dikenakan kepada manusia, tidak pada "pemikiran". Diantara kelompok yang kontra adalah lembaga Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jaringan Islam Liberal (JIL), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan berbagai institiusi lain yang bergerak di bidang penegakan HAM, pluralisme, dan kebebasan berpendapat.

Berbeda dengan kelompok di atas, bagi Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan berbagai ormas Islam militan lainnya, berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI adalah bentuk final hukum Islam yang ditetapkan oleh orang-orang yang kompeten dengan dalil yang *sahih* serta dikeluarkan melalui forum tertinggi para ulama seluruh Indonesia. Fatwa pluralisme dan pluralitas agama MUI adalah sebuah bentuk kepedulian kaum ulama terhadap berbagai problematika keagamaan yang dipandang telah keluar dari idealitas Islam yang sesungguhnya. Pluralisme bagi mereka dianggap telah merusak dan mengancam ajaran Islam, sehingga fatwa MUI ni sangatlah urgen demi menjaga kemurnian ajaran Islam dari rongrongan berbagai pihak yang terus berupaya melakukan pendangkalan atas aqidah Islam,"

Fatwa ini menjadi pro dan kontra di masyarakat luas, khususnya mereka yang berlatarbelakang pendidikan agama saja

atau pemuka agama dengan kalangan akademisi, bahkan kontraversi fatwa sudah menjadi perbincangan nasional dan internasional, termasuk di wilayah Cirebon yang penduduknya mempunyai kemajemukan suku, agama, budaya, bahasa dan lainnya. Dengan latar belakang yang berbeda dan bervariasi, tokoh-tokoh agama Islam baik yang hanya berasal dari pesantren ataupun dari perguruan tinggi juga dipastikan mempunyai keperbedaan pendapat tentang keberadaan fatwa tersebut.

Meresponi berbagai pro dan kontra seputar fatwa pluralisme dan pluralitas agama MUI diatas, perlu kajian ulang atas fatwa MUI dimaksud. Kajian ini penting untuk dikedepankan untuk melihat sejauhmana fatwa tersebut berdampak luas terhadap aksi-aksi ormas Islam secara khusus dan masyarakat luas secara umum dalam menyikapi perbedaan, keragaman pandangan serta keyakinan keagamaan dalam masyarakat, sehingga diharapkan tercipta atmosfir yang kondusif dalam memaknai sebuah perbedaan, dan meminimalisisr timbulnya anarkhisme berbasiskan agama.

B. RUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif tokoh Islam Cirebon atas pluralisme dan pluralitas keagamaan, terkait dengan berbagai fatwa haram yang akhir-akhir ini seringkali digulirkan oleh Majlis Ulama Islam (MUI). Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah eksistensi suatu fatwa dalam tradisi hukum Islam?
2. Bagaimanakah metodologi perumusan fatwa MUI tentang berbagai persoalan sosial keagamaan masyarakat Indonesia?
3. Bagaimanakah pandangan tokoh Islam Cirebon terhadap fatwa pluralisme MUI?

C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah mengupayakan suatu eksplorasi yang utuh tentang :

1. Eksistensi suatu fatwa dalam tradisi hukum Islam
2. Metodologi perumusan fatwa MUI tentang berbagai permasalahan sosial keagamaan masyarakat Indonesia
3. Perspektif tokoh Islam Cirebon terhadap fatwa haram MUI

Secara akademik, kajian tentang "Pluralitas pemikiran dan Keagamaan dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon (Studi Kritis atas Fatwa Haram MUI)" adalah suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka pengayaan ilmiah dalam kajian hukum Islam (Syari'ah) dan HAM, dimana kajian ini diharapkan mampu memberikan nuansa pencerahan bagi pencetus fatwa, MUI khususnya, untuk mempertimbangkan dampak dari fatwa yang dikeluarkannya, sehingga dapat meminimalisir timbulnya tindakan-tindakan kekerasan berbasiskan agama dalam masyarakat. Disamping itu, kajian ini dapat digunakan sebagai media pencerahan bagi masyarakat pada umumnya akan eksistensi sebuah fatwa dalam hukum Islam sebagai sebuah produk hukum yang tidak mengikat *(ghair mulzim)*, sehingga mereka cerdas dalam memaknai sebuah fatwa dan tidak menelannya mentah-mentah sebagai justifikasi hukum Islam yang absolut.

D. KAJIAN PUSTAKA

Umdah El-Baroroh dalam penelitiannya tentang "Pengaruh Fatwa MUI terhadap Arus Radikalisme Islam Di Indonesia" (2005) menunjukan hubungan yang signifikan antara Fatwa MUI dengan tindak kriminalitas yang berlandaskan doktrin agama. Tingginya angka-angka kekerasan, menurutnya, mempunyai hubungan dengan meluncurnya fatwa Mui baik pada tingkat lokal daerah maupun tingkat nasional, MUI pusat. Masyarakat yang tidak memahami eksistensi fatwa, menjadikan fatwa sebagai sebuah keputusan final agama yang dianutnya dan harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karenanya, siapapun yang bertentangan dengan fatwa yang dianggap suci tersebut harus ditindak dan

diluruskan, meskipun melalui tindak kekerasan. Realitas ini dikuatkan oleh para pendukung agenda Islamis yang cenderung mengamini tindak-tindak kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Penelitian Ahmad Subakir dkk (2008) menunjukan kedekatan para ulama MUI dengan gagasan gerakan Islamist di Indonesia. Indikatornya terlihat dari dukungan organisasi-organisasi radikal Islam seperti Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) Syarikat Islam, Al Irsyad dll. Terhadap eksistensi da implementasi fatwa MUI di Indonesia.

Zusiana Elly Triantini (2007) dalam "Menimbang fatwa MUI," melihat perlunya kehati-hatian bagi para ulama di MUI dalam mengeluarkan sebuah fatwa, baik secara individual maupun organisasi. Pengeluaran fatwa tidak hanya memerlukan ilmu yang memadai tentang al-Qur'an dan hadis, tetapi juga tentang sejarah, konteks dan bahasa zaman. Karena itu fatwa harus menghadirkan kemasalahatan bagi umat, bukan sebaliknya melahirkan kontroversi dan membuat umat merasa terbebani dengan hadirnya fatwa tersebut. Selain itu, fatwa harus diiringi dengan memberikan solusi bagi umat bukan hanya justifikasi hukum yang seolah mengikat seperti yang banyak terjadi saat ini.

Berbagai penelitian diatas dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian ini, namun tidak dijadikan acuan kongkrit, karena wilayah kajian yang tumbuh di lingkungan sosial dan budaya yang berbeda diasumsikan akan memiliki pola dan warna yang berbeda pula.

E. KERANGKA TEORI

Mahsun Fuad dalam bukunya "*Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*" (2005) menyatakan, bahwa hukum Islam bersifat Universal, mencakup semua objek (manusia) secara menyeluruh, tanpa memandang golongan, kasta, bangsa,

warna, dan wilayah/daerah, serta tidak dibatasi lautan ataupun suatu aturan negara. Dengan ke-universalan Agama Islam, membuat hukum yang dilahirkannya juga bersifat universal tanpa ada batasan untuk menghalangi sebagian dari sebagian yang lain. Dengan demikian, Hukum Islam harus mampu memberikan solusi dan alternatif sebagai jalan keluar untuk keluar dari berbagai permasalahan dan problematika kehidupan manusia di dunia. Hukum Islam juga harus mampu memberikan pandangan dengan cara penerapannya terhadap objek yang dijadikan sasaran dan subjeknya yang menjalani aturan tersebut, dengan tidak berpihak terhadap sebagian dari bagian yang lain.

Lebih lanjut, menurut atho Mudzhar (1993), hukum Islam dengan kedua sumbernya, al-Quran dan al-Sunah, tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural. Dengan adanya multi kultur ini mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan persoalan secara komplek serta menantang untuk diperbincangkan sehinggga dalam pengambilan solusi pemecahannya pun (baca: fatwa) harus pula mempertimbangkan keragaman serta memperhatikan kemudharatan dan kemaslahatannya. Begitupula dengan kehadiran sebuah fatwa sehingga tidak menimbulkan ekses yang negatif dalam implementasinya di masyarakat.

Dalam konteks ini, Azyumardi Azra (2005) mengkitik metodologi yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya, dalam menyusun sebuah fatwa, MUI seyogyanya meminta pendapat orang-orang yang pakar di bidang yang difatwakan dan harus melihat konteks kapan fatwa itu harus digulirkan. Dengan begitu, fatwa bisa diterima oleh seluruh masyarakat baik Islam maupun non muslim. Senada dengan preposisi di atas, Abdul Muqsith (2009) menyatakan, bahwa jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan teknis-intelektual untuk menganalisa dalil-dalil normatif dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis sosial-ekonomi-politik pula. Lebih lanjut, menurut Atho mudzhar (2005), agar fatwa MUI tidak lagi menimbulkan konflik di masa-masa mendatang, maka MUI melalui fatwanya harus meletakkan konflik maupun perdebatan soal kepercayaan ini dalam wadah dialog

emansipatoris.

Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah* mengatakan, bahwa tujuan hukum Islam itu sendiri terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan dalam pemikiran al-Syatibi ini pun mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al-Kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah; 1) *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini 2) *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama 3) *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup. 4) *Hifdz al-mal*, menjamin pemilikan harta dan properti. Dan ke-5) *Hifdz al-nasl wal-'irdl*, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi. Karena itu, menurut Musdah Mulia (2005), "jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial".

E. METODOLOGI PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi secara kritis fatwa haram MUI dalam pluralitas pemikiran dan keagmaan melalui perspektif tokoh Islam di Cirebon, maka jenis penelitian ini adalah d*escriptive and exploratif research* yang dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah pandangan tokoh Islam Cirebon (Kota dan Kabupaten) terkait dengan fatwa haram MUI tentang berbagai kasus sosial keagamaan di Indonesia. Pembacaan akan fatwa tersebut dapat terlihat melalui penelusuran butir-butir fatwa resmi yang telah dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI ataupun paparan eksplanatif dari tokoh-tokoh fungsionaris MUI sebagai data primer. Sementara data sekunder berupa literatur-literatur umum yang mengkaji wacana hukum Islam secara umum dan secara khusus mengenai kedudukan dan perkembangan fatwa MUI terkait dengan fenomena radikalisme Islam di Indonesia.

Adapun yang menjadi Instrumen dalam penelitian ini

adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain, pengumpulan data tergantung pada peneliti sebagai alat pengumpul data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik; dokumentasi, observasi dan interview. Dokumentasi dilakukan dalam rangka menemukan data tentang hasil MUNAS MUI dan berbagai fatwa yang telah digulirkan, termasuk perdebatan dan respon para tokoh Muslim Cirebon akan fatwa tersebut. Sedang observasi partisipan dilakukan guna mengumpulkan data tentang metodologi perumusan fatwa, termasuk faktor-faktor sosial, politik dan kultural yang melatarbelakangi lahirnya sebuah fatwa. Sementara interview dilakukan dalam rangka mengklarifikasi temuan yang terkait dengan respon tokoh Islam Cirebon atas fatwa haram MUI tentang berbagai permasalahan sosial kegamaan masyarakat Indonesia. Dengan interview ini diharapkan ada proses analisa dialektis yang dinamis antara data-data yang sudah tertulis dengan gagasan-gagasan baru yang mungkin belum terekam dalam sebuah dokumen tertulis.

Selama mengumpulkan data penelitian, penulis selalu membuat catatan lapangan yang meliputi catatan deskriptif/ reflektif/kritis. Kegiatan ini merupakan kegiatan sentral dalam seluruh siklus penelitian dan sekaligus menunjukan bahwa perolehan data selalu diiringi dengan kegiatan analisis data. Adapun teknisnya, data yang telah terkumpul akan dikoding dan ditranskipkan secara verbatim dari hasil wawancara untuk kemudian dibuat kategori-kategori temuan untuk dianalisis, sehingga dalam analisis data nantinya sekaligus dilakukan interpretasi terhadap pernyataan-pernyataan langsung dari informan yang ada.

F. PEMBAHASAN

a. Fatwa Dalam Kajian Hukum Islam

Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab: *al-fatwa,* yang merupakan bentuk *masdar fata, yaftu, fatwan* yang artinya muda, baru, atau penjelasan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa fatwa bersal dari kata *al-fatwa* atau *al-futya* yang artinya jawaban terhadap suatu persoalan. Secara terminologi, fatwa adalah

penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok (Ma'ruf Amin, 19: 2007). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, Al-fatwa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan redaksi yang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna, ulama lain sebagaimana dikutip Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa fatwa adalah "*tabyin al-Hukm al-Syari'y li al-Sail 'anhu bila ilzamin*" penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan orang atau kelompok yang tidak mengikat (Ma'ruf Amin, 20:2007). Pihak yang meminta fatwa tesebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminita fatwa disebut *al-mustafti*.

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam sengaja didesain untuk menjelaskan persoalan-persoalan secara global. Sementara, untuk merinci dan memberikan petunjuk pelaksanaan suatu ajaran (hukum), inilah tugas Rasulullah untuk menjelaskannya dengan ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang kemudian kita sebut sebagai Hadits atau Sunnah Nabi. Namun, persoalan yang dijelaskan Nabi kebanyakan hanya terkait bidang ibadah. Sementara, dalam bidang muamalah, pada umumnya, Nabi tidak banyak memberikan rincian yang bersifat aplikatif, karena bidang muamalah senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di samping juga dipengaruhi adat istiadat setempat. Maka, untuk mengantisipasi perubahan itu, Allah telah memberikan sarana yang memungkinkan umat manusia untuk terus menjalankan ajaran Islam, melalui sebuah proses bernama *ijtihad.*

Ijtihad adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Hadits untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ijtihad ini menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum tercakup secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits.

Karenanya, diperlukan persyaratan yang ekstra ketat bagi seseorang (ulama) untuk melakukan ijtihad (menjadi mujtahid), dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat para mujtahid.

KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa salah satu pranata yang disiapkan agama bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab persoalan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan tentang status hukum suatu masalah atau perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya. Status hukum inilah yang dimaksudkan sebagai fatwa. Fatwa sangat dibutuhkan umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faro'idl*), batasan-batasan (*hudud*) serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu (Ma'ruf Amin,8:2007). Berbagai persoalan baru yang muncul, menuntut setiap orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang hukum Islam untuk mengeluarkan fatwa sebagai upaya memberikan rasa ketenangan dan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan suatu perbuatan yang status hukumnya belum jelas.

Menurut Ma'ruf Amin kemudian saat ini, jarang sekali ditemukan fatwa yang dilakukan perseorangan karena mengingat banyaknya persoalan yang muncul tidak mungkin bisa diselesaikan seorang saja. Selain memang, seperti disebutkan di atas, persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid sangatlah berat. Maka, melalui sebuah lembaga yang kompeten, para ahli agama Islam akan saling bahu-membahu dalam menentukan hukum atas persoalan yang berkembang di masyarakat dan butuh segera untuk dicarikan jawaban dan solusinya(Ma'ruf Amin, 8:2007). Fatwa mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat. Sungguh pun demikian, fatwa menjadi bahan pertimbangan penting bagi umat Islam di mana pun berada. Berbagai penelitian menunjukkan, di Indonesia fatwa mempunyai peran penting dalam memengaruhi pilihan dan sikap masyarakat atas berbagai persoalan yang sedang terjadi. Di beberapa negara Islam, fatwa resmi yang dikeluarkan

pemerintah malah bersifat mengikat dan ada sanksi hukumnya.

KH Ma'ruf Amin (21:2007) yang kini menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus yang membidangi masalah fatwa dan hukum Islam mennjelaskan 5 hal atau rukun yang berkaitan dengan proses dikeluarkannya fatwa yakni *al-ifta* atau kegiatan menerangkan hukum sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, *mustafti* atau individu atau kelompok yang meminta fatwa, *mufti* atau orang dan istitusi yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, *mustafti fihi* atau masalah yang dipertanyakan dan ingin dicarikan status hukumnya, dan fatwa itu sendiri sebagai jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan. Kelima hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penetapan fatwa.

Fatwa tidak bisa dikeluarkan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yang telah disepakati ulama, yang kedudkanya menempati posisi penting dalam hukum Islam karena statusnya sama dengan hasil ijtihad, untuk itu dalam menetapkan fatwa, KH Ma'ruf Amin (45:2007) menyebutkan tiga metode utama dalam berfatwa, yakni metode bayani, *ta'lili,* dan *istishlahi*. Metode bayani terkait analisis kebahasaan. Dalam hal ini, para mufti diharuskan mengerti gramatikal dan berbagai kaidah dan seluk-beluk bahasa Arab. Metode ta'lili terkait dengan proses *intinbat* atau pengeluaran hukum dari sumber utamanya. Ini terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak secara tegas dijelaskan dari dua sumber hukum utama itu, tetapi secara tersirat telah dijelaskan. Metode *istishlahi* terkait dengan penarikan kaidah umum dari ayat dan hadits untuk kemudian diterapkan dalam kasus yang tidak mungkin diterangkan secara rinci dalam dua sumber hukum Islam tersebut, misal, hukum membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Yang terakhir ini harus bersandar pada aspek mendatangkan manfaat (*jalbul manfaat*) dan menolak kerusakan (*dar'ul mafasid*).

Dengan metode apa pun, fatwa, selain harus tetap mengacu pada dua sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadits, juga harus mengacu pada dua sumber hukum Islam lainnya yang telah disepakati para ulama, yakni *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum pada suatu masa.

Qiyas adalah menyandingkan masalah yang telah diketahui hukumnya dari Al-Quran dan Hadits dan masalah yang belum diketahui hukumnya atas dasar persamaan *'illat* atau penyebab hukumnya

Fatwa adalah penjelasan hukum Islam atas suatu persoalan yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan bagian dari term hukum Islam yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, maka, kaedah pengambilan fatwa tidak berbeda dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang muftiy sama kedudukannya dengan seorang mujtahid.

b. Methodologi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-Nushush al-Syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan methodologi termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li*

maqashid as-syari'ah), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*). Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*al-Nushus al-Syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-Mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-Syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrithi*). Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *Nash Qath'i*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji* (Ma'ruf Amin, 268: 2007). Pendekatan *Nash Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit

untuk dilaksanakan (*ta'assur atau ta'adzdzur al-'amal atau shu'ubah al-'amal*) , atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash qoth'i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan istinbathi. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan. Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub*

al-mu'tabarah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu'tabarah. Sedangkan metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzari'ah*. Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

Fatwa merupakan salah satu hasil ijtihad para mujtahid sebagai jawaban atas permintaan seseorang, komunitas atau lembaga yang memintanya memberikan nasihat hukum agama yang diharapkan dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai masalahnya. Jadi kedudukan fatwa dalam hukum Islam sama dengan kedudukan ijtihad sendiri, yaitu tidak mengikat semua orang, begitu pula kedudukan fatwa MUI bagi masyarakat Indonesia yaitu tidak mengikat secara pribadi atau kolektif. Seorang mufti dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yakni (1) orang tersebut harus memahami bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur'an dengan sempurna dari segala seginya, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'an dan mengetahui secara tepat cara-cara pengambilan hukum (*istinbath al-hukmi*) dari ayat-ayat tersebut. Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dikeluarkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan suatu usaha yang masksimal pada ahli untuk mengambil atau meng-istinbath-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh

para mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa. Secara umum, fatwa yang dikeluarkan MUI ini adalah persoalan-persoalan yang ada masa sekarang ini yang mana dahulu tidak ada dengan mencari sumber-sumber hukum dengan metode ushul fiqh yang sudah ditetapkan keilmuannya. Secara etimologis, Fatwa adalah jawaban atas suatu kejadian dan untuk melakukan itu sumber utamanya adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Disinilah peran seorang mujtahid MUI memberikan jawaban atas persoalan dengan tidak keluar dari nilai-nilai yang ada dalam dua sumber tersebut. Ada dua faktor dalam mujtahid untuk ijtihad suatu persoalan sehingga menghasilkan klasifikasi fatwa, yaitu: Pertama adalah ijtithad yang menghasilkan fatwa untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya dengan pertimbangan adanya perkembangan zaman sehingga masalahpun akan selalu berbeda sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum. Kedua adalah ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum dengan prinsip bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga akan mencari pembenaran secara 'illat terhadap berbagai kasus dengan prinsip ushuliyah seperti ulama jaman dulu.

Fatwa MUI merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'*) yaitu fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk, yang dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang dianut bangsa.

c. **Fatwa Pluralisme MUI dalam Pandangan Tokoh Islam Cirebon**

Cirebon adalah kota mandiri terbesar ke-2 di Provinsi Jawa Barat, setelah ibu kota Jawa barat, yakni Bandung. Kota ini berada di pesisir Laut Jawa, di jalur pantura (pantai utara). Jalur pantura

Jakarta-Cirebon-Semarang merupakan jalur terpadat di Indonesia. Kota Cirebon juga merupakan kota terbesar ke-4 di wilayah pantura setelah Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Karena letaknya yang sangat strategis, yakni di persimpangan antara Jakarta, Bandung, dan Semarang, juga sebagai pusat kota di antara beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat, Cirebon tidak hanya dihuni oleh berbagai komunitas dari berbagai latar belakang; agama, suku, budaya dan lainnya di sekitar Jawa Barat, tapi juga menjadi tujuan berbagai kalangan dengan berbagai kepentingannya. Cirebon adalah wajah kota yang multikultural dengan berbagai keragaman dan keperbedaan agama, bangsa, suku, bahasa, budaya, aliran dan lainnya. Dalam catatan sejarah, Cirebon memiliki simbol-simbol budaya seperti "Paksi Naga Liman" artinya rajawali (dunia Islam), naga (China) dan liman (gajah), simbol ini menunjukan adanya akulturasi budaya yang kuat di Cirebon antara dunia Islam, China dan India. Simbol lain yang menjadi identitas budaya Cirebon adalah "megamendung" yang merupakan produk akulturasi budaya Islam dan China. Dan simbol ini juga menunjukan adanya pluralitas dalam sejarah keberaadan Cirebon. Dalam catatan sejarahnya pluralisme dan pluralitas agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Cirebon.

Pemaknaan terhadap pluralisme dan Pluralitas keagamaan nampaknya menjadi salah satu persoalan pro dan kontra terhadap fatwa MUI tentang "keharaman" pluralisme agama, termasuk di kalangan tokoh Islam di Cirebon, baik dari Kyai-Kyai Pesantren ataupun akademisi. Hasil dari wawancara dengan tokoh-tokoh Islam tersebut, baik yang merasa mengetahui ataupun tidak mengetahui tentang terminologi "pluralisme dan pluralitas agama", mereka cenderung tidak bisa membedakan antara kedua term tersebut. Dalam pemahaman tokoh-tokoh Islam "kedua istilah" tersebut bermuara pada pemaknaan yang cenderung sama yaitu penghormatan terhadap keragaman dan keperbedaan. Jadi, meskipun mereka juga pro dan kontra terhadap pluralisme, tetapi mereka sepakat untuk menghormati keragaman agama yang ada di Cirebon khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka

dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme adalah dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula; sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidak-tidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar dan sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. (www.id.wikipedia.org).

Menurut Dawam Rahardjo, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, baik negara ataupun MUI tidak berhak menyatakan bahwa agama yang satu benar dan agama yang lain salah, atau "sesat menyesatkan" seperti yang dituduhkan kepada Ahmadiyah dan lainnya. Bagi dia, semua agama harus "dianggap" benar, tetapi benar menurut keyakinan pemeluk agama masing-masing. Menurutnya, pandangan ini merupakan landasan keadilan, persamaan hak dan kerukunan antarumat beragama (M. Syafii Anwar, 185: 2007). Sementara Syafii Anwar menjelaskan bahwa pluralisme adalah sistem nilai yang mengharagai pluralitas (kemajemukan). (M. Syafii Anwar, 186: 2007).

KH. M. Haerudin salah seorang Kyai muda Babakan Ciwaringin, Cirebon menyatakan bahwa ketika kita berbicara masalah pluralisme agama harus melihat konteks keindonesian,

[1] Wawancara Desember 2010 di Pesantren Raudlat al-Thalibin, Babakan Ciwaringin, Cirebon
[2] Wawancara Desember 2010 di Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon
[3] Wawancara Desember 2010 di Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon

dimana indonesia sebagai bangsa yang beragam agama, budaya, suku dan sebaginya yang merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya dalam Plurlisme agama kita harus mendudukkan agama dalam konteks kebangsaan, dimana setiap agama mempunyai kebenaran, tidak pandang itu islam, kristen atau budha. Dalam pandangan kyai muda ini, pandangan di atas tidak berarti bahwa semua agama itu sama, tetapi setiap agama mengajarkan kedamaian, kebenaran. Menurutnya, inilah inti pokok dari pluralisme agama[1].

Sementara, Kyai sepuh Babakan Ciwaringin yaitu K.H. Makhtum Hanan menolak adanya pluralisme agama. Menurutnya sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an berbunyi *Inna al-Dina inda Allah al-Islam* yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi disisi allah hanya islam, terlihat jelas disini bahwa hanya agama islam lah yang paling benar. Tetapi menurut beliau, kita juga harus menghormati dan menghargai agama lain dalam konteks muamalah[2]. Pandangan senada diungkapkan oleh KH. Nurhadi yang juga dari Babakan Ciwaringin. Kyai ini tidak membenarkan pluralisme agama, dengan alasan yang sama dengan Kyai Makhtum Hanan, Kyai Nurhadi berargumentasi karena ada ayat *Inna al-Dina inda Allah al-Islam*. Menurutnya, jika ada yang benar berarti yang lainnya salah, dalam hal ini Islamlah yang paling benar berarti yang lainnnya salah. Dalam pandangannya, pluralisme bukanlah suatu paham tetapi hanya keberagaman agama. Kalau dalam konteks ini, menurutnya semua penganut agama harus saling menghormati yang lain. Namun menurut Kyai Nurhadi, yang lebih ditekankan adalah masalah aqidah dan keyakinan tidak boleh di campur adukkan karena mempunyai aturan sendiri[3].

Salah satu Kyai Muda KH. Wawan Arwani dari Buntet Pesantren menyatakan bahwa pluralitas itu niscaya, tetpai kalau menjadi isme akan muncul persoalan. Menurutnya, kalau menjadi isme, mau tidak mau akan ada pro dan kontra. Menurutnya semua agama mengajarkan kebenaran, keselamatan, kebaikan . Semua agama pun mengajarkan dan menjamin keselamatan bagi semua penganutnya. Menurutnya inilah kebenaran universal dalam keberagaman agama[4]. Pendapat senada dijelaskan oleh Dr.H.

[4] Wawancara Desember 2010 di Pesantren Buntet Pesantren, Cirebon
[5] Wawancara Desember 2010 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

Farihin Nur, M.Pd akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Cirebon, bahwa pluralisme agama bagian dari realitas kehidupan manusia yang telah ditetapkan Allah (*sunatullah*), manusia tidak bisa hidup sendirian, tetapi harus berinteraksi dengan yang lain, untuk itu saling menghormati satu dengan yang lain menjadi sebuah keniscayaan[5].

KH. Harits dari Babakan Ciwaringin menyatan bahwa pengertian pluralisme agama perlu ditata ulang, karena menurutnya pengertian pluralisme sekarang mengandung polemik. Menurutnya pengertian pluralisme harus berangkat dari Al-Qur-an dan Al-Hadits. Senada dengan Kyai Harits, Prof. Dr. Cecep Sumarna, M.Ag menjelaskan bahwa pemahaman pluralisme dianggap bermasalah, namun beliau menyatakan bahwa apapun dari bentuk pengertian pluralisme, makna yang terkandung adalah saling menghaormati satu dengan yang lain. Menurutnya inilah taqdir dari Allah. Sementara menurut **KH. Yahya Zainal Ma'arif atau yang dikenal dengan Buya Yahya, Pengasuh Majlis al-Bahjah** di Media Dakwah online Buya Yahya, menjelaskan bahwa Pluralisme sering di artikan oleh penyerunya sebagai sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat mejemuk disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan kemajemukan sebagai sesuatu yang bernilai positif, dan merupakan rahmat Allah kepada bangsa menusia . Pluralisme tidak sekedar menyadari akan kemajemukan. Akan tetapi lebih dari itu harus ada keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut . Seorang pluralis adalah orang yang menyadari kemajemukan sebagai sesuatu yang positif sekaligus dapat berinteraksi aktif dalam lingkungan kemajemukan .Jika demikian adanya maka pluralisme adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* . Bahkan jika benar begitu makna pluralisme maka ia adalah sesuatu yang sangat asasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tetapi menurutnya sebenarnya ummat Islam tidak butuh dengan istilah pluralisme sebab makna yang terkandung didalam Islam amat melampaui hakekat pluralisme

Dari berbagai pandangan dan pendapat hasil dari

wawancara dengan beberapa tokoh Islam dari kalangan Pesantren dan akademisi perguruan tinggi Islam, dapat dipahami bahwa mereka nampaknya memahami pluralisme dan pluralitas agama dalam dua kecenderungan; *pertama* bahwa pluralisme dan pluralitas agama berbeda, bahwa pluralisme agama dianggap sebagai pencampuradukan dan mempersamakan semua agama, sementara pluralitas adalah kemajemukan agama. Dengan pandangan ini, semua sepakat bahwa pluralisme bermasalah dan bertentangan dengan ajaran Islam, sementara pluralitas agama dianggap sebagai realitas. *Kedua*, pandangan yang menganggap pluralisme dan pluralitas agama mempunyai pemahaman dan pengertian yang sama, yaitu pengakuan atas kemajemukan atau keragaman agama. Dengan pemahaman ini, mereka mengnggap pluralisme tidak bermasalah dan dianggap sebagai sebuah keniscayaan.

Pemaknaan pluralisme agama yang digunakan MUI nampaknya dijadikan sebagai "satu-satunya" pengertian yang berakibat pada keluarnya fatwa haram terhadapnya. Jadi sebenarnya, yang diharamkan MUI adalah "pendapat MUI" tentang pluralisme agama, bukan pendapat-pendapat pluarlisme agama lainnya, seperti yang dijelaskan M. Syafii Anwar (M. Syafii Anwar, 186: 2007) bahwa pluralisme adalah sistem nilai yang mengharagai pluralitas (kemajemukan). Sementara yang lain menjelaskan bahwa Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula; sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidak-tidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar dan sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. (www.id.wikipedia.org).

Penerbitan fatwa haram atas pluralisme agama oleh MUI mendapat reaksi pro dan kontra, bukan hanya tentang pendefinisiannya, caranya, tetapi juga menyangkut kedudukan

fatwa itu sendiri bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di kalangan tokoh-tokoh Cirebon. Kyai M. Haerudin Babakan Ciwaringin menyarankan bahwa fatwa MUI harus dikaji Ulang dan didiskusikan lebih lanjut, menurutnya pemaknaan Pluralisme agama di Indonesia seharusnya dalam konteks kebangsaan. Kyai Makhtum Hanan menjelaskan bahwa fatwa MUI harus diikuti oleh umat Islam di Indonesia, karena MUI menurutnya lembaga atau majlis ulama yang harus diikuti oleh semua umat islam di indonesia, sebagai representasi dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Senada dengan pendapat ini, Kyai Nurhadi menyatakan bahwa fatwa MUI mengikat umat Islam di Indonesia. Kyai Harist juga sepakat bahwa fatwa MUI mengikat umat Islam di Indonesia. Hal ini menurutnya untuk menghindari konflik dan disintegrasi bangsa.

Sementara Kyai yang lain, seperti Kyai Wawan Arwani, dari Buntet Pesantren menjelaskan bahwa fatwa MUI tidak mengikat, karena menurutnya kalau mengikat berarti tidak menghargai perbedaan pendapat, dan itu cenderung akan menjadi agama sendiri. Pendapat senada disampaikan juga oleh Kyai Babas Fuad Hasyim Buntet Pesantren yang menyatakan bahawa fatwa MUI tidak mengikat, karena dalam konteks Indonesia, fatwa MUI bukan merupakan bagian dari unsur-unsur perundang-undangan (UU), atau lembaga yang mempunyai kewenangan menerbitkan UU, seperti Presiden, menteri, gubernur atau lainnya. Bahkan menurutnya, fatwa MUI di Indonesia "seperti" bukan fatwa. Akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof.Dr. Cecep Sumarna, M.Ag juga sependapat bahwa fatwa MUI tidak mengikat karena fatwa MUI bukan merupakan bagian dari hukum positif negara. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh DR. Farihin, M.Pd yang menyatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat, tetapi tetap penting untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu dalam menentukan kebijakannya.

Dari berbagai pendapat tentang kedudukan fatwa MUI bagi umat Islam di Indonesia, tokoh-tokoh Cirebon juga merespon bervariasi antara mengikat dan tidak mengikat, Para tokoh yang berpendapat bahwa fatwa MUI itu mengikat adalah Kyai-kyai

yang sudah sepuh yang diduga kuat mempunyai hubungan erat dengan struktur di MUI dan Kyai-kyai yang kurang berinteraksi dengan sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan modern. Sementara tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat adalah kyai-kyai muda dan akademisi, yang diduga kuat masih mempunyai aktifitas intelektual dan pencarian informasi yang lebih luas tidak sekedar informasi dari satu pihak yang setuju dengan pendapat bahwa fatwa MUI itu mengikat umat Islam di Indonesia.

d. Kesimpulan

Dari berbagai pandangan dan pendapat hasil dari wawancara dengan beberapa tokoh Islam dari kalangan Pesantren dan akademisi perguruan tinggi Islam di Cirebon, dapat disimpulkan bahwa mereka nampaknya memahami pluralisme dan pluralitas agama dalam dua kecenderungan; *pertama* bahwa pluralisme dan pluralitas agama berbeda, bahwa pluralisme agama dianggap sebagai pencampuradukan dan mempersamakan semua agama, sementara pluralitas adalah kemajemukan agama. Dengan pandangan ini, semua sepakat bahwa pluralisme bermasalah dan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sementara pluralitas agama dianggap sebagai realitas. *Kedua*, pandangan yang menganggap pluralisme dan pluralitas agama mempunyai pemahaman dan pengertian yang sama, yaitu pengakuan atas kemajemukan atau keragaman agama. Dengan pemahaman ini, mereka mengnggap pluralisme tidak bermasalah dan dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Keperbedaan pendapat ini menghasilan perbedaan pendapat juga tentang kedudukan fatwa MUI itu, antara yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia dan yang tidak mengikat. Kyai-kyai sepuh dan kyai-kyai yang mempunyai hubungan struktur dengan MUI cenderung berpendapat mengikat, sementara kyai-kyai muda dan akademisi berpendapat tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005).

Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.

Aliya Harb, *Relativitas Kebenaran Agama; Kritik dan Dialog*, Yogyakarta: IRCiSOd, 2001.

Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme Agama,* Jakarta: Perspektif, 2005.

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Azyumardi Azra, *Islam Substantif; Agar Umat tidak jadi Buih,* Bandung: Mizan, 2000.

Charles Churzman (editor), *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* Jakarta, 2003.

Dokumen fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/11/2005 tentang pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.

Karlina Helmanita, *Pluralisme dan Inklusivisme Islam di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN dan KAS Jakarta, 2003.

Khamami Zada, *Islam Radikal,* Bandung: Teraju, 2002.

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2001.

M. Amin Abdullah "*Al-Qur'an dan Pluralisme Agama*", Jurnal Khazanah, Vol. 1, No 6, Juli-Desember 2004.

M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam (Dalam Teori dan Praktek),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. IV, 2004.

M. Mukhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar; Pergulatan Islam Liberal versus Islam Literal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* Dar al-fikr, 1958.

Muhammad Legenhausen, *Satu Agama atau Banyak Agama; Kajian tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama*, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2002.

Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi*, Jakarta: Gugus Press, 2002.

Noer Rochmat "*Pluralisme, Wacana Al-Qur'an dan Keniscayaan bagi kehidupan bermasyarakat*" Jurnal Studi al-Qur'an, Volume II No. 1 Januari 2006.

Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Paragonatama Jaya, 1991.

Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal lebih jauh Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001.

Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh, Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad; Metode Penggalian Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.

FEMINISME DALAM PESANTREN: NARASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN BUNTET CIREBON

❖ Wardah Nuroniyah
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Superior laki-laki sebagai warisan budaya pra Islam belum sepenuhnya terkikis oleh referensi budaya islami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Sebab itu, pemahaman terhadap ajaran Islam harus disesuaikan dengan konteks sosiologis, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan untuk semua umat manusia, tanpa harus dibatasi oleh jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Secara umum, laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, khususnya dalam masalah reproduksi. Peran tersebut masih membatasi antara kapasitas laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren. Transformasi sosial yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan, di mana terefleksi perbedaan-perbedaan gender yang telah melahirkan ketidakadilan gender.

Kata kunci: *Feminisme, Pesantren, Pemberdayaan dan Perempuan*

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam Islam selalu menjadi pembicaraan dan diskursus yang menarik. Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa perspektif yang memandang dan menempatkan perempuan secara berbeda. Di antara ragam perspektif itu adalah ulama ortodoks dan konservatif yang menegaskan bahwa peranan perempuan dibatasi di lingkungan rumah saja. Tugas utama seorang perempuan yaitu menjaga suami dan anak-anaknya atau mengurusi rumah tangga. Dengan tugas seperti itu mengharuskan sang istri untuk selalu meminta izin atau kesediaan sang suami apabila akan pergi ke luar rumah.[1] Para ulama tersebut mendasarkan doktrin tentang perempuan itu berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-qur'an dan hadis.

Emansipasi perempuan yang sering didengungkan oleh kaum feminis sering terbentur pada rujukan ajaran Islam, yang memang sangat sedikit sekali membahas tentang emansipasi tersebut. Alasannya, bagaimanapun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kodrat. Dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya diperjelas oleh hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengatur ketentuan hukum waris dan penentuan shaf shalat.[2] Perihal kodrat ini pula yang sering menjadi rujukan masyarakat yang ada di pesantren, sehingga kajian gender menjadi sesuatu yang masih tabu di beberapa pesantren.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa diskursus mengenai perempuan di lingkungan pesantren menjadi persoalan yang eksklusif untuk disajikan di internal pesantren dan di muka publik. Berdasarkan penelitian terkait yang telah dilakukan seperti Zamakhsyari mengenai jumlah santri perempuan lebih besar daripada santri laki-laki yaitu 60% berbanding 40%.[3] Kemudian

---

[1] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan,* (terj.) Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 265. Lihat juga, Abdul Rahman Al-Sheha, *Woman in the Shade of Islam* (ttp.: Islamic Educational Center, 2000), h. 83.

[2] Jamhari dan Ismatu Ropi (ed.), *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 106.

[3] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 54.

Mujamil Qomar menyebutkan beberapa pesantren juga sudah memiliki lembaga dan program yang berorientasi perempuan seperti lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan rebana/ kasidah.[4] Abdurrahman Wahid menjelaskan tentang batasan perempuan dalam menunjukkan penampilannya (*fashion*-nya) atau dengan istilah yang lebih familiar dalam Islam yaitu aurat perempuan.[5] Beberapa penelitian tersebut tidak serta merta menjadi tajuk utama dalam *mainstream* penelitian yang berorientasi pada persoalan gender. Kajian tentang perempuan di pesantren cenderung masih normatif dan "tabu" untuk ditelusuri secara mendalam.

Perempuan dengan berbagai problematikanya dalam lingkungan pesantren merupakan sebuah cerminan "wajah" perempuan Islam Indonesia. Perdebatan antara laki-laki dan perempuan mengenai feminis sering menjadi topik yang sensitif sehingga tidak menutup kemungkinan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Sejalan dengan itu, peneliti tergerak untuk ikut mendalami dan menggerakkan emansipasi perempuan dalam lingkungan pesantren melalui penelitian tematik yaitu feminisme dalam pesantren. Lebih riilnya, peneliti terjun langsung pada salah satu pesantren di Cirebon yaitu pondok pesantren Buntet. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan perempuan di pondok pesantren Buntet Cirebon? 2) Bagaimana pengembangan nilai-nilai feminisme di pondok pesantren Buntet Cirebon? 3) Bagaimana pengaruh nilai-nilai feminisme terhadap doktrin dan tradisi pesantren di pondok pesantren Buntet Cirebon?

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memiliki kerangka berpikir yang berbentuk feminisme dalam bingkai penelitian perempuan dan pesantren. Teori-teori yang berkenaan dalam penelitian feminisme adalah

---

[4] Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 106.

[5] Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 27.

teori struktural-fungsional, teori sosial-konflik, teori feminisme liberal, teori feminisme marxis-sosialis, teori feminisme radikal, teori ekofeminisme, dan teori psikoanalisa. Dalam penelitian ini peneliti menentukan teori yang paling relevan adalan teori struktural-fungsional. Teori ini merupakan teori sosiologi yang sering digunakan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur dasar yang berguna untuk mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Tokoh dalam teori ini yang terkenal adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons. Teori ini mengakui adanya segala bentuk keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.[6] Contoh yang sangat terkait dalam penelitian ini adalah dalam pesantren terdapat seseorang yang menjadi pengasuh, pemimpin, sekretaris, bendahara, koordinator departemen, dan lain sebagainya. Adanya perbedaan fungsi dan bahkan perbedaan jenis kelamin bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pondok pesantren Buntet Cirebon, bukan karena kepentingan yang bersifat individual. Dalam penataan struktur dan fungsi pesantren ini sangat dipengaruhi oleh budaya, norma, dan nilai-nilai sosial yang telah berkembang dalam lingkungan pesantren tersebut.

Gambar 1.

Pola Pengelolaan Pesantren Berbasis Gender

[6] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi* Gender (Bandung: Mizan, 1999), Cet. I, h. 56.

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisis proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Maksudnya adalah pendekatan kualitatif penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.[7] Dengan pendekatan tersebut, peneliti mempunyai kewenangan luas untuk menginterpretasi berbagai fakta yang telah diperoleh.

Burns berpendapat bahwa pengungkapan suatu fenomena obyektif dalam penelitian kualitatif ini menekankan pada pentingnya "struktur makna ganda dan analisis holistik". Pandangan ini beranggapan tindakan yang merangkul sejumlah besar makna keterlibatan individu dalam konteks tertentu dan berhubungan dengan persepsi dan interpretasi seseorang terhadap realias yang terjadi di pesantren. Pemahaman ini menyatakan bahwa ilmu sosial adalah usaha subyektif, bukan obyektif, sebagai sarana untuk melihat dan memahami pengalaman seseorang dalam konteks tertentu. Pentingnya pengalaman subyektif ini adalah untuk menciptakan kesadaran individu, yang mengandung maksud bahwa penilaian terhadap kejadian adalah konstruksi pribadi dan subyektif dari peranannya di pesantren.

D. Temuan Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren Buntet Cirebon

Sejarah berdirinya pondok pesantren Buntet, dijelaskan bahwa pesantren ini didirikan oleh Kyai Muqayim pada tahun 1758. Pada awalnya, mbah Muqayim (sebutan untuk Kyai Muqayim bagi anak cucunya) membuka pengajian dasar-dasar Al-Qur'an, bagi masyarakat Desa Dawuan Sela (1 km ke sebelah Barat dari Desa Mertapada Kulon (lokasi pondok pesantren

[7] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 5.

Buntet sejak tahun 1750-an). Tempat berlangsungnya pengajian itu adalah sebuah *Panggung Bilik Bambu ilalang* yang di dalamnya terdapat beberapa kamar tidur atau pondokan yang dindingnya terbuat dari bambu dan atapnya terbuat dari pohon ilalang (sejenis rumput yang tinggi).

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti, mbah Muqayim adalah seorang pejuang yang selama hidupnya selalu dikejar-kejar tentara Belanda sehingga ia selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain dalam upaya mencari perlindungan hingga ia menemukan "daerah aman" dari kejaran tentara Belanda. Sehingga ia menemukan sebuah daerah, dan di situlah mendirikan sebuah bangunan untuk "tempat berlindung" dari kejaran tentara Belanda. Bangunan yang yang berukuran 8 x 12 M itulah di kemudian hari dikenal dengan sebutan "Buntet" yang berarti tempat perlindungan. Di dalam "Buntet" itu, mbah Muqayim membuat mushalla yang berfungsi sebagai tempat shalat dan pendidikan keagamaan tersebut bertempat di suatu daerah yang kemudian terkenal sebagai daerah Buntet. Namun, tidak lama kemudian tempat persembunyian itu ditemukan lagi oleh tentara Belanda sehingga tempat itu dibakar. Mbah Muqayyim bersama beberapa santrinya berhasil meloloskan diri, pergi menuju ke arah timur untuk beberapa saat, kemudian beliau kembali lagi ke "wilayah Buntet" sebelah utara (konon, wilayah ini kemudian menjadi desa Buntet), di sini beliau mendirikan pondokan.

Beberapa saat kemudian, pondokan yang baru didirikan ini berhasil ditemukan tentara Belanda langsung menyerbu dan langsung membakarnya. Pada serbuan kedua kalinya ini, banyak santri yang gugur terbakar. Peristiwa gugurnya beberapa santri ini, diabadikan oleh masyarakat Buntet melalui sebuah area tanah "kuburan santri" yang dianggap suci. Beberapa santri yang selamat, diajak mbah Muqayim pergi menuju ke Desa Dawuan Sela, di sini beliau membuat sebuah *gubug* yang dindingnya terbuat dari bambu dan daun ilalang sebagai atapnya. Di dalam *gubug* inilah terjadinya proses pengajian dasar-dasar al-quran dan kitab *Fath-hul Mu'in*. Di Desa

Dawuan Sela inilah mbah Muqayyim merasakan aman baik dari kejaran tentara Belanda maupun dalam mengamalkan ilmunya, hingga beberapa tahun kemudian keberadaan "Pondok Pesantren Pemula" ini diserahkan kepada K. Muta'ad (menantu R. Muhammad anak mbah Muqayim). Sementara mbah Muqayyim sendiri memilih menjadi *mufthi* hingga akhir hidupnya di daerah Beji (Pemalang, Jawa Tengah). Sebelum kepergiannya ke Beji, beliau menyerahkan kepemimpinan pondok pesantrennya kepada K. Muta'ad yang juga salah seorang putra Kasepuhan Cirebon dan pernah menjadi penghulu Keresidenan Cirebon. Konon, serah-terima kepemimpinan Buntet Pesantren ini terjadi pada 1785.

Data tertulis menunjukkan bahwa, Pondok Pesantren Buntet mulai ada perkembangan adalah pada periode kepemimpinan KH. Abdul Jamil (1842-1910) yaitu ketika pertamakali beliau memperbaiki sarana fasilitas yang telah dianggap rapuh, penyusunan jadwal pengajian, penambahan cara atau metode pengajaraan KK yaitu tidak hanya menggunakan metode tradisional seperti metode *sorogan* dan *bandongan* tetapi dikembangkan juga cara atau metode lain seperti *mujadalah* (diskusi) bahkan pada saat itu dikembangkan juga sistem klasikal (*madrasi*).

Pada tahun 1960-an, ketika KH. Mustahdi Abbas memimpin pesantren Buntet, dibuka MTs Putra (*Muallimin*) dan MTs Putri (*Muallimat*) sebagai kelanjutan dari MIW. Pada perkembangan berikutnya, MTs Putra dan Putri ini berubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) Putra dan Putri yang masa belajarnya empat tahun (tapi ujian negaranya mengikuti MTs N yang masa belajarnya tiga tahun). Sebagai kelanjutan dari MTs/ PGA Putra dan Putri, KH. Mustahdi Abbad (kepemimpinan periode 1946-1975) sebagai pembina pesantren Buntet memprakarsai berdirinya Madrasah Aliyah (MA) Putra dan Putri pada 1968 yang kemudian pada 1971 MA Putra dan Putri ini dinegerikan menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). MAAIN seluruh Indonesia (termasuk MAAIN Buntet) berdasarkan SK Menag berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN.

Dengan demikian, pesantren Buntet selama tiga dasawarsa (1946-1979) telah mengalami perubahan dan pembaharuan yang sangat pesat terutama dalam bidang pendidikan sekolah yakni sejak diprakarsai MWB kemudian MIW, dilanjutkan berdirinya MTs *Muallimin* dan *muallimat* dan terakhir MA yang kemudian dinegerikan menjadi MAN. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, Kyai dan para pembina pesantren Buntet selalu berupaya meningkatkan dan memikirkan bentuk dan jenis pendidikan yang sesuai dengan kemauan dan perkembangan jaman.

Perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi semakin pesat, sementara lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang ada di pesantren Buntet dinilai selalu ketinggalan. Untuk menghadapi kenyataan ini, pengelola Pondok Pesantren Buntet selalu berupaya menyesuaikan diri yaitu dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai lama yang baik dan mengambil hikmah atau pelajaran dari perkembangan jaman itu yang dianggap lebih baik untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai suatu model dan program lembaga dalam menyongsong masa depan.

Salah satu upaya yang dilakukan pengelola pesantren Buntet, agar semua aset dan kegiatan yang telah berlangsung tetap berjalan tetapi mampu mengikuti jaman adalah, Kyai beserta para pembina lainnya bersepakat untuk mendirikan suatu wadah ter-organisasi yang diharapkan akan mampu menjadi mediator antara pesantren dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah. Wadah dimaksud adalah Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang didirikan pada 29 Juni 1992 dengan Akte Notaris no. 71.

YPI memiliki aset tanah dan bangunan yang ada di kompleks Buntet Pesantren yang telah disertifikat berjumlah 1,6 ha; jika digabungkan dengan tanah milik para Kyai yang ada di komplek Buntet pesantren, maka berjumlah kurang lebih 4 atau 5 ha. Melalui YPI, semua bentuk kegiatan kependidikan (sekolah maupun luar sekolah), kemasyarakatan maupun kepesantrenan dilindungi secara formal; karena semua bentuk program dan kegiatan yang ada, selalu berdasarkan

perencanaan dan kesepakatan pengurus Yayasan. Di dalam Yayasan ini juga ditetapkan, semua kegiatan yang bersifat kependidikan diselenggarakan melalui Lembaga Pendidikan Islam (LPI). Dengan demikian, di pesantren Buntet terdapat dua badan penyelenggara pendidikan yaitu YPI dan LPI. Program-program YPI bersifat menyeluruh (universal), termasuk program-program LPI; sedangkan program-program LPI bersifat internal terutama masalah kependidikan yang ada di lingkungan pesantren Buntet.[8]

2. Profil Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon awalnya hanya satu yakni Pondok Gede Raudlatut Tholibin terletak di Desa Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Pondok ini merupakan pondok pesantren tertua. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon didirikan sekitar tahun 1127 H. / 1705 M. oleh Kyai Jatira. Kyai Jatira adalah gelar dari KH. Hasanuddin putra KH. Abdul Latief dari desa Mijahan Plumbon Cirebon. Beliau merupakan bagian dari Keraton Cirebon. KH. Hasanuddin adalah seorang pejuang agama yang sangat dekat dengan masyarakat miskin. Desa yang kering dengan lahan pertanian yang kurang subur menjadikan dirinya berpacu mengembangkan pondoknya sebagai tempat peristirahatan yang jauh dari keramaian terutama dari pengaruh kekuasaan dan penjajah belanda. Maka dirintislah sebuah pesantren sederhana yang diberi nama Pesantren Babakan.

Stagnasi kepemimpinan dalam pesantren terjadi ketika Kyai Jatira meninggal dunia, langkah kaderisasi di Pesantren Babakan mengakibatkan terputusnya kegiatan pesantren sampai sarana fisikpun tidak berbekas. Sampai kemudian KH. Nawawi menantu dari Kyai Jatira mambangun kembali Pondok Pesantren Babakan yang letaknya satu kilometer kearah selatan dari tempat semula. Dalam mengasuh pesantren beliau dibantu

[8] Dokumentasi diperoleh dari pondok pesantren Buntet Cirebon, diambil tanggal 10 September 2012.

oleh KH. Adzro'i. Setelah itu pesantren dipegang oleh KH. Ismail putra KH. Adzro'i tahun 1225 H/1800 M.mulai tahun 1916 M pesantren diasuh oleh KH. Amien Sepuh bin KH. Arsyad, yang masih merupakan *Ahlul Bait*, dari garis keturunan Sunan Gunung Djati (baca silsilah KH Amin Sepuh, disusun oleh KH. Mudzakkir, 2007) .

KH. Amien Sepuh tahun 1893 pernah mesantren di KH. Cholil Bangkalan, bersama (waktu itu ustadznya) KH. Hasyim Asy'ari kakek Gus Dur (baca: Kisah-Kisah Hikmah : KH. Abdurrahman Arroisy). Pada masa pengasuhan KH. Amin Sepuh, Pondok Gede Babakan mencapai masa keemasan dan banyak andil dalam mencetak tokoh-tokoh agama yang handal, hampir semua Kyai sepuh di wil 3 Cirebon bahkan menyebar ke pelosok Indonesia adalah muridnya, sebut saja Kang Ayip Muh (kota Cirebon), KH. Syakur Yassin, KH. Abdullah Abbas (Buntet), KH Syukron Makmun, KH. Hannan, KH Sanusi, KH. Machsuni (Kwitang), dll.

KH. Amien Sepuh menekuni Pesantren Babakan sebagai tempat pengabdiannya terhadap masyarakat Islam khususnya. Setelah 25 tahun mengembangkan Pesantren Babakan, tahun 1940-an, yaitu pasca kemerdekaan, Beliau sekaligus berjuang bagi kemerdekaan RI. Bahkan dalam perang 10 November Surabaya, para Kyai khos termasuk KH Hasyim Asy'ari menunggu kabar dari KH Amin sepuh sebelum mengeluarkan Fatwa Jihad. KH. Amin Sepuh bersama beberapa anaknya, para Kyai Cirebon (wil 3 Cirebon dan Jawa Barat) plus Ustadz, santri dan masyarakat benar-benar berjuang ke surabaya, Jawa Timur. Bahkan kabarnya yang menembak Jendral Mallaby dari Inggris yang di boncengi Belanda (NICA), adalah anak buah KH. Amin Sepuh yang bernama Kyai Sholeh, yang wafat di sana.[9]

Pasca Revolusi Kemerdekaan beliau dibantu adik iparnya sekaligus muridnya KH. Sanusi terus mengembangkan Pesantren dengan berbagai aral melintang. Bahkan yang dahsyat adalah ketika Agresi Belanda II, tepatnya tahun 1952 Pondok

[9] Dokumentasi diperoleh dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, diambil tanggal 21 September 2012.

Pesantren diserang Belanda. Dikarenakan KH. Amin sepuh sebagai sesepuh cirebon merupakan pejuang yang menentang penjajah. Pondok dibakar dan dikepung. Para santri pergi dan para Pengasuh beserta keluarga mengungsi. Dua tahun kemudian, tahun 1954, Kyai sanusi yang masih salah satu murid KH. Amin Sepuh adalah orang yang pertama kali datang dari pengungsiannya. Sisa-sisa kitab suci berantakan, termasuk karya-karya KH. Amin Sepuh, habis dibakar, bangunan hancur dan nampak angker. Semua itu secara bertahap dibereskan lagi.

Tahun 1955 KH. Amin Sepuh kembali ke Babakan, kemudian para santri banyak berdatangan dari berbagai pelosok. KH. Amin sepuh yang menjadi pengasuh Pondok Gede kembali memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada para santrinya yang makin lama makin meluap. Pondok Raudhotut Tolhibin tidak dapat menampung para santri. Hingga santrinya dititipkan dirumah-rumah ustadnya seperti KH. Hanan, dirumah KH. Sanusi, dsb. hingga kelak anak cucunya membentuk dan mengembangkan pesantren-pesantren seperti sekarang ini. Sehingga Pondok yang awalnya hanya satu (Ponpes Raudlotut Tholibin) sekarang menjadi banyak. Alhamdulillah, tahun 2012 terdapat sekitar 40 Pondok di lingkungan Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

KH. Amien Sepuh wafat pada tahun pada tahun 1972 dan KH. Sanusi wafat pada tahun M.1974 M, dan kepengurusan dilanjutkan oleh KH. Fathoni Amin sampai tahun 1986 M. Setelah wafatnya KH. Fathoni Amin kepengurusan pesantren dilanjutkan oleh KH. Bisri Amin (wafat tahun 2000 M.) beserta KH. Fuad Amin (wafat tahun 1997 M.) dan KH. Abdullah Amin (wafat tahun 1999 M.) serta KH. Amrin Hanan (wafat tahun 2004 M.) dan KH. Azhari Amin (wafat tahun 2008) KH. Drs. Zuhri Afif Amin wafat pada tahun 2010. setelah wafatnya KH. Drs Zuhri Afif Amin, kepengurusan dilanjukan oleh cucu-cucu KH. Amin Sepuh dan Ulama serta masyarakat yang berkompeten untuk kemajuan pesantren. Bahkan bukan pendidikan agama saja yang mereka terapkan, pendidikan umumpun mereka terapkan terhadap para santrinya. Dengan harapan, para santrinya dapat memenuhi semua kewajibannya,

baik kewajiban dunia maupun akhirat, serta menyelaraskannya beriringan dan seimbang.[10]

E. Analisis Data Penelitian

Pembahasan mengenai feminisme dalam pesantren, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka konseptual, bahwa masih menjadi sesuatu yang "tabu" untuk dibicarakan. Meskipun dalam realisasinya, unsur-unsur yang berkenaan dengan feminisme telah muncul seperti peranan dan partisipasi perempuan dalam pengembangan kualitas pesantren. Beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pembahasan mengenai feminisme adalah bentuk resistensi atau perlawanan terhadap laki-laki melainkan memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai ruang sosial dan keagamaan. Dalam penelitian ini, ada tiga hal yang menjadi temuan penelitian sebagaimana di bawah ini.

1. Peranan Perempuan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon

Beberapa penelitian mengenai perempuan dalam pesantren, terdapat beragam persepsi dan stigma yang muncul. Sebagian dari mereka menilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak pantas. Laki-laki mempunyai kedudukan, beban, tanggung jawab lebih tinggi daripada perempuan. Pada umumnya laki-laki diberi kelebihan khusus sebagai pemimpin sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan hadis. Namun ada juga persepsi yang berbeda, yang menyatakan kesetaraan gender sangat perlu dan harus dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan, di pesantren sendiri sekarang telah muncul kontestasi perspektif antara pandangan tradisional yang resisten/menolak ide kesetaraan gender berdampingan dengan pandangan reformatif yang mengiyakan adanya ide kesetaraan gender.[11] Munculnya

[10] Dokumentasi diperoleh dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, diambil tanggal 21 September 2012.

[11] Siti Malikhah Towaf, "Peran Perempuan, Wawasan Gender dan Implikasinya terhadap Pendidikan di Pesantren" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 15, Nomor 3, Oktober 2008, h. 140.

pandangan reformatif di kalangan pesantren merupakan dinamika yang mengarah pada makin terbukanya ruang bagi perempuan di lingkungan pesantren. Biasanya pandangan itu muncul dari para aktivis perempuan yang sudah menimba ilmu di Barat atau mengadopsi keilmuan Barat.

Berkenaan dengan peranan perempuan di pondok pesantren Buntet Cirebon, peneliti mewawancarai salah satu pengurus, yang menyatakan bahwa:

> "Sebenarnya ruang bagi perempuan sudah ada, cuman sebatas urusan perempuan saja seperti mengorganisir dan mengajar santri putri. Bahkan, ada beberapa perempuan yang menjadi bu Nyai atau mengasuh pondok putri. Namun, pada umumnya kepengelolaan pesantren ini didominasi oleh laki-laki karena mereka lebih kompeten dan kebetulannya jumlah perempuan di sini lebih sedikit dibandingkan lak-laki."[12]

Wawancara di atas menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya sudah mulai mendapatkan ruang tersendiri tetapi karena kompetensi dan sumber daya manusia masih minim maka ruang bagi perempuan pun sangat terbatas. Masyarakat yang ada di pesantren ini tidak begitu fanatik atau resisten terhadap wacana feminisme, hanya saja memang dari pihak perempuan sendiri yang memang sumber dayanya masih terbatas.

Peneliti sendiri selama melakukan observasi di pondok pesantren Buntet Cirebon tidak menemukan adanya ketimpangan gender yang sangat kentara, melainkan masih minimnya peranan perempuan dalam kepengelolaan pesantren tersebut. Peneliti menyimak adanya pemahaman tentang gender yang makin terbuka di pesantren itu yaitu dengan ditandainya keterlibatan perempuan dalam program kegiatan pesantren, dan bahkan dalam hal kepemimpinan di pesantren itu meskipun pada skala yang kecil.[13] Dengan kenyataan itu,

[12] Wawancara dengan pengurus pondok pesantren Buntet Cirebon pada tanggal tanggal 21 September 2012.

[13] Observasi yang dilakukan di pondok pesantren Buntet Cirebon pada tanggal tanggal 10 dan 21 September 2012.

wacana tentang feminisme sebenarnya sudah mulai mengemuka dan menjadi salah satu pembicaraan yang hangat dan tidak dapat dikesampingkan.

Keberadaan pesantren seperti itu, dan termasuk beberapa pesantren di Cirebon seperti pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon,[14] saat ini menghadapi dua pilihan dilematis yaitu antara tetap mempertahankan nilai-nilai tradisinya atau mengikuti perkembangan dengan resiko kehilangan identitas kulturalnya.[15] Pilihan itu sepertinya ingin memisahkan peran laki-laki dan perempuan pada ruang yang benar-benar berbeda. Padahal tidak harus memisahkan antara keduanya, yaitu dengan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya. Dengan kerjasama yang baik, bahkan antara laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan berbeda dengan pesantren lainnya karena bagaimanapun perempuan mempunyai sentuhan tersendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Produktivitas dan karya-karya perempuan sekarang ini secara langsung dan tidak langsung telah menjadi kerangka paradigma pengkajian hak-hak perempuan dalam Islam. Lebih dari itu, perkembangan tersebut juga semakin membulatkan tekad dan komitmen untuk berjuang secara praksis liberatif dalam mengakomodasi dan membebaskan perempuan dari domestifikasi, subordinasi, dan diskriminasi yang selama ini membelenggu kebebasan perempuan.[16] Dengan karya-karya itu nampak sekali perempuan telah melakukan perjuangan keras untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan secara umum. Perdebatan selalu terjadi disaat karya-karya itu sedang dibuat atau bahkan telah dibuat karena masih ada belenggu kultural (baca: patriarkhal) yang belum dapat lepas sepenuhnya dari masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat mengambil benang merah bahwa peran dan keterlibatan perempuan di pondok pesantren Buntet Cirebon dan pondok

[14] Observasi yang dilakukan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal tanggal 27 September 2012.

[15] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 99.

pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon masih sebatas partisipatoris dalam kerangka struktural fungsional. Peran semacam ini sebenarnya mendapatkan masih mendapat kritikan keras dari kelompok feminis karena dianggap mempraktikkan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, khususnya dalam masalah reproduksi. Peran tersebut masih membatasi antara kapasitas laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren. Dapat pula dikatakan, budaya patriarkhal masih menyisakan banyak tradisi di pesantren yang tidak dapat hilang dalam waktu yang relatif sekejap.

2. Pengembangan Nilai-Nilai Feminisme di Pondok Pesantren Buntet Cirebon

Nilai-nilai feminisme dalam pesantren sebenarnya telah muncul berbarengan dengan terbukanya ruang partisipasi perempuan di pesantren. Ketimpangan gender yang terjadi di pesantren merupakan warisan budaya para pendahulunya, yang kemudian dikuatkan oleh legitimasi tafsir agama. Superior laki-laki sebagai warisan budaya pra Islam belum sepenuhnya terkikis oleh referensi budaya islami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Sebab itu, pemahaman terhadap ajaran Islam harus disesuaikan dengan konteks sosiologis, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan untuk semua umat manusia, tanpa harus dibatasi oleh jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.[17] Pemahaman itu menekankan pada penggabungan antara teks dan konteks mengenai gender sehingga penempatan antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami ketimpangan, melainkan justru muncul keseimbangan di antara keduanya.

Pondok pesantren Buntet Cirebon dapat dikategorikan

[16] Jamhari dan Ismatu Ropi (ed.), *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Utama, 2003), h. 4-5.

[17] Siti Malikhah Towaf, "Wawasan Gender dan Peran Produktif Perempuan Pesantren" dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008, h. 24.

sebagai pesantren yang sudah semi modern. Selain telah berdiri lembaga pendidikan formal, juga munculnya pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai individu yang layak memegang amanah di lingkungan pesantren tersebut. Menurut salah seorang pengurus, menyatakan bahwa:

> "Di pesantren ini telah menerapkan sistem yang terbuka bagi perempuan untuk mengembangkan partisipasi dan kreasinya. Setidaknya, pesantren ini telah menempatkan perempuan sebagaimana mestinya sesuai hak dan kewajiban yang dimilikinya."[18]

Wawancara di atas menegaskan bahwa perbedaan perlakuan atau ketimpangan gender sebagai warisan budaya terdahulu mulai hilang secara perlahan dan lebih menempatkan peran laki-laki dan perempuan sesuai kapasitas dan kompetensinya. Nilai-nilai feminisme –kalau boleh disebutkan- telah tumbuh dan berkembang meskipun secara implisit. Hal itu lebih dikarenakan masih banyaknya sumber daya laki-laki yang memegang peranan strategis dan demi kestabilan organisasi yang dijalankan di pesantren tersebut.

Peneliti juga mengamati secara langsung munculnya nilai-nilai feminisme di pesantren tersebut, yang agak berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Budaya patriarkhal sebagai warisan budaya pesantren tersebut, lambat laun mulai bergeser ke arah profesionalisme kerja, meskipun pada tampuk kepemimpinan di pesantren masih didominasi oleh kaum laki-laki.[19] Peneliti memaknai bahwa telah terjadi pergeseran paradigma berpikir dari patriarkhalisme ke arah profesionalisme. Pergeseran itu makin terbuka karena pesantren ini telah menerapkan sistem pesantren dan keorganisasian modern.

Keadaan yang tidak berbeda juga terjadi di pondok pesantren Babakan Ciwaring Cirebon. Salah seorang pengurus menyatakan bahwa:

[18] Wawancara dengan pengurus pondok pesantren Buntet Cirebon pada tanggal tanggal 21 September 2012.

[19] Observasi yang dilakukan di pondok pesantren Buntet Cirebon pada tanggal tanggal 10 dan 21 September 2012.

"Pada pesantren Babakan Ciwaring Cirebon pada umumnya perempuan sudah sadar diri akan kiprah dan perannya dalam berbagai sektor bidang kehidupan, tetapi masih dalam batas-batas tertentu karena masih terhambat adanya paradigma dan budaya patriarkhi yang mengakar. Seperti adanya pemberian awal tentang pengetahuan peran kepada anak-anak tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan, sejak kecil diberikan konsepsi bahwa laki-laki harus menjadi kuat dan harus bisa bertanggung jawab karena akan menjadi sandaran keluarga dan masyarakat, tetapi sebaliknya perempuan bisa menyandarkan dirinya dan kehidupannya terhadap laki-laki. Konsepsi awal ini yang akan berpengaruh dan menuntun mereka kepda perkembangan hidupnya hingga dewasa."[20]

Wawancara di atas makin mempertegas bahwa nilai-nilai feminisme telah berkembang di pesantren-pesantren, khususnya pada beberapa pesantren di Cirebon. Nilai-nilai itu berkembang secara perlahan dan tidak jarang mengalami kontroversi. Hal itu disebabkan karena budaya patriarkhi sudah cukup mengakar di kalangan pesantren.

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai feminisme telah berkembang secara formal di pondok pesantren Buntet Cirebon dan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dalam artian telah ada pengakuan secara formal bahwa perempuan mendapatkan ruang untuk mengembangkan peranan dan partisipasinya di lingkungan pesantren. Sedangkan secara kultural, masih terdapat sisa-sisa budaya patriarkhi yang tidak mudah dihilangkan dari pesantren meskipun telah ada perubahan sedikit demi sedikit.

[20] Wawancara dengan pengurus pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal tanggal 27 September 2012.

3. Pengaruh Nilai-Nilai Feminisme Terhadap Doktrin dan Tradisi Pesantren di Pondok Pesantren Buntet Cirebon

Budaya patriarkhi yang masih membudaya di lingkungan pesantren telah menjadi momok menakutkan bagi para aktivis feminis. Kondisi seperti itu telah mengibarkan perjuangan bagi para perempuan untuk meraih kebebasan (emansipasi) dan melepaskan diri dari belenggu ikatan apa pun. Transformasi sosial yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan, di mana terefleksi perbedaan-perbedaan gender yang telah melahirkan ketidakadilan gender. Selanjutnya terjadi rekonstruksi sehingga tercipta hubungan yang secara fundamental baru dan lebih baik. Kultur seperti itu yang menghegemoni kaum perempuan harus diubah menjadi struktur nonrepresif, yang lebih membebaskan.[21] Dengan realitas itulah diperlukan adanya budaya yang membebaskan bagi kaum perempuan dalam mengembangkan peranan dan partisipasinya.

Berkembangnya nilai-nilai feminisme di pondok pesantren Buntet Cirebon dan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon sedikit banyaknya telah mengubah pola pikir dan sikap masyarakat pesantren menjadi lebih egaliter, khususnya terhadap perempuan. Hal itu sesuai dengan pernyataan salah seorang pengurus pondok pesantren Buntet Cirebon, yang menyatakan bahwa:

> "Nilai-nilai feminisme telah memengaruhi sebagian masyarakat di pesantren ini lebih terbuka terhadap peran dan partisipasi perempuan, bahkan sebagian yang lain menerima dipimpin oleh seorang perempuan apabila memang layak dan kompeten."[22]

Hal itu hampir senada dengan yang disampaikan oleh pengurus pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, yang menyatakan bahwa:

---

[21] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan,* h. 22. 30-31.

[22] Wawancara dengan pengurus pondok pesantren Buntet Cirebon pada tanggal tanggal 21 September 2012.

"Dengan adanya pemahaman mengenai feminisme, mulai ada perubahan bagi santri dan pengurus pondok dalam menyikapi partisipasi perempuan. Meskipun perubahan itu tidak terlalu kentara, tetapi perempuan di pesantren ini mulai mendapatkan ruang tersendiri dan lebih terbuka dari masa sebelumnya."[23]

Hasil kedua wawancara di atas telah menunjukkan bahwa nilai-nilai feminisme telah mengubah pola pikir dan sikap masyarakat pesantren menjadi lebih egaliter dalam memandang perempuan. Termasuk juga dalam hal ini adalah kajian-kajian yang dilakukan di kedua pesantren itu telah terjadi diskursus yang hangat dan relevan dengan kondisi sekarang mengenai gender.

Berdasarkan pemahaman di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh nilai-nilai feminisme terhadap doktrin dan tradisi pesantren adalah munculnya pemahaman yang lebih egaliter terhadap eksistensi perempuan. Begitu pula dengan tradisi pesantren, mulai ada pergeseran dari tradisi yang lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan (baca: budaya patriarkhi) menjadi tradisi egalitarianisme dalam memandang perempuan. Pada tahapan selanjutnya, perempuan tidak lagi dianggap sebagai subordinat laki-laki tetapi menjadi pribadi yang bebas dan mandiri.

F. Kesimpulan

Penelitian mengenai feminisme dalam pesantren yang digambarkan melalui narasi pemberdayaan perempuan di pondok pesantren Buntet Cirebon pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon -sebagai pembanding- telah dibahas secara komprehensif pada bab sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tiga kesimpulan sebagai berikut:

[23] Wawancara dengan pengurus pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal tanggal 27 September 2012.

1. Peranan perempuan di pondok pesantren Buntet Cirebon dan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon -sebagai pembanding- masih sebatas partisipatoris dalam kerangka struktural fungsional. Peran semacam ini sebenarnya mendapatkan masih mendapat kritikan keras dari kelompok feminis karena dianggap mempraktikkan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, khususnya dalam masalah reproduksi. Peran tersebut masih membatasi antara kapasitas laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren. Dapat pula dikatakan, budaya patriarkhal masih menyisakan banyak tradisi di pesantren yang tidak dapat hilang begitu saja. Kesimpulan ini berdasarkan pada wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.
2. Pengembangan nilai-nilai feminisme di pondok pesantren Buntet Cirebon berlaku secara formal di pondok pesantren Buntet Cirebon dan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dalam artian telah ada pengakuan secara formal bahwa perempuan mendapatkan ruang untuk mengembangkan peranan dan partisipasinya di lingkungan pesantren. Sedangkan secara kultural, masih terdapat sisa-sisa budaya patriarkhi yang tidak mudah dihilangkan dari pesantren meskipun telah ada perubahan sedikit demi sedikit. Kesimpulan ini berdasarkan pada wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.
3. Pengaruh nilai-nilai feminisme terhadap doktrin dan tradisi pesantren di pondok pesantren Buntet Cirebon adalah munculnya pemahaman yang lebih egaliter terhadap eksistensi perempuan. Begitu pula dengan tradisi pesantren, mulai ada pergeseran dari tradisi yang lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan menjadi tradisi egalitarianisme dalam memandang perempuan. Pada tahapan selanjutnya, perempuan tidak lagi dianggap sebagai subordinat laki-laki tetapi menjadi pribadi yang bebas dan mandiri. Kesimpulan ini berdasarkan pada wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Daftar Pustaka

A. Buku

Al-Sheha, Abdul Rahman. *Woman in the Shade of Islam*. ttp.: Islamic Educational Center, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. VII.

Bailey, K.D. *Methods of Social Research*. London: The Free Press, 1978.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2008, Cet. 2.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Effendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan,* terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Fauzi, Ihsan Ali-. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.

Fauzia, Amelia, dkk. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research,* Jilid II. Yogyakarta: t.t.p. 1987.

Hidayat, Rachmad. "Kapan Ilmu akan Berubah?: Lebih Dekat kepada Metodologi Feminis", dalam *Jurnal Perempuan*, No. 48, Juli, 2006.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003.

Jamhari dan Ismatu Ropi (ed.). *Citra Perempuan dalam Islam:*

Pandangan Ormas Keagamaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jamhari dan Ismatu Ropi (ed.). *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia Utama, 2003.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi* Gender. Bandung: Mizan, 1999, Cet. I.

Merriam, S.B. *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach.* San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1998.

Milles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. *An Expanded Soursebook Qualitative Analysis,* Second Edition. New Delhi: Sage Publications, 1992.

Moghissi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta; LkiS, 2001.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Srimulyani, Eka. "*Nyai* dan *Umi* dalam Tradisi Pesantren di Jawa dan Dayah di Aceh: *Achieved* dan *Derivative Power,* dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya,* Vol. 11, No. 1Tahun 2009.

Towaf, Siti Malikhah. "Peran Perempuan, Wawasan Gender dan Implikasinya terhadap Pendidikan di Pesantren" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 15, No. 3, Oktober 2008.

Towaf, Siti Malikhah. "Wawasan Gender dan Peran Produktif Perempuan Pesantren" dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008.

Venny, Adriana (ed.). "Pentingnya Metodologis Feminis di Indonesia", dalam *Jurnal Perempuan*, No. 48, Juli, 2006.

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Yasmadi. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

B. Dokumen, Wawancara, dan Observasi

Dokumentasi diperoleh dari pondok pesantren Buntet Cirebon, diambil tanggal 10 September 2012.

Dokumentasi diperoleh dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, diambil tanggal 21 September 2012.

Observasi yang dilakukan di pondok pesantren Buntet Cirebon pada tanggal tanggal 10 dan 21 September 2012.

Observasi yang dilakukan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal tanggal 27 September 2012.

Wawancara dengan pengurus pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal tanggal 27 September 2012.

RELASI STATUS ASET YAYASAN DAN LEMBAGA PONDOK PESANTREN AS -SALAFIYAH BODE LOR KECAMATAN PLUMBON

❖ Juju Jumena
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Kepemilikan adalah penguasaan terhadap suatu benda oleh seseorang atas apa yang telah dilakukannya kecuali terhadap suatu hal yang mencegahnya. Sedangkan aset adalah suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang mempunyai nilai uang. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, dia hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah atas pengelolaan alam semesta, karena pada dasarnya Allahlah pemilik mutlak alam semesta ini, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 89 menyebutkan bahwa kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data pendukung. Sedangkan pengumpulan data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci: *Status, Aset, Pondok Pesantren As-Salafiyah*

A. Latar Belakng Masalah

Yayasan dan pesantren nampaknya sudah familier di kalangan masyarakat baik masyarakat akademisi maupun di kalangan masyarakat biasa, hal ini sangatlah lumrah di mana ada Pesantren maka di situlah ada yayasan. Yayasan mempunyai peran penting dalam memajukan pondok pesantren, karena yayasan sebagi sumber utama dalam memberikan dana. Yayasan di anggap sebagai payung hukum bagi Pondok Pesantren dalam mencari donator baik dari lingkungan masyarakat pesantren maupun dari luar. Yayasan mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan maju dan tidaknya pondok pesantren.

Dunia pesantren di telinga kita nampaknya sudah hal yang tidak asing lagi, pesantren lebih di identikan dengan masyarakat kaum santri yang memakai kain sarung dan kopyah hitam. Pesantren lebih di identikan juga sebagai tempat mencari ilmu agama bagi masyarakat pinggiran yang berada di tengah tengan perkampungan yang datang dari pelosok dengan bekal seadanya dan tanpa target yang jelas apa yang sedang di cari hanya keridhoan Allah semata.

Salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya adalah pesantren. Di tinjau dari segi historisnya, Pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.[1]

Di samping itu juga pesantren mempunyai peran yang cukup besar dalam penyebaran agama Islam kususnya di pulau jawa yang di lakukan oleh para wali atau yang sering di sebut juga wali songo yang sampai saat ini masih sangat terasa di warisi oleh para ulama-ulama sepeninggalan para wali. Kalau kita lihat di pulau jawa dari pondok pesantren Al-Amien Madura sampai dengan ujung sebelah barat pulau jawa di Banten ribuan pondok pesantren berdiri yang santrinya berasal dari bebagai pelosok tanah air, bahkan manca negara.

1 Depag RI, pondok Pesantren Dan Perkembangannya, hlm. 7.

Pesantren pada awal mulanya banyak didirikan oleh Kiai yang memiliki tanah yang cukup luas atau didirikan oleh orang yang kaya raya mempunyai rizqi yang berlimpah, namun tidak mempunyai kemampuan dalam bidang agama namun cinta akan agama sehingga mampu untuk memberikan lahan kepada kiai untuk mendirikan pesantren

Dalam perjalanannya pesantren telah larut sepenuhnya dengan modernisasi, dan telah mengalami pergeseran nilai dari pola pendidikan yang tradisional ke pola pendidikan modern. Dulu santri tidak diperbolehkan menempuh pendidikan formal santri hanya khusus mempelajari agama saja apa yang di ajarkan oleh kiainya. Banyak pondok pesantren berdiri megah lengkap dengan pendidikan formalnya seperti pondok pesantren Gontor. Mengambil sesuatu yang dipandang manfaat-positif untuk perkembangan. Dalam hal modernisasi ini ia berlandaskan pada maqolah sebagaimana berikut:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Artinya: "*Memelihara dan melestarikan nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih relevan.*

Sebagai legalisasi dan pengakuan oleh Pemerintah pondok pesantren dalam jalur pendidikan formal banyak menggunakan istilah "Yayasan", dalam perkembanganya hampir semua pondok pesantren menggunakan istilah yayasan, salah satu contoh misalnya Yayasan Pondok Pesantren As –Salafiyah Bode lor kecamatan Plumbon kab Cirebon. Padahal kalau kita lihat mereka tidak paham yang sebenarnya yayasan itu dan lebih ironisnya lagi tidak pernah di daftar dan tercatat sebagai lembaga yang berbadan hukum.

Pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk

memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiriatau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.[2]

Dari uraian tersebut di atas timbul beberapa permasalahan yang harus di selesaikan secara mendalam diantaranya :

1. Bagaimana Pemahaman Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Terhadap Keberadaan Aset yayasan yang di milikinya?
2. Bagaimana Status aset Yayasan Pondok Pesantren As- Salafiyah Bode lor kecamatan Plumbon
3. Bagaimana Peran Yayasan dalam Meningkatkan Kemajuan Pondok Pesantren As – Shalafiyah di Bode Lor?

Dalam Penelitian ini metode yang di gunakan adalah dengan metode kualitatif yaitu mengkaji secara mendalam sehingga mendapatkan kejelasan dari permasalahan yang akan diteliti, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara non terstrukur peneliti mendatangi pendiri yayasan, pengurus yayasan, serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar yayasan Pondok Pesantren As-Salafiyah. Di samping itu pula penulis melakukan studi dokumentasi sebagai data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan Yayasan dan Pondok Pesantren, dokumen-dokumen yang di peroleh dari pengurus yayasan berupa Akta Pendirian dan Izin dari menkumhan serta dokumen yang lainnya.

Landasan teori yang di jadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dalam memahami yayasan ada beberapa teori yang dapat dipakai diantaranya teori organisasi,

2 Tunas 63 internet di akses tgl 25 April jam 8,30.

teori kepemilikan dan teori Utilitarian dan teori yang lainnya, Dari teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami yayasan dalam Pondok Pesantren. Untuk lebih jelasnya kita lihat ketiga teori tersebut.

Stoiler dengan teori Organisasinya berpendapat bahwa di dalam organisasi terdapat suatu pola hubungan antara orang–orang di bawah pengaruh menejer yang mengarah pada tujuan bersama. Yayasan merupakan lembaga yang di dalamnya mempunyai organisasi yang jelas baik yang berkaitan dengan status maupun yang berkaitan dengan struktur kepengurusan, serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.[3]

Teori Kepemilikan yang di kemukakan oleh Al- Juhailli bahwa di dalam yayasan ada hubungan antara manusia dalam hal ini pengurus yayasan dengan harta yang di peroleh atas hasil usahanya. Biasanya yayasan dalam melakukan kegiatannya mendapat donatur baik yang bersifat tetap dan mengikat maupun donatur yang tidak tetap yang sifatnya tidak mengikat dan bersifat insidentil. Sehingga yayasan mempunyai harta kekayaan misalnya gedung, tanah, mobil dan lain-lain. Semua itu diperuntukan untuk kemajuan lembaga yang di miliki oleh yayasan.[4]

Teori Utilitarian yang di kemukakan oleh Jeramy Bentham, Dalam teori ini hukum bertujuan sedapat mungkin untuk mendatangkan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi manusia. Tujuan di bentuknya undang–undang yayasan adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar–besarnya baik bagi yayasan itu sendiri maupun masyarakat luas sehingga dari manfaat itu dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat maupun bagi yayasan.[5]

B. Landasan Teori yang berkaitan dengan Yayasan

1. Pengertian dan Istilah Yayasan

Istilah yayasan pada mulanya digunakan dari sebagai

3 Ibid Hal 90

4 Al – Juhailli, Status kepemilikan dalam islam,internet akses 8 juli 2012

5 Sadtjipto Raharjo, Hukum Progresif, Hal 108

terjemahan dari istilah "*stichting*" dalam Bahasa Belanda dan "*foundation*" dalam Bahasa Inggris.[6]

Sebagaimana istilah yayasan yang berasal dari penterjemahan bahasa Belanda, lembaga yayasan pun sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda sudah dikenal dan banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Karena bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk yayasan.

Pengertian yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang - dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dari pengertian tersebut tujuan yayasan adalah bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seorang yang menjadi anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

Yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan ataupun Perseroan Terbatas (PT). Yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, karena dalam hal yayasan yang dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain aset kekayaan.

Paul Scholten mengemukakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.[7]

6 Chatamarassjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 5.

7 Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, 1986, hal. 112

Menurut N.H. Bregstein; yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis.[8]

W.L.G. Lemaire menyatakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan yakni pemisahan suatu harta kekayaan untu tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (altruistishe doel) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.[9]

2. Status Badan Hukum Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, sebagai badan hukum (*recht persoon*) yayasan sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan. Meskipun belum ada undang–undang yang mengaturnya. Dalam lalu lintas hukum sehari–hari Yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*.[10]

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu yurisprudensi Tahun 1882 *Hoge Raad*, yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoode Gerech Shof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1889.[11]

Meskipun sebelumnya yayasan di Indonesia belum ada undang- undang yang mengaturnya, beberapa pakar hukum Indonesia diantaranya *Setiawan, SH, Prof, Soebekti* dan *Prof.*

8 Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, 1987, hal. 86

9 *ibid*. hal. 86

10 Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, April, 1995, hal. 112.

11 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing, hal. 18.

Warjono Projodikoro berpendapat bahwa yayasan merupakan badan hukum.[12]

Setiawan, SH berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum serta walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai yayasan praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu dapat didirikan suatu yayasan bahwa yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.[13]

Prof. Subekti menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal.[14]

Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya berjudul "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu*", berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Dasar suatu yayasan adalah suatu harta benda kekayaan yang dengan kemauan memiliki ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Tujuan Yayasan

Bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro. Menurut Hayati Soeroredjo, yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.[15]

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.[16]

---

12 Hisbullah Syawie, *Aspek-aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*, Varia Pendidikan, Tahun IX, No. 98 November 1993, hal. 89.

13 Setiawan, *Op.cit.*

14 Subekti, *Kamus Hukum.*

15 Hayati Soeroredjo dalam makalahnya : "*Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia* ", hal. 7

Tujuan yayasan haruslah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Keberadaan yayasan disebabkan oleh sifat dan tujuannya yang bukan komersial. Berbagai kemudahan yang diperoleh yayasan seperti kemudahan dalam pendiriannya, cara pengumpulan dana, sumbangan dari masyarakat, subsidi pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak terpisahkan dari tujuan yayasan yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu. Hal ini lebih jelas terlihat dari pendirian yayasan yang tidak boleh bertujuan melakukan pemberian/ kontra prestasi kepada para pendiri atau para pengurusnya, ataupun kepada pihak ketiga kecuali bila yang disebut terakhir ini dilakukan dengan tujuan sosial.[17]

Yayasan dapat melakukan berbagai kegiatan atau usaha. Lebih tegas yayasan dapat melakukan kegiatan yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba harus tidak diperbolehkan memilih bentuk badan hukum yayasan, tetapi bentuk badan hukum lain yang tersedia untuk maksud mengejar laba seperti Perseroan Terbatas umpamanya.[18]

Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan.[19]

Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa untuk adanya yayasan perlu :

a. Adanya pemisahan modal yang nyata sedemikian rupa, hingga orang yang menghendaki pemisahan itu atau ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu; bahwa ia/mereka karena tindakannya/mereka tidak dapat mengambil kekayaan itu

16 Rochmat Soemitro. "*Yayasan , Status Hukum dan Sifat Usahanya*", hal. 9

17Chatamarrasjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 221.

18 *Ibid*, hal. 221.

19 *Ibid*, hal. 221.

tanpa diketahui orang lain, dan tanpa adanya suatu penghalang;

b. Adanya perumusan secara jelas dari tujuannya yang diperkenankan, dan sedikit banyak ditentukan untuk tujuan mana modal dan penghasilannya disediakan secara kekal atau sedikit banyak kekal;

c. Adanya pengisian atau penunjukkan pengurus dalam penguasaan kekayaan dan penghasilannya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam sub 1 dan sub 2, kecuali bila dapat diatur dengan jalan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan;

d. Bahwa untuk mencapai tujuannya itu ada kehendak, tidak sekedar menyerahkan pengurusannya itu kepada suatu badan hukum yang telah ada, tetapi untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna keperluan tersebut.[20]

4. Organ Yayasan

Sebagai sebuah badan hukum, yayasan mempunyai suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ - organ badan tersebut.[21]

Di sini tampaklah bahwa sebagai sebuah organisasi dalam hukum segala tindakan dari yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keputusan dari yayasan itu.

Yayasan sebagai organisme dalam hukum, dalam kegiatan rutin maupun tertentu yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ yayasan. Adapun sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan:

"*Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas*".

20 Chidir Ali, *Op. Cit.* hal. 88-89.
21 Chaidir Ali, *Op.cit*, hal. 32.

a. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pembina dalam yayasan memiliki kedudukan tertinggi dimana pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

"*Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar*".

Kewenangan yang diberikan kepada adalah kewenangan yang benar, karena pada umumnya pembina adalah pendiri yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina adalah pendiri yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina dapat diangkat oleh rapat pembina jika calon pembina tersebut dinilai diangkat oleh rapat pembina jika calon pembina tersebut dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, maupun penyingkatan sesuai Pasal 28 ayat 3. Kewenangan yang besar tersebut sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan mengenai perubahan anggaran dasar.

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.

c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.

d. Penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.

Pengurus diangkat oleh prmbina berdarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (Iima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengurus adalah organ dalam yayasan yang melaksanakan kegiatan/pengurusan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). Adapun guna menjalankan kegiatan pengurus, maka organ pengurus terbagi atas:

- Ketua.
- Sekretaris.
- Bendahara.

Karena pengurus diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan yayasan, maka pengurus bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ dalam yayasan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan tentang pengertian pengawas yayasan ini termuat dalam Pasal 40.

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan mempunyai pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.

Pengawasan di dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan seperti yang dimuat dalam Pasal 40.

5. Kekayaan Yayasan

a. Istilah kekayaan Yayasan

Istilah yang digunakan dalam perseorangan terbatas maupun koperasi, agar usahanya dapat berjalan dengan baik ketika kedua badan hukum itu baru berdiri adalah "modal". Sedangkan untuk yayasan, Undang-Undang Yayasan tidak menggunakan istilah modal tetapi namanya kekayaan.[22]

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, Pengawas. Pasal 5 UU RI No. 28 tahun 2004 :

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengecualian dari hal tersebut dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus yayasan:

C. Gambaran umum Tentang Yayasan As-Salafiyah Bode Lor

1. Sejarah Berdirinya

Yayasan pondok pesantren pada awal berdirinya didasari pada tradisi masyarakat bode lor khususnya blok Kademangan bahwa setelah santri yang pulang dari pesantren di luar dan

22 Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 66

kembali ke desanya maka wajib mengamalkan ilmunya. Pada Tahun 1955 Tiga serangkai yaitu Kiyai Ismail Mukhlis, Kiyai Sukalim dan Kiyai Asnamwi Mendirikan Madrasah Diniyah, Kemudian Pada tahun 1960 Kiyai Hambali mendirikan Madrasah Wajib Belajar yang terletak di blok Kauman kedua blok tersebut masih berada dalam wilayah desa bode lor.

Pada Tahun 1970 atas Prakarsa Kiyai Hariri dari Pondok Pesantren Ciwaringin (Teman karib Kiyai Hambali) menyarankan untuk bersatu dan mendirikan yayasan, dengan nama Yayasan Pondok Pesantren As- Salafiyah yang dilanjutkan dengan akta pendirian di hadapan Notaris Farida Susanti pada tahun 1976 yang didirikan oleh 6 orang pendiri yaitu :1, Kiyai Hambali. 2. Haji Kamad, 3. Kiyai Hasyim, 4.Haji Khaerudin, 5. Haji Makubi, 6.dan Haji Marzuki. Keenam Pendiri tersebut berhasil mengumpulkan dengan modal awal Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan tanah seluas 1.400 m2. Pada Tahun yang sama Kiyai Hambali mendirikan Pondok Pesantren dengan Nama Pondok Pesantren As- Salafiyah yang sampai saat ini masih eksis.

Haji Abdul Karim sebagai tokoh masyarakat dan di pandang kaya di desanya serta mempunyai konsen di bidang keagamaan memberikan wakaf berupa tanah seluas 1000 M2. Sehingga pada tahun 1980 didirikan Madrasah Tsanawiyah, kemudian pada tahun1985 berdirilah sekolah yang sejajar dengan Sekolah Menengah Umum Yaitu Aliyah dan pada tahun 1990 berdirilah SMK dan TK,TKA, TPA., hingga sekarang luas area yang dijadikan lahan Pendidikan seluas 5476 M2.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomr 16 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang – Undang Yayasan Maka pada tahun 2011 bulan Desember telah terjadi perubahan Akta Pendirian melalui Notaris Bambang Sunaryo, SH. Dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut:

1. Pembina : - K.H. Hambali

- K.H. Irsyad.

2. Pengurus : - Haji Khaerudin sebagai Ketua I
- Drs, H, Mustahdi sebagai Ketua II

3. Sekertaris : - Drs. Syahidi
- Haji Kusnan Sahal

4. Bendahara : - Haji Syibli
- Haji Ali Murtadho

5. Pengawas : - Haji Ahmad Mudakir

D. Status Aset Yayasan As-Salafiyah Bode lor

1. Pemahaman Pendiri Yayasan Terhadap Yayasan dan Aset Yayasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendiri yayasan terdapat beberapa pemahaman yang berbeda antara pendiri dengan pengurus yayasan, hal ini dapat kita telaah dari pendapatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan di antaranya dengan Kiyai Hambali selaku Pendiri Yayasan Pondok Pesantren As-Salafiyah dan Kyia Haji Irsyad dapat diperoleh keterangan bahwa pada awal mulanya kita belum mengenal yayasan hanya pondok kecil dan santrinya pun hanya berasal dari masyarakat sekitar. Tahun 1965 ada ide atau gagasan serta saran dari Kyai Hanan Ciwaringin untuk mendirikan yayasan, "saya tidak faham apa itu yayasan?" yang jelas yayasan itu adalah wadah atau lembaga yang berada atau menaungi pesantren.[23]

Kalau kita analisis dari pendapat beliau sangatlah wajar karena tidak faham betul terhadap yayasan yang didirikannya, karena orang mendirikan yayasan biasanya di dasarkan pada pobi atau ikut–ikutan dan juga di dasari pada keikhlasan serta ketulusan hanya mendapatkan ridho dari Allah. Di samping itu pula pendidikan formal yang di peroleh kiyai Hambali membuat beliau mempunyai keterbatasan dalam memahami

23 Hasil Wawancara dengan K.H. Hambali Pendiri Yayasan Assalafiyah pada tanggal 23 September 2012

suatu yayasan. Hal ini terungkap dari kata kata " Kata Kiyai Hanan saya di suruh untuk membuat yayasan Pondok Pesantren jadi saya nurut saja apa kata beliau", kebetulan Kiyai Hanan temen mondok bareng dengan K.H. Hambali di Jawa Timur.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Drs. H. Mustahdi selaku Ketua II Yayasan As-Salafiyah mengatakan bahwa yayasan adalah suatu badan yang melalukan kegiatan yang bersifat sosial keagamaan yang mempunyai tujuan ideal serta tidak mengharapkan laba.[24] Yayasan yang sekarang berkembang dan maju merupakan hasil dari Pendiri yayasan saya hanya sebagai generasi penerus (generasi Ke 2) yang mewakili ayahnya yaitu bapak Haji Makubi sebagai pendiri yayasan bersama dengan lima orang rekanya antara lain:

- Kiyai Hambali sebagai Ketua I
- Haji Kamad Sebagai Ketua II
- Haji Hasyim Sebagai Ketua III
- Haji Khairudddin Sebagai Sekertaris I
- Haji Makubi Sebagai Sekertaris II
- Haji Marzuqi Sebagai Bendahara I
- Haji Bisri Sebagai Bendahara II

Setiap yayasan dalam pendirian mesti mempunyai modal awal baik berupa uang maupun berupa tanah ataupun bangunan, tidak seperti biasanya yayasan As-Salafiyah Bode lor ini mempunyai modal awal bukan berasal dari satu orang akan tetapi berasal dari enam orang pendiri yang sengaja mengumpulkan hartanya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan siar agama. Dengan demikian tidak ada klaim dari pengurus yayasan yang lain bahwa harta yayasan merupakan harta darinya atau milik dari seseorang. Oleh karena itu, mereka mengatakan aset yang ada sekarang adalah aset yayasan yang di kelola untuk kepentingan yayasan.[25]

24 Hasil Wawancara dengan Drs. Mustahdi Ketua II Yayasan Saaslafiyah Pada Tanggal 15 September 2012

25 Wawancara dengan Drs .H, Mustahdi selaku ketua II Yayasan Assalafiyah,12 September 2012

2. Keberadaaan Aset Yayasan As-Salafiyah Bode Sari Kecamatan Plumbon

Setiap yayasan dalam awal pendiriannya mesti mempunyai harta baik yang berasal dari dari pengumpulan harta antar pendiri maupun dari satu orang pendiri. Biasanya kalau harta atau aset yayasan itu berasal dari satu orang pendiri yang di pisahkan dari harta pribadi ,dengan demikian yayasan itu di klaim sebagai yayasan miliknya, dan orang lain tidak boleh mengatur. Berbeda hal nya dengan Yayasan As-salafiyah Bode Sari yang didirikan atas prakarsa enam orang yang telah di sebutkan di atas dengan modal awal berdasarkan patungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan tanah wakaf dari Haji Khaerudin seluas 1.400 M (seribu empar ratus meter Persegi) kini berkembang pesat.

Keberadaan aset yayasan tidak di kuasai oleh pendiri yayasan akan tetapi ada Pengelola yang di percaya oleh yayasan untuk mengelola harta wakaf yang berasal dari orang lain yang di sebut dengan Nadzir. Nadzir mempunyai kepengurusan tersendiri yang terdiri dari :

1. H. Khaerudin sebagai ketua
2. Drs.H.Mustahdi sebagai wakil ketua
3. Drs. Syahidi sebagai sekertaris
4. H. Syibli sebagai anggota
5. H. Ilyas sebagai anggota.

Keenam inilah yang bertugas mengelola aset yayasan baik yang berupa tanah wakaf dalam bentuk tanah sawah maupun tanah pekarangan.

Istilah yang digunakan dalam perseorangan terbatas maupun koperasi, agar usahanya dapat berjalan dengan baik ketika kedua badan hukum itu baru berdiri adalah "modal". Sedangkan untuk yayasan, Undang-Undang Yayasan tidak menggunakan istilah modal tetapi namanya kekayaan.[26]

26 Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 66

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, Pengawas. Pasal 5 UU RI No. 28 tahun 2004 :

Sampai saat ini aset Yayasan As-Salafiyah yang di miliki dapat di golongkan kedalam dua bagian yaitu kekayaan yang berasal dari Tanah Wakaf yang berbentuk tanag Pesawahan dan aset tanah wakaf dalam bentuk bangunan pendidikan. Aset yayasan yang berbentuk tanah wakaf pesawahan dapat di rinci sebagai berikut :

1. Tanah Wakaf untuk Pesawahan

a. Wakaf dari Haji Khaerudin Luas 3740 M di Jopak
b. Wakaf dari Haji Khaerudin Luas 3360 m di Bayalangu
c. Wakaf dari Haji Busyairi Luas 6885m di Geyongan
d. Wakaf dari Haji Karim Luas 6280 m di Gegesik
e. Wakaf dari Hj.Ini / H. MasdukiLuas 4954 m di Megu cilik
f. Wakaf dari Haji Ali Murtadho Luas 3444 m di Bayalangu
g. Wakaf dari Hj. Khodijah Luas 1700 m di Bayalangu
h. Wakaf dari Haji Khoerudin Luas 3124 m di Bayalangu
i. Wakaf dari Haji Mahfud Luas 3500m di Bayalangu
j. Wakaf dari Haji KhaerudinLuas 5552 m di Plumbon

Jumlah Luas Tanah Wakaf 42539 m2 atau 6 Bau 539 m2

2. Tanah Wakaf Untuk Bangunan Sarana Pendidikan

No	Nama	Luas	Peruntukan
1	H. Makubi	152 m2	2 Ruangan MD
2	H. Busyaeri	208 m2	2 Ruangan MA
3	H. Saki	1010 m2	10 Ruangan MI

4	Ibu Kartingen	330 m2	Ruangan Guru, Lab, dan Musholla
5	H. Karim	3260 m2	,Masjid, 10 Ruangan MTs,
6	H. Dwiwarno	1295 m2	6 Ruangan SMK
7	Um . Bangid	400 m2	Ruang Lab,IPA,UKS dan C
9	Wali santri / murid	1076 m2	Ruang TPA, TKA ,MA
10	H. Gufron	1126 m2	Perpus, MA, Lab Komputer
11	**Jumlah**	**5476 m2**	

3. Peran Yayasan As-Salafiyah Dalam Pengembangan Pendidikan

Peran Yayasan As-Salafiah dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan sangat besar sekali perannya terutama dalam pengembangan sarana fisik sekolah yang awalnya hanya berdiri suatu lembaga pendidikan Madrasah Diniyah kemudian berkembang menjadi beberapa lembaga Pendidikan diantaranya:

a. TK SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

b. TPA SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

b. MI SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

c. MD SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

d. MTs SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

e. MA SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

f. SMK SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON.

g. PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BODE SARI PLUMBON

Di samping selalu melakukan pengembangan sarana dalam bentuk bangunan fisik juga melakukan jejaring dan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan pihak swasta melakukan kerjasama dalam bidang magang di

mana siswa SMK disalurkan magang pada dealer dan bengkel Honda dan Yamaha dan perusahaan rotan yang ada disekitar wilayah Plumbon.

Yayasan As-Salafiyah memberikan santunan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam bentuk pembebasan dari seluruh biaya sekolah dan memberikan pakaian seragam. Bagi siswa siswi yang berasal dari keluaga yatim–piatu di sediakan atau pesantrenkan di pondok pesantren As-Salafiyah bebas dari biaya hidup atau makan dan di beri uang saku.[27] Pondok Pesantren As-Salafiyah 60 % santrinya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan yatim piatu, hal ini sebagai bentuk rasa kepedulian yayasan As-Salafiyah dalam bidang pendidikan keagamaan, walaupun saat ini yang lebih di kenal di masyarakat adalah lembaga pendidikanya bukan Pondok Pesantren As-Salafiyah.[28]

Dibidang keuangan Yayasan Salafiyah memberikan subsidi kepada Sekolah yang mempunyai muridnya sedikit, misalnya sekolah Madrasah Diniyah yang muridnya hanya 153 dengan jumlah 10 guru jelas dari pendapatanya saja tidak bisa untuk memenuhi kegiatan operasional maupun untuk memberikan honor kepada guru. SPP yang di bebankan kepada murid hanya Rp 5000 per bulan, sedangkan kebutuhan sehari hari ATK dan Minum Guru serta honor Untuk guru tidak mencukupi. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan honor guru maka yayasan setiap bulannya memberikan bantuan Subsidi kepada Madrasah Diniyah Sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Di samping memberikan santunan dalam bentuk bea siswa kepada santri dan sisiwa yang berprestasi juga siswa yang tidak mampu, yayasan juga memberikan bantua kepada guru dalam bentuk kesejahteraan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kususnya profesionalisme guru, yayasan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada guru yayasan yang

[27] Wawancara dengan H. Khaerudin selaku ketua Yayasan Assalafiyah pada tanggal 23 Sep 20012

[28] Wawancara dengan H. Sibly Bendahara I yayasan Assalafiyah.

sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan yayasan melakukan terobosan dengan membuat kerja sama dengan perusahaan maupun instansi pemerintah agar peserta didiknya dapat magang. Kerjasama tersebut diantaranya dengan dealer Yamaha Arista Plumbon, dealer Honda, CV Khalim Rotan dan Dinas tenaga kerja serta instansi –instansi yang terkait

Disadari maupun tidak keberhasilan lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran serta yayasan dalam memberikan dukungan dana,Yayasan As-Salafiyah dalam memberikan dukungan dana berasal dari dana yang di keluarkan untuk pengembangan pendidikan berasal dari harta kekayaan (aset) yayasan yang dikelola. Enam hektar sawah pertanian disewakan kepada petani itulah yang di jadikan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengembangan pendidikan.

Akar konflik yang sering timbul di yayasan adalah adanya saling kecurigaan terhadap penguasaan aset yayasan, kasus yang pernah terjadi adalah adanya penguasaan tunggal terhadap yayasan biasanya berasal dari pendiri yang merasa mempunyai andil besar dalam pendirian yayasan. Hal ini sesuai dengan teori kepemilikan bahwa benda yang dikuasai oleh seseorang dalam waktu yang cukup lama maka di klaim sebagai miliknya. Namun ceritanya berbeda tat kala yayasan itu didirikan oleh banyak orang seperti yang terjadi di yayasan As-Salafiyah yang didirikan oleh enam orang yang masing – masing mengumpulkan dana untuk modal yayasan yang mempuyai andil besar dijadikan sebagai bendahara yayasan.

Di samping dalam pengembangan pendidikan Yayasan As – Salafiyah juga mempunyai konsentrasi dalam bidang Da'wah Sosial Kemasyarakatan. Dalam bidang da'wah melakukan pengajian rutin bagi ibu-ibu yang diadakan pada setiap hari rabu pagi dari Pukul 9.00 s/d Pukul 11.00. Bagi bapak-bapak diadakan pengajian Pasaran pada hari Jumat menjelang Sholat Jumatan. Dari pengajian tersebut dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat di desa Bode lor khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar pesantren As –Salafiyah.

Setiap tahun menjelang bulan puasa sampai dengan menjelang hari Raya Idul fitri Yayasan As-Salafiyah mendapat amanah oleh masyarakat dan bagi orang kaya untuk menampung dan menyalurkan zakat mall. Dan zakat mall itu di salurkan kepada yang berhak menerimanya diantaranya para santi dan santri wati yang berasal dari keluarga miskin dan keluarga yatim piatu. Hal ini sebagai wujud kepedulian sosial yayasan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya.[29]

Sebagai kiprah dari perwujudan rukun Islam yang ke lima, maka Yayasan As-Salafiyah bekerja sama dengan Kelompok Bingbingan Ibadah Haji (KBIH) Al–Wasliyah mengadakan bimbingan ibadah haji bagi masyarakat Bode lor yang ingin melakukan ibadah haji ke tanah suci. Hal ini diawali dari pemikiran bahwa masyarakat Bode lor setiap tahunnya minat untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat sedangkan wadah untuk membimbing belum ada sehingga atas dasar inisiatif pengurus yayasan melakukan kerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al–Wasliyah yang beralamat di Watubelah kecamatan Plumbon, yang sebelumnya sudah berjalan.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Yayasan Pondok Pesantren As-Salafiyah Bode lor Kecamatan Plumbon dapat di tarik beberapa kesimpulan diantaranya:

Pemahaman terhadap yayasan bagi Pendiri maupun Pengurus serta masyarakat yang berada di sekitarnya sangat beragam, hal ini di sebabkan pengetahuan mereka tentang yayasan sangat minim, di samping itu pula belum ada kejelasan dalam undang undang sebelum lahirnya disahkannya Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo U U NO 28 Tahun 2004.

Keberadaan aset yayasan dapat di golongkan menjadi dua yaitu asset dalam bentuk bangunan sarana pendidikan yang di kelola oleh yayasan bersam dengan Dewan Pendidikan dan aset dalam bentuk tanah wakaf yang di kelola oleh nadzir sehingga

29 Wawancara dengan H. Khaerudin selaku Ketau I pada tanggal 23nSeptember,2012

aset yayasan terpisah dari harta kekayaan pendiri maupun pengurus.

Peran yayasan dalam pengembangan pondok pesantren adalah memberikan pembiyaaan dan makan gratis bagi santri dan santri wati yang berasal dari kalangan tidak mampu dan yatim piatu. Memberikan beasiswa bagi murid yang berprestasi, dan membantu biaya pendidikan bagi guru yang sedang melanjutkan studi.

DAFTAR PUSTAKA

DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah,Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003).

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)

Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia / LP3NI;1998)

Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2001)

Said Aqil Siradj (et.al), *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999)

Abdurrahman Wahid." *Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan*" Dalam Sonhaji Shaleh (terj); *Dinamika Pesantren,Kumpuln Makalah Seminar Internasional, The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*" (Jakarta : P3M, 1988)

Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, 1986

Abdul Munir Mulkan, *Paradigma Intelektual Muslim, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta :SIPRESS, 1993)

Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,*

Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni, 1986

Chatamarassjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000)

Chatama Rasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cet. I. (Bandung: PT. Citra Ditya Bakti, 2001)

Dijk, PL, Prof. dan Van Der Ploeg Tj, Mr., *Van de Vereniging en de Stichting*, (Arnhem: Gouda Quint BV, 1982)

Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES 1994)

Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama, di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta : Logos, 1999

Hendry Compbell Black, *Black's Law Dictionary*, Cet. 2, (ST Paul Minestotta USA, West Publishing Co,t.th)

Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2002

Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik, Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2002

Muhaimin, Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung : Trigenda Karya, 1993

Nursid Sumaatmadja, *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi* (Bandung : Alfabeta, 2002

Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari bawah,* (Jakarta : P3M, 1985

I, G, Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*,Mega Point, Jakarta,2000

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*,Epistema Institute, Jakarta, 2011

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Amandemen Yayasan

Peraturan – Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan atas Undang – Undang Yayasan

DESAIN MODUL DAN PEMBELAJARAN TRILINGUAL (ARAB-INGGRIS-INDONESIA) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI MTS CANDANG PINGGAN DAN KHUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN

❖ Reza Oktiana Akbar
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Bukan rahasia lagi kalau saat ini dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat dan negara. Batas-batas teritorial antarnegara yang sebelumnya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam konteks hubungan antarbangsa dan negara, kini hal itu tidak menjadi kendala yang berarti. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam eskalasi yang tinggi terutama teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menyebabkan batas-batas atau sekat-sekat geografis antarnegara dan bangsa seolah tak nampak lagi. Pantas, kalau banyak pihak mengatakan bahwa kecenderungan kehidupan bangsa dan negara saat ini mengarah kepada terbentuknya suatu masyarakat global (global village).

Kata Kunci: *Desain, Trilingual, Bahasa,*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan sekolah-sekolah formal (MI,MTs, MAN dan PTAI) yang ada di dalamnya dihadapkan pada banyak tantangan, terutama pada keunggulan yang harus dimiliki oleh para lulusannya sebagai bekal menghadapi era globalisasi dan modernisasi. Keunggulan tersebut dapat berupa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional.

Perwujudan kualitas SDM di pesantren berkaitan erat dengan seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di dalamnya, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan formal, termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kegiatan pembelajaran di MTs adalah suatu fase yang sangat penting dalam menciptakan SDM untuk kesiapan jenjang berikutnya. Oleh karena itu, MTs di lingkungan pesantren tidak hanya harus *survive*, tetapi juga harus mampu mengembangkan tarafnya menjadi sekolah bertaraf internasional, atau dengan kata lain MTs bertaraf internasional.

Semangat untuk memajukan pendidikan, pada dasarnya selaras dengan keinginan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa *"pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional"*. Sebagai realisasinya banyak sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan diri menjadi RSBI dan SBI, termasuk di dalamnya untuk jenjang SMP.

Dalam memenuhi keinginan pemerintah tersebut, berbeda halnya dengan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pesantren, yang nota bene pada umumnya berada di bawah naungan Departemen Agama, mereka cenderung tertinggal, termasuk di dalamnya Madrasah Tsanawiyah. Sangat jarang didapatkan pada suatu daerah terdapat Madrasah yang berencana atau telah menjadi Madrasah Tsanawiyah bertaraf internasional. Sebagai perbandingan, sampai saat ini ada 356 SMP RSBI dan SBI se-Indonesia dan 8 SMP RSBI se-wilayah 3 Cirebon[1], namun hampir tidak terdengar atau belum adanya data pasti yang

menunjukkan jumlah MTs yang sedang merintis atau telah bertaraf internasional baik se-Indonesia ataupun se-wilayah 3 Cirebon.

Proses pembelajaran dan penilaian pada sekolah RSBI harus bercirikan internasional, yang antara lain menerapkan pembelajaran dalam bahasa Inggris (bilingual). Berkaitan dengan hal itu, dengan melihat perkembangan secara umum pada dunia pesantren saat ini, yaitu mengedepankan pula penguasaan bahasa Arab dan Inggris, hal ini seharusnya menjadi modal dasar sekolah-sekolah formal di pesantren untuk mengembangkan dirinya menjadi sekolah bertaraf internasional. Bahkan pada pesantren, dunia internasional tidak hanya diartikan sempit, hanya dunia barat dengan bahasa Inggrisnya, tetapi juga mencakup dunia Islam dengan bahasa Arabnya.

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh setiap jenjang pendidikan formal, termasuk MTs di pesantren. Pelajaran matematika di MTs, sama seperti pelajaran umum lainnya, walaupun diakui menjadi bagian yang terintegrasi pada pembelajaran di pesantren, namun keberadaannya hanya merupakan keharusan bagi pesantren dalam menjawab tantangan modernitas, tanpa ada kemauan untuk melekatkan ciri khas dan keunggulan pesantren yang melekat pada setiap isi yang diajarkan kepada para santri.

Bahasa Arab merupakan bahasa dunia Islam. Baik di MTs maupun di lingkungan pesantren, bahasa Arab dipelajari secara intens dengan tujuan sebagai alat untuk membaca dan memahami Islam (Al-Qur'an, Kitab-kitab Tafsir, Hadist dan Para Ulama). Selain itu, di beberapa pesantren penguasaan bahasa Arab dijadikan sebagai program unggulan dengan menjadikannya sebagai bahasa percakapan sehari-hari yang dibiasakan bagi para santri.

Bahasa Inggris merupakan bahasa komunikasi dunia internasional. Keberadaannya sebagai salah satu mata pelajaran di MTs juga merupakan tuntutan formal dari kurikulum nasional. Selain itu, di beberapa pesantren bahasa Inggris juga dijadikan sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari yang dibiasakan bagi para santri.

Kelemahan penggunaan bahasa Arab dan Inggris untuk

meningkatkan kemampuan santri dalam mempelajari ilmu-ilmu umum seperti matematika berdampak pada lemahnya kemandirian santri dalam memperluas wawasan keilmuannya, terlebih pada masa yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran umum di MTs, penggunaan bahasa Inggris dan Arab dapat membantu siswa memperluas dan memperdalam pemahaman materi di sekolah melalui literatur-literatur asing yang dapat mereka peroleh baik di perpustakaan maupun di internet.

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap beberapa orang Guru dan murid MTs di beberapa pesantren se-wilayah III Cirebon termasuk didalamnya Pesantren Candang Pinggan Indramayu, didapatkan bahwa rata-rata para santri kurang antusias dalam mengikuti pelajaran matematika di kelas karena materi disajikan dengan bahasa yang kaku, monoton, kurang komunikatif dan tanpa dintegrasikan dengan materi-materi agama maupun pembiasaaan bahasa Arab yang sudah sebagian besar menjadi konsumsi para santri dalam keseharian. Mereka juga tidak mampu mendalami dan mengembangkan wawasan kematematikaannya secara mandiri di luar madrasah terutama berkenaan dengan mempelajari matematika dari sumber belajar berbahasa asing.

Secara umum, hasil wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa dalam hal mata pelajaran umum, khususnya matematika, MTs di pesantren cenderung memiliki kualitas pembelajaran yang tertinggal jika dibandingkan dengan SMP, hal ini berdampak pada kurangnya kemampuan matematika para santri jika dibandingkan dengan siswa di sekolah umum. Hal ini pula yang menyebabkan para orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah umum karena khawatir anak akan mengalami ketertinggalan dalam menguasai materi-materi umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menuangkan gagasan berupa penelitian dengan judul "Desain Modul dan Pembelajaran *Trilingual* Arab-Inggris-Indonesia pada Mata Pelajaran Matematika (Penelitian Pengembangan bagi Siswa MTs di Pesantren Candang Pinggan Indramayu dan Husnul Khotimah Kuningan)".

METODE DAN SUBJEK PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan. Metode pengembangan ini adalah desain model produk pembelajaran berupa modul pelajaran matematika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji pengembangan dan hal-hal yang lebih jauh menyangkut kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari data-data kuantitatif mengenai respon dan motivasi siswa/santri MTs setelah diterapkan model pembelajaran *Trilingual*. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII A, VIII B, IX A MTs Candang Pinggan yang berjumlah 38 siswa dan kelas VII B, VIII B dan IX J MTs Husnul Khotimah yang berjumlah 85 siswa.

B. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

I. Tahap Perencanaan Desain Modul *Trilingual*

Pada tahap ini peneliti merumuskan tujuan belajar dan melakukan analisis kebutuhan belajar siswa. Peneliti terlebih dahulu merumuskan tujuan belajar dari SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Silabus sekolah, termasuk di dalamnya kompetensi kebahasaan yang harus dikuasai oleh siswa berkaitan dengan materi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditetapkan contoh:

1.Standar Kompetensi Kelas VII Semester I:

a. Pokok Bahasan: Bilangan Bulat
b. Pokok Bahasan: Pecahan
c. Pokok Bahasan: Pernyataan Aljabar dan Aritmetika Sosial

Standar Kompetensi:

1. Memahami bentuk aljabar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah.

Kompetensi Dasar:

1.1 Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya.
1.2 Melakukan operasi pada bentuk aljabar.
1.3 Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan masalah aritmetika sosial yang sederhana.

Berdasarkan kompetensi dasar, maka tujuan pencapaian

materi dari pembelajaran adalah:

1) Siswa dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis;
2) Siswa dapat melakukan operasi hitung tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada bentuk aljabar;
3) Siswa dapat menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal.
4) Siswa dapat menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian;
5) Siswa dapat menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, harga beli, diskon, rabat, bruto, tara, netto, bunga tunggal dan pajak dalam kegiatan ekonomi;

Kompetensi Dasar Kebahasaan:

Siswa dapat memahami istilah-istilah matematika berkaitan dengan suku aljabar, unsur-unsur dan operasi aljabar menggunakan bahasa Inggris dan Arab.

Berdasarkan kompetensi dasar kebahasaan, maka tujuan pencapaian kebahasaan dari pembelajaran adalah:

a. Siswa dapat menyebutkan istilah-istilah matematika tentang suku aljabar, unsur-unsur dan operasi aljabar menggunakan bahasa Inggris dan Arab secara benar.
b. Siswa dapat menuliskan istilah-istilah matematika tentang tentang suku aljabar, unsur-unsur dan operasi aljabar menggunakan bahasa Inggris dan Arab secara benar.
d. Pokok Bahasan: Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabe
e. Pokok Bahasan: Perbandingan

2. Standar Kompetensi Kelas VIII Semester I:
   a. Pokok Bahasan: Faktorisasi Aljabar
   b. Pokok Bahasan: Relasi dan Fungsi
   c. Pokok Bahasan: Persamaan Garis Lurus
   d. Pokok Bahasan: Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

   Standar Kompetensi:

   1. Memahami sistem persamaan linear dua varibel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar:

1.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.

1.2 Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel.

1.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya.

Berdasarkan kompetensi dasar, maka tujuan pencapaian materi dari pembelajaran adalah:

1) Siswa dapat menyebutkan perbedaan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel;
2) Siswa dapat mengenal sistem persamaan linear dua variabel dalam berbagai bentuk dan variabel;
3) Siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi dan eliminasi;
4) Siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel;
5) Siswa dapat menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya.

Kompetensi Dasar Kebahasaan:

Siswa dapat memahami istilah-istilah matematika berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan bahasa Inggris dan Arab.

Berdasarkan kompetensi dasar kebahasaan, maka tujuan pencapaian kebahasaan dari pembelajaran adalah:

a. Siswa dapat menyebutkan istilah-istilah matematika tentang persamaan dan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan bahasa Inggris dan Arab secara benar.
b. Siswa dapat menuliskan istilah-istilah matematika tentang persamaan dan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan bahasa Inggris dan Arab secara benar.

3. Standar Kompetensi Kelas IX Semester I:
   a. Pokok Bahasan: Kesebangunan
   b. Pokok Bahasan: Bangun Ruang Sisi Lengkung
      Standar Kompetensi:
      1. Memahami Sifat-sifat Tabung, Kerucut, dan Bola serta menentukan ukurannya Kompetensi Dasar:
      1.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola.
      1.2 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola.
      1.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola.

      Berdasarkan kompetensi dasar, maka tujuan pencapaian materi dari pembelajaran adalah:
      1) Siswa dapat menyatakan rumus luas sisi tabung, kerucut dan bola;
      2) Siswa dapat menghitung luas sisi tabung, kerucut dan bola;
      3) Siswa dapat menyatakan rumus volume tabung, kerucut dan bola;
      4) Siswa dapat menghitung volume tabung kerucut dan bola;
      5) Siswa dapat menghitung ukuran tinggi atau jari-jari suatu tabung, kerucut dan bola jika volumenya ditentukan.

      Kompetensi Dasar Kebahasaan:
      Siswa dapat memahami istilah-istilah matematika berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola menggunakan bahasa Inggris dan Arab.
      Berdasarkan kompetensi dasar kebahasaan, maka tujuan pencapaian kebahasaan dari pembelajaran adalah:
      a. Siswa dapat menyebutkan istilah-istilah matematika tentang tabung, kerucut, bola, unsur-unsur, luas permukaan dan volumenya menggunakan bahasa Inggris dan Arab secara benar.
      b. Siswa dapat menuliskan istilah-istilah matematika tentang tabung, kerucut, bola, unsur-unsur, luas permukaan dan volumenya menggunakan bahasa Inggris dan Arab secara benar.
   c. Statistika dan Peluang

Selanjutnya, peneliti menganalisis kebutuhan pelajar dengan menyusun tabel materi dan soal evaluasi akhir yang dibutuhkan untuk mencapai indikator/tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dari setiap bab pada kelas VII, VIII dan IX. Adapun analisis yang dirancang adalah sebagai berikut.

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
VII	Bilangan Bulat	➢ Memberi contoh bilangan bulat; ➢ Menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif; ➢ Menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan; ➢ Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat bilangan bulat; ➢ Menentukan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat; ➢ Menghitung kuadrat, pangkat tiga, akar kuadrat, dan angkar pangkat tiga bilangan bulat; ➢ Menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat; ➢ Menggunakan sifat perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan bulat berpangkat untuk menyelesaikan masalah.	- Definisi bilangan bulat - Operasi hitung bilangan bulat - Sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat - Perpangkatan bilangan bulat - Penaksiran hasil perkalian dan pembagian - Penerapan operasi hitung campuran pada bilangan bulat
	Pecahan	➢ Memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis bilangan pecahan: biasa, campuran, desimal, persen, dan permil; ➢ Mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain;	- Definisi pecahan - Bentuk lain pecahan - Operasi hitung pada pecahan

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
		➢ Menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, kali, dan bagi bilangan pecahan; ➢ Menggunakan sifat-sifat operasi hitung tambah, kurang, kali atau bagi dengan melibatkan pecahan serta mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari.	
	Aljabar dan Aritmetika Sosial	➢ Menjelaskan pengertian variabel, konstanta, faktor, suku, dan suku sejenis; ➢ Melakukan operasi hitung tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada bentuk aljabar; ➢ Menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal. ➢ Menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian; ➢ Menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi.	- Bentuk aljabar - Penerapan aljabar
	Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel	➢ Mengenali persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel; ➢ Menentukan bentuk ekuivalen dari persamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas ditambah,	- Persamaan Linear satu variabel - Persamaan-persamaan yang ekuivalen

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
		dikurangi, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama; ➢ Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel; ➢ Mengenali pertidaksamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel; ➢ Menentukan bentuk ekuivalen dari pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas ditambah, dikurangi, dikalikan, atau dibagi dengan bilangan yang sama; ➢ Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel; ➢ Mengubah masalah ke dalam model matematika berbentuk persamaan linear satu variabel; ➢ Mengubah masalah ke dalam model matematika berbentuk pertidaksamaan linear satu variabel; ➢ Menyelesaikan model matematika suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel; ➢ Menyelesaikan model matematika suatu	- Penyelesaian persamaan satu variabel - Pertidaksamaan satu variabel - Pertidaksamaan-pertidaksamaan yang ekuivalen - Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel - soal

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
		masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel.	
	Perbandingan	➢ Menjelaskan pengertian skala sebagai suatu perbandingan; ➢ Menghitung faktor perbesaran dan pengecilan pada gambar berskala; ➢ Memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan perbandingan seharga (senilai) dan berbalik harga (nilai); ➢ Menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan seharga (senilai) dan berbalik harga (nilai).	- Definisi skala - Faktor skala - Fakta - Proporsi (perbandingan) senilai dan berbalik nilai
VIII	Faktorisasi Aljabar	➢ Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada bentuk dan pecahan aljabar; ➢ Menentukan faktor suku aljabar; ➢ Menerapakan sifat operasi aljabar dalam aritmetika.	- Operasi hitung bentuk aljabar - Pemfaktoran suku aljabar - Soal
	Relasi dan Fungsi	➢ Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi; ➢ Menyatakan suatu fungsi dengan notasi; ➢ Menghitung nilai fungsi; ➢ Menentukan bentuk	- Fakta - Definisi fungsi - Contoh membuat sebuah

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
		fungsi jika nilai dan data fungsi diketahui; ➢ Menyusun tabel pasangan nilai peubah dengan nilai fungsi; ➢ Menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius.	tabel fungsi. - Penyajian fungsi linear menggunakan grafik
	Persamaan Garis Lurus	➢ Mengenal persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk dan variabel; ➢ Menggambar grafik pada bidang kartesius; ➢ Mengenal pengertian garis lurus dan gradien; ➢ Menentukan gradien garis lurus serta persamaan garisnya; ➢ Menentukan koordinat titik potong dua buah garis; ➢ Menggunakan konsep persamaan garis dalam kehidupan sehari-hari.	- Persamaan garis lurus - Menggambar grafik persamaan garis lurus - Definisi persamaan garis lurus dan gradien - Cara menentukan nilai gradien - Soal
	Sistem Persamaan Linear Dua Variabel	➢ Menyebutkan perbedaan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel; ➢ Mengenal sistem persamaan linear dua variabel dalam berbagai bentuk dan variabel; ➢ Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi dan eliminasi; ➢ Membuat model matematika dari masalah	- Definisi persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel - Sistem persamaan linear dua variabel - Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel - Soal

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
		sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel; ➢ Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya.	
IX	Kesebangunan	➢ Membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun, dengan menyebut syaratnya; ➢ Menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun; ➢ Mengetahui syarat dua segitiga sebangun; ➢ Menentukan perbandingan sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya; ➢ Memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan. ➢ Mengenali dua bangun datar yang kongruen atau tak kongruen, dengan menyebut syaratnya; ➢ Menentukan segitiga yang kongruen; ➢ Membuktikan dua segitiga kongruen; ➢ Menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang	- Definisi sebangun - Latihan - Kesebangunan segitiga - Perbandingan ruas garis pada segitiga - Soal - Kekongruenan segitiga - Soal

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
		kongruen dan menghitung panjangnya; ➢ Menyatakan akibat dari dua segitiga kongruen; ➢ Membedakan pengertian sebangun dan kongruen.	
	Bangun Ruang Sisi Lengkung	➢ Menyatakan rumus luas sisi tabung, kerucut dan bola; ➢ Menghitung luas sisi tabung, kerucut dan bola; ➢ Menyatakan rumus volume tabung, kerucut dan bola; ➢ Menghitung volume tabung, kerucut dan bola; ➢ Menghitung ukuran tinggi atau jari-jari suatu tabung, kerucut dan bola jika volumenya ditentukan.	- Definisi tabung, kerucut dan bola - Luas permukaan tabung, kerucut dan bola - Volume tabung, kerucut dan bola - Contoh dan soal
	Statistika	➢ Membedakan populasi dan sampel; ➢ Menentukan sampel dari data yang diketahui; ➢ Menentukan populasi dari suatu data yang diketahui. ➢ Menyajikan data sederhana/tunggal; ➢ Membuat tabel frekuensi; ➢ Menyajikan data yang dikelompokkan. ➢ Mengetahui pengertian rata-rata, median dan modus; ➢ Menghitung nilai rata-rata, median dan modus.	- Populasi dan sampel - Latihan - Penyajian data dalam bentuk tabel - Ukuran pemusatan data - Latihan dan soal

Kelas	BAB	Indikator	Letak Indikator (Subbab)
	Peluang	➢ Mengetahui macam - macam kejadian; ➢ Mencari peluang dengan frekuensi nisbi/ relatif.; ➢ Mencari titik dan ruang sampel; ➢ Mencari peluang dengan tiap titik sampel berkesempatan sama untuk terjadi; ➢ Menentukan kepastian dan kemustahilan.	- Peluang - Frekuensi relatif - Contoh - Kejadian majemuk - Kejadian dan peluang suatu kejadian

A. Tahap Pengembangan Modul Trilingual

Tahap pengembangan dalam penelitian ini, dimulai dari mengembangkan topik menggunakan *mind map*. Contoh *Mind map* yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Kelas VII Semester I:

a. Suku Aljabar

Setelah mengembangkan topik menggunakan mind map dilakukan penyusunan draft dengan menyusun konsep-konsep yang ada di mind map menjadi sub-bab dan mengembangkannya menjadi uraian yang terdiri dari urutan fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Setelah tersusun, diberikan contoh dan latihan. Hal tersebut disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Pokok Bahasan dan Ragam Pengetahuan

Kelas	Pokok bahasan	Sub Pokok Bahasan	Bagian	Ragam Pengetahuan
VII	Pernyataan Aljabar & Aritmetika Sosial	Definisi Pernyataan aljabar	- Kaki ayam dan kambing - Definisi pernyataan aljabar - Koefesien, variabel dan konstanta - Menentukan koefisien, variabel dan konstanta	- Fakta - Konsep - Prinsip - Prosedur
		Suku sejenis	- Definisi suku sejenis - Kesamaan dan ketidaksamaan variabel - Menentukan suku sejenis lainnya	- Konsep - Prinsip - Prosedur
		Suku tidak sejenis	- Definisi suku tidak sejenis - kesamaan dan ketidaksamaan variabel - Menentukan suku tidak sejenis lainnya	- Konsep - Prinsip - Prosedur
		Penjumlahan & pengurangan pernyataan aljabar	- Penyederhanaan pernyataan aljabar dengan suku sejenis - Kelompokkan suku-suku sejenis, lalu jumlahkan & kurangkan	- Prinsip - Prosedur
		Perkalian & pembagian suku aljabar	- Perkalian atau pembagian antar koefisien & antar variable - Kelompokkan koefisien, variabel sejenis, lalu kalikan atau bagi	- Prinsip - Prosedur

Kelas	Pokok bahasan	Sub Pokok Bahasan	Bagian	Ragam Pengetahuan
VIII	Sistem Persamaan Liniear Dua Variabel (SPLDV)	Persamaan linier satu variabel	- Harga 1 pak buku - Definisi persamaan linier satu variabel - Satu variabel dan derajat tertinggi - Menyelesaikan Persamaan linier satu variabel	- Fakta - Konsep - Prinsip - Prosedur
		Persamaan linier dua variabel	- Harga 1 pak buku dan 1 pak pulpen - Definisi persamaan linier dua variabel - Dua variabel dan derajat tertinggi - Menyelesaikan Persamaan linier dua variabel	- Fakta - Konsep - Prinsip - Prosedur
IX	Bangun Ruang Sisi Lengkung	Definisi	- Tangki minyak tanah - Definisi tabung - Unsur-unsur tabung - Menentukan unsur-unsur tabung	- Fakta - Konsep - Prinsip - Prosedur
		Luas permukaan tabung	- Definisi luas permukaan tabung - Luas permukaan tabung - Menentukan luas permukaan tabung	- Konsep - Prinsip - Prosedur
		Volume tabung	- Definisi volume tabung - Volume tabung - Menentukan volume tabung	- Konsep - Prinsip - Prosedur

Selanjutnya disusunlah draft berbahasa Indonesia secara utuh sebagaimana terlampir. Setelah itu, draft diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Arab dan disusun per halaman dengan menggunakan tiga bahasa.

II. Validasi Modul *Trilingual*

Validasi penilaian modul yang telah disusun divalidasi oleh *expert judgement*, dalam hal ini yaitu satu orang ahli materi dosen matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, satu orang ahli bahasa Inggris dan satu orang ahli bahasa Arab dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun masukan dari *expert judgement* yaitu:

1. Kelas VII Semester 1
   a. Ahli materi:
      Dalam hal kelengkapan materi, terdapat beberapa bab yang belum lengkap dalam mengulas materi, yaitu pada bab I (bilangan bulat) belum ada materi yang membahas tentang akar kuadrat, akar pangkat tiga dari bilangan bulat dan sifat-sifat perkalian, pembagian serta perpangkatan bilangan bulat berpangkat. Dalam hal keluasan dan kedalaman materi, dianggap cukup karena secara umum telah memenuhi keberadaan seluruh aspek kognitif C1 s/d C6 sesuai dengan yang direncanakan, hanya saja belum menyeluruh, baru terpenuhi dari soal-soal yang diberikan, namun penjelasan teori baru sampai pada aspek C1 s/d C3.
      Dalam hal keakuratan gambar untuk memperjelas materi dinilai sangat kurang, karena hampir dari seluruh bab, belum ada gambar-gambar yang diberikan berkaitan dengan materi, hanya ada bantuan-bantuan penandaan saja seperti tanda panah dan bulatan. Keberadaan kunci jawaban dan ketepatan tampilan materi matematika dinilai sudah sangat sesuai karena kunci jawaban lengkap dan tampilan materi ditiap halaman tersaji dengan rapi, tidak ada makna yang terpotong. Dalam hal kemutakhiran materi dinilai sudah sesuai, karena baik penjelasan konsep, fakta, prinsip maupun prosedur berikut contoh maupun soal mengikuti perkembangan matematika sekarang, tepat dan benar saling relevan dan sesuai dengan konteks di Indonesia. Pustaka yang dijadikan sebagai acuan modulpun bervariasi dan hampir 100%

mencerminkan pustaka mutakhir sehingga dinilai sangat baik.

Dalam hal latihan dan evaluasi dinilai kurang. Latihan soal sebagai penguatan pada setiap akhir sub-bab dari setiap bab masih belum lengkap, baru pada bab III pernyataan aljabar saja yang sudah lengkap. Soal latihan akhir masih belum merata baik pada soal pilihan ganda maupun essay, ada yang banyak dan ada yang sedikit, soal-soal kemampuan berpikir juga jumlahnya tidak terpola dengan baik pada setiap bab. Pada akhir semester belum ada soal untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara menyeluruh.

Dalam hal materi pengayaan baik itu soal problem solving maupun kemampuan berpikir dinilai cukup. Hal ini disebabkan pada setiap bab terdapat soal-soal dalam jumlah yang cukup namun dalam hal mengenalkan berupa strategi penyelesaian belum diberikan di dalam materi sehingga belum optimal. Adapun pengayaan dalam bentuk materi keterampilan hampir tidak ada sehingga dinilai sangat kurang, seperti contohnya dalam pembahasan mengubah pecahan menjadi persen dengan cara mental aritmetika atau menyelesaikan soal-soal non-routin dan portofolio berupa tugas-tugas rumah, diskusi dan tugas proyek.

Dalam hal teknik penyajian, sistematika penyajian dan keruntunan sajian dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan setiap bab selalu memuat pendahuluan berupa fakta, konsep berupa definisi, prinsip berupa sifat-sifat operasi dan prosedur berupa langkah-langkah penyelesaian namun hal ini belum optimal bagi setiap sub-bab, saran *expert* sebaiknya setiap sub-bab juga diusahakan hal yang serupa. Konsep dan soal disajikan secara runtut dari yang termudah sampai tersulit, tetapi masih ada yang kurang runtut, yaitu pada bab V (Perbandingan). Pada pembahasan tentang definisi proporsi langsung dikenalkan proporsi senilai dan berbalik nilai, hal itu akan menyulitkan pemahaman siswa jika disampaikan secara berbarengan, saran *expert* sebaiknya disampaikan definisi proporsi dalam konteks proporsi

senilai terlebih dahulu. Sistematika dalam bab dinilai kurang, hal ini disebabkan walaupun urutan telah ditampilkan secara konsisten namun penomoran dan gambaran sistematika penyajian belum ditampilkan secara jelas. Keseimbangan sajian materi dan ragam latihan dinilai cukup namun *expert* menekankan bahwa pada bab IV (Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel) perlu diperbanyak materi dan jenis latihannya.

Dalam hal pendukung penyajian, *expert* menyarankan pada pengantar dan pendahuluan agar peneliti menambahkan kalimat yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.

Dalam hal strategi penyajian, baik dimensi interaktif-partisipatif maupun keterlibatan peserta didik dinilai cukup baik. Namun *expert* menyarankan agar pada buku diberikan tugas-tugas mandiri dan contoh-contoh berupa gambar atau fenomena sosial di lingkungan peserta didik yang berkaitan dengan materi ajar.

b. Ahli bahasa Inggris:

Dalam hal keakuratan gramatika dan istilah bahasa Inggris dalam modul, *expert* menegaskan bahwa perlu adanya sedikit perbaikan dan masih adanya penempatan atau penggunaan istilah yang kurang tepat. Pada bab II (pecahan), kata desimal diartikan sebagai "*denary*" seharusnya "*decimal*", dan pernyataan aljabar diartikan sebagai "*algebraic form*" seharusnya "*algebraic expression*". Ketepatan tampilan materi matematika dalam bahasa Inggris dinilai sangat baik, hal ini menunjukkkan bahwa penempatan kata, kalimat dan paragraph hasil alih bahasa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris berkorespondensi dan bersesuaian dengan halaman yang saling bersebelahan.

c. Ahli bahasa Arab:

Keakuratan gramatika bahasa Arab dinilai cukup baik, tetapi *expert judgement* menegaskan bahwa peneliti masih perlu

memperbaiki beberapa kata majemuk (mudhof dan mudhof ilaih) yang tertukar dengan kata sifat dan yang disifatinya (*na'at* dan *man'ut*). Pada bab III (pernyataan aljabar), penyebutan kata pernyataan dan pecahan dari pernyataan aljabar dan pecahan aljabar, sebaiknya tidak menggunakan huruf alif-lam sehingga tidak memancing siswa untuk mengucapkan tanda baca seperti pada na'at man'ut. Selain itu, *expert* menambahkan bahwa masih terdapat beberapa tanda I'rob yang masih kurang tepat. Adapun pemilihan bahasa Arab yang digunakan mudah dipahami dan ketepatan tampilan telah selaras dengan kata, kalimat dan paragraf pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2. Kelas VIII Semester 1

a. Ahli materi:

Dalam hal kelengkapan materi, terdapat beberapa bab yang belum lengkap dalam mengulas materi, yaitu pada bab I (faktorisasi aljabar) belum ada materi yang membahas tentang faktorisasi bentuk $x^2+2xy+y^2$. Dalam hal keluasan dan kedalaman materi, dianggap cukup karena secara umum telah memenuhi keberadaan seluruh aspek kognitif C1 s/d C6 sesuai dengan yang direncanakan, hanya saja belum menyeluruh, baru terpenuhi dari soal-soal yang diberikan, namun penjelasan teori baru sampai pada aspek C1 s/d C3.

Dalam hal keakuratan gambar untuk memperjelas materi dinilai kurang. Hampir dari seluruh bab, belum ada gambar-gambar yang diberikan berkaitan dengan materi. Saran *expert*, sebaiknya pada bagian pendahuluan setiap bab diberikan gambar yang relevan dengan fakta sehari-hari. Keberadaan kunci jawaban dan ketepatan tampilan materi matematika dinilai sudah sangat sesuai karena kunci jawaban lengkap dan tampilan materi ditiap halaman tersaji dengan rapi, tidak ada makna yang terpotong.

Dalam hal kemutakhiran materi dinilai sudah sesuai, karena baik penjelasan konsep, fakta, prinsip maupun prosedur berikut contoh maupun soal mengikuti perkembangan

matematika sekarang, tepat dan benar saling relevan dan sesuai dengan konteks di Indonesia. Pustaka yang dijadikan sebagai acuan modulpun bervariasi dan hamper 100% mencerminkan pustaka mutakhir sehingga dinilai sangat baik.

Dalam hal latihan dan evaluasi dinilai kurang. Saran *expert*, sebaiknya diberikan latihan soal sebagai penguatan pada setiap akhir sub-bab dari setiap bab. Soal latihan akhir sudah merata baik pada soal pilihan ganda maupun essay, namun soal-soal kemampuan berpikir jumlahnya tidak terpola dengan baik pada setiap bab. Pada akhir semester belum ada soal untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara menyeluruh.

Dalam hal materi pengayaan baik itu soal problem solving maupun kemampuan berpikir dinilai cukup. Saran *expert,* sebaiknya diberikan strategi penyelesaian problem solving dan kemampuan berpikir secara khusus berikut contoh di awal bab atau terpisah. Pengayaan dalam bentuk materi keterampilan, disarankan agar diberikan soal-soal non-routin dan portofolio berupa tugas-tugas rumah, kelompok dan tugas proyek.

Dalam hal teknik penyajian, sistematika penyajian dan keruntunan sajian dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan setiap bab selalu memuat pendahuluan berupa fakta, konsep berupa definisi, prinsip berupa sifat-sifat operasi dan prosedur berupa langkah-langkah penyelesaian namun hal ini belum optimal bagi setiap sub-bab, saran *expert* sebaiknya setiap sub-bab juga diusahakan hal yang serupa. Konsep dan soal sudah disajikan secara runtut dari yang termudah sampai tersulit. Sistematika dalam bab dinilai kurang, hal ini disebabkan walaupun urutan telah ditampilkan secara konsisten namun penomoran dan gambaran sistematika penyajian belum ditampilkan secara jelas. Keseimbangan sajian materi dan ragam latihan dinilai cukup namun *expert* menekankan bahwa pada setiap bab perlu diperbanyak materi dan jenis latihannya.

Dalam hal pendukung penyajian, *expert* menyarankan pada pengantar dan pendahuluan agar peneliti menambahkan kalimat yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.

Dalam hal strategi penyajian, baik dimensi interaktif-partisipatif maupun keterlibatan peserta didik dinilai cukup baik. Namun *expert* menyarankan agar pada buku diberikan tugas-tugas mandiri dan contoh-contoh berupa gambar atau fenomena sosial di lingkungan peserta didik yang berkaitan dengan materi ajar.

b. Ahli bahasa Inggris:

Dalam hal keakuratan gramatika dan istilah bahasa Inggris dalam modul, *expert* menegaskan bahwa perlu adanya sedikit perbaikan dan masih adanya penempatan atau penggunaan istilah yang kurang tepat. Pada bab III (persamaan garis lurus), penggunaan *interrogative sentence* dan *verb* masih kurang tepat. Ketepatan tampilan materi matematika dalam bahasa Inggris dinilai sangat baik, hal ini menunjukkkan bahwa penempatan kata, kalimat dan paragraph hasil alih bahasa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris berkorespondensi dan bersesuaian dengan halaman yang saling bersebelahan.

c. Ahli bahasa Arab:

Keakuratan gramatika bahasa Arab dinilai cukup baik, tetapi *expert judgement* menegaskan bahwa peneliti masih perlu memperbaiki beberapa penulisan kata perintah yang masih kurang tepat dan perlunya penambahan kata bantu dalam mendefinisikan. Selain itu, *expert* menambahkan bahwa masih terdapat beberapa tanda I'rob yang masih kurang tepat. Adapun pemilihan bahasa Arab yang digunakan mudah dipahami dan ketepatan tampilan telah selaras dengan kata, kalimat dan paragraf pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

3. Kelas IX Semester 1

a. Ahli materi:

Dalam hal kelengkapan materi, terdapat bab yang belum lengkap dalam mengulas materi, yaitu pada bab I (kesebangunan) belum ada materi yang membahas tentang pembuktian kekongruenan pada dua buah segitiga. Dalam hal keluasan dan kedalaman materi, dianggap cukup karena secara umum telah memenuhi keberadaan seluruh aspek kognitif C1 s/d C6 sesuai dengan yang direncanakan, hanya saja belum menyeluruh, baru terpenuhi dari soal-soal yang diberikan, namun penjelasan teori baru sampai pada aspek C1 s/d C3.

Dalam hal keakuratan gambar untuk memperjelas materi dinilai cukup, hanya pada bagian awal bab saja belum ada gambar-gambar yang diberikan berkaitan dengan fakta keseharian. Keberadaan kunci jawaban dan ketepatan tampilan materi matematika dinilai sudah sangat tepat karena kunci jawaban lengkap dan tampilan materi ditiap halaman tersaji dengan rapi, tidak ada makna yang terpotong.

Dalam hal kemutakhiran materi dinilai sudah sesuai, karena baik penjelasan konsep, fakta, prinsip maupun prosedur berikut contoh maupun soal mengikuti perkembangan matematika sekarang, tepat dan benar saling relevan dan sesuai dengan konteks di Indonesia. Pustaka yang dijadikan sebagai acuan modulpun bervariasi dan hamper 100% mencerminkan pustaka mutakhir sehingga dinilai sangat baik.

Dalam hal latihan dan evaluasi dinilai kurang. Latihan soal sebagai penguatan pada setiap akhir sub-bab dari setiap bab masih belum lengkap. Soal latihan akhir masih belum merata baik pada soal pilihan ganda maupun essay, ada yang banyak dan ada yang sedikit, soal-soal kemampuan berpikir juga jumlahnya tidak terpola dengan baik pada setiap bab. Pada akhir semester belum ada soal untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara menyeluruh.

Dalam hal materi pengayaan baik itu soal problem solving maupun kemampuan berpikir dinilai cukup. Saran *expert*, perlu adanya upaya pengenalan strategi penyelesaian problem solving dan kemampuan berpikir dalam bentuk contoh soal. Adapun pengayaan dalam bentuk materi keterampilan hampir tidak ada sehingga dinilai sangat kurang, seperti contohnya materi tantangan yang bisa dilombakan kepada siswa secara individual atau kelompok, menyelesaikan soal-soal non-routin dan portofolio berupa tugas-tugas rumah.

Dalam hal teknik penyajian, sistematika penyajian dan keruntunan sajian dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan setiap bab selalu memuat pendahuluan berupa fakta, konsep berupa definisi, prinsip berupa sifat-sifat operasi dan prosedur berupa langkah-langkah penyelesaian namun hal ini belum optimal bagi setiap sub-bab, saran *expert* sebaiknya setiap sub-bab juga diusahakan hal yang serupa dan untuk memperindah penyajian sebaiknya prinsip dan prosedur ditampilkan dalam kolom khusus disamping uraian berupa contoh dan penyelesaian. Konsep dan soal telah disajikan secara runtut dari yang termudah sampai tersulit. Sistematika dalam bab dinilai kurang, hal ini disebabkan walaupun urutan telah ditampilkan secara konsisten namun penomoran dan gambaran sistematika penyajian belum ditampilkan secara jelas. Keseimbangan sajian materi dan ragam latihan dinilai cukup namun *expert* menekankan bahwa pada bab I (kesebangunan) dan III (statistika dan peluang) perlu diperbanyak materi dan jenis latihannya.

Dalam hal pendukung penyajian, *expert* menyarankan pada pengantar dan pendahuluan agar peneliti menambahkan kalimat yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.

Dalam hal strategi penyajian, baik dimensi interaktif-partisipatif maupun keterlibatan peserta didik dinilai cukup baik. Namun *expert* menyarankan agar pada buku diberikan tugas-tugas mandiri dan contoh-contoh berupa gambar atau

fenomena sosial di lingkungan peserta didik yang berkaitan dengan materi ajar.

b. Ahli bahasa Inggris:

Dalam hal keakuratan gramatika dan istilah bahasa Inggris dalam modul, *expert* menyatakan bahwa masih ada beberapa kalimat yang gramatikalnya mengikuti gramatikal bahasa Indonesia. Hal ini terlihat pada fakta dan definisi pada bab II (bangun ruang sisi lengkung). Selain itu, masih ada penggunaan istilah yang kurang konsisten pada bab II (bangun ruang sisi lengkung), kata bangun ruang diartikan pada judul sebagai *three dimensional* namun dalam isi sebagai *solid*, menurut *expert,* sebaiknya digunakan satu saja. Ketepatan tampilan materi matematika dalam bahasa Inggris dinilai sangat baik, hal ini menunjukkkan bahwa penempatan kata, kalimat dan paragraph hasil alih bahasa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris berkorespondensi dan bersesuaian dengan halaman yang saling bersebelahan.

c. Ahli bahasa Arab:

d. Keakuratan gramatika bahasa Arab dinilai cukup baik, tetapi *expert judgement* menegaskan bahwa peneliti masih perlu memperbaiki beberapa penulisan kata benda yang masih kurang tepat (bahasa arab dari tabung pada bab III), penghapusan huruf alif-lam pada mudhof ilaih (pada terjemahan luas permukaan pada bab III) dan perlunya penambahan kata bantu dalam mendefinisikan. Selain itu, *expert* menambahkan bahwa masih terdapat beberapa tanda I'rob yang masih kurang tepat. Adapun pemilihan bahasa Arab yang digunakan mudah dipahami dan ketepatan tampilan telah selaras dengan kata, kalimat dan paragraf pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

III. Revisi Modul *Trilingual* Pasca Validasi

Modul yang telah divalidasi oleh *expert judgement* kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan masukan *expert judgement* sebagai berikut:

1. Pada kelas VII semester I

a. Menambahkan materi pada bab I (bilangan bulat) tentang akar kuadrat, akar pangkat tiga dari bilangan bulat dan sifat-sifat perkalian, pembagian serta perpangkatan bilangan bulat berpangkat.
b. Menambahkan contoh soal atau kuis yang memuat aspek C4 s/d C6 pada setiap bab.
c. Menambahkan gambar yang relevan dengan materi pada setiap bab.
d. Menambahkan latihan sebanyak 5 soal pada setiap akhir sub-bab
e. Menambahkan soal latihan setiap akhir bab pilihan ganda sebanyak 25 soal pilihan ganda dan 15 soal essay.
f. Membuat soal-soal kemampuan berpikir secara terpola berurut, terdiri dari soal kemampuan berpikir kreatif, kritis, problem solving, komunikasi matematika, kemampuan berpikir aljabar, geometri dan koneksi matematika secara berurutan, masing-masing sebanyak 1 soal.
g. Pada akhir semester diadakan soal review seluruh bab.
h. Menambahkan contoh soal berikut pola penyelesaian problem solving dan kemampuan berpikir pada setiap bab.
i. Menambahkan materi pengayaan berupa *challence* (materi tantangan) kepada siswa secara individual atau kelompok, soal-soal non-routin dan portofolio berupa tugas-tugas rumah.
j. Menambahkan fakta pada setiap sub-bab
k. Menampilkan penomoran dan sistematika penyajian setiap sub-bab
l. Menambahkan kalimat pada pengantar dan pendahuluan yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.
m. Memperbaiki susunan gramatika pada setiap bab dan mengganti istilah matematika yang kurang tepat, "*denary*" menjadi "*decimal*", dan sebagai "*algebraic form*" menjadi "*algebraic expression*".
n. Menghilangkan huruf alif-lam pada terjemahan arab kata

pernyataan dan pecahan dari pernyataan aljabar dan pecahan aljabar, menambahkan kata bantu dalam mendefinisikan konsep dan memperbaiki tanda I'rob yang masih kurang tepat.
(seluruh gambar permulaan modul dan revisi terdapat dalam lampiran)

2. Pada kelas VIII semester I
   a. Menambahkan materi tentang faktorisasi bentuk $x^2+2xy+y^2$.
   b. Menambahkan contoh soal atau kuis yang memuat aspek C4 s/d C6 pada setiap bab.
   c. Menambahkan gambar yang relevan dengan materi pada setiap bab.
   d. Menambahkan latihan sebanyak 5 soal pada setiap akhir sub-bab
   e. Menambahkan soal latihan setiap akhir bab pilihan ganda sebanyak 25 soal pilihan ganda dan 15 soal essay.
   f. Membuat soal-soal kemampuan berpikir secara terpola berurut, terdiri dari soal kemampuan berpikir kreatif, kritis, problem solving, komunikasi matematika, kemampuan berpikir aljabar, geometri dan koneksi matematika secara berurutan, masing-masing sebanyak 1 soal.
   g. Pada akhir semester diadakan soal review seluruh bab.
   h. Menambahkan contoh soal berikut pola penyelesaian problem solving dan kemampuan berpikir pada setiap bab.
   i. Menambahkan materi pengayaan berupa soal-soal non-routin, portofolio berupa tugas rumah, diskusi kelompok dan tugas proyek pada setiap bab.
   j. Menambahkan fakta pada setiap sub-bab
   k. Menampilkan penomoran dan sistematika penyajian setiap sub-bab
   l. Menambahkan kalimat pada pengantar dan pendahuluan yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.
   m. Memperbaiki susunan gramatika pada setiap bab dan mengganti penggunaan *interrogative sentence* dan *verb* Pada bab III (persamaan garis lurus).

n. Memperbaiki penulisan kata perintah yang masih kurang tepat, menambahkan kata bantu dalam mendefinisikan konsep dan memperbaiki tanda I'rob yang masih kurang tepat.

3. Pada kelas IX semester I
   a. Menambahkan materi pada bab I (kesebangunan) tentang pembuktian kekongruenan pada dua buah segitiga..
   b. Menambahkan contoh soal atau kuis yang memuat aspek C4 s/d C6 pada setiap bab.
   c. Menambahkan gambar yang relevan dengan materi pada setiap bab.
   d. Menambahkan latihan sebanyak 5 soal pada setiap akhir sub-bab
   e. Menambahkan soal latihan setiap akhir bab pilihan ganda sebanyak 25 soal pilihan ganda dan 15 soal essay.
   f. Membuat soal-soal kemampuan berpikir secara terpola berurut, terdiri dari soal kemampuan berpikir kreatif, kritis, problem solving, komunikasi matematika, kemampuan berpikir aljabar, geometri dan koneksi matematika secara berurutan, masing-masing sebanyak 1 soal.
   g. Pada akhir semester diadakan soal review seluruh bab.
   h. Menambahkan contoh soal berikut pola penyelesaian problem solving dan kemampuan berpikir pada setiap bab.
   i. Menambahkan materi pengayaan mengubah pecahan menjadi persen dengan cara mental aritmetika (bab pecahan), soal-soal non-routin dan portofolio berupa tugas-tugas rumah, diskusi dan tugas proyek pada setiap bab.
   j. Menambahkan materi dan jenis latihan pada bab I (kesebangunan) dan III (statistika dan peluang).
   k. Menambahkan fakta pada setiap sub-bab
   l. Menampilkan penomoran dan sistematika penyajian setiap sub-bab
   m. Menambahkan kalimat pada pengantar dan pendahuluan yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.

n. Memperbaiki susunan gramatika pada setiap bab dan memperbaiki fakta dan definisi pada bab II (bangun ruang sisi lengkung) sesuai dengan susunan gramatika bahasa Inggris.
o. Mengganti kata bangun ruang diartikan pada judul *three dimensional curved surfaces* menjadi *solid curved surfaces*.
p. Menghilangkan huruf alif-lam pada mudhof ilaih (pada terjemahan arab luas permukaan pada bab III) dan perlunya penambahan kata bantu dalam mendefinisikan, menambahkan kata bantu dalam mendefinisikan konsep dan memperbaiki tanda I'rob yang masih kurang tepat pada setiap bab.

IV. Uji Coba Modul Trilingual

Modul yang telah divalidasi oleh *expert judgement* diuji coba sekaligus dilakukan pengembangan awal pembelajaran *trilingual* di kelas VII A, VIII B, IX A MTs Candang Pinggan berjumlah 38 siswa dan kelas VII B, VIII B dan IX J MTs Husnul Khotimah berjumlah 85 siswa. Pembelajaran berlangsung sebanyak tiga kali, setelah pembelajaran berakhir siswa diminta untuk memberikan respon terhadap pembelajaran trilingual yang diberikan dengan mengisi angket respon sebanyak 28 butir pernyataan. Adapun hasil respon tiap indikator yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Respon Siswa MTs Candang Pinggan

Dari diagram diatas, terlihat bahwa hampir seluruh batang menunjukkan sebagian besar yaitu diatas 50% siswa memiliki respon positif terhadap pembelajaran trilingual menggunakan modul. Hal ini diperkuat dengan rata-rata respon siswa sebesar 72,23%.

2. Respon Siswa MTs Husnul Khotimah

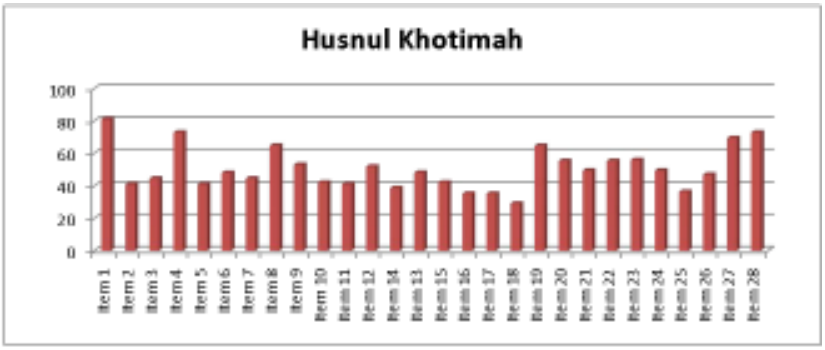

Dari diagram diatas, terlihat bahwa sebagian besar siswa yaitu diatas 50% memiliki respon positif terhadap pembelajaran trilingual menggunakan modul. Hal ini diperkuat dengan rata-rata respon siswa sebesar 50,43%.

3. Perbandingan Respon Siswa MTs Cadang Pinggan dan Husnul Khotimah

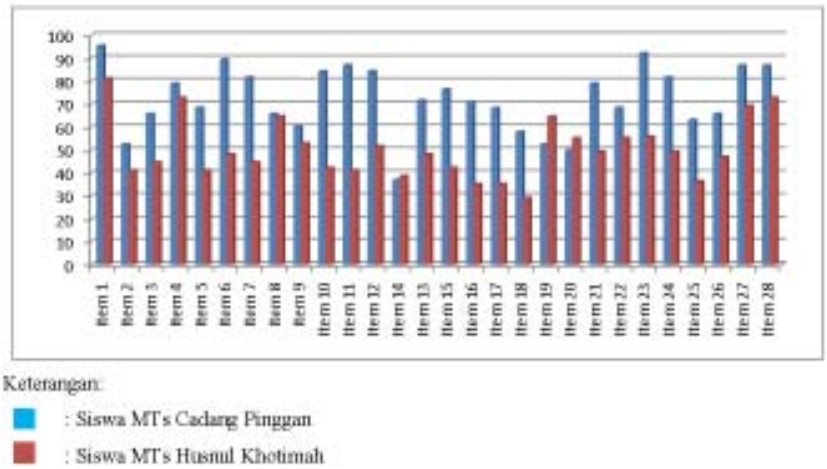

Keterangan:

: Siswa MTs Cadang Pinggan

: Siswa MTs Husnul Khotimah

Dari diagram diatas, terlihat bahwa hampir seluruh item menunjukkan bahwa respon siswa MTs Cadang Pinggan lebih baik dibandingkan dengan respon siswa MTs Husnul

Khotimah. Hal ini juga didukung oleh rata-rata prosentase siswa MTs Cadang Pinggan sebesar 72,23%. Sedangkan rata-rata prosentase siswa MTs Husnul Khotimah sebesar 50,43%

Pembahasan

Pengembangan modul dalam penelitian ini didasarkan pada penilaian modul oleh *expert judgement*, yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan materi pada beberapa bab.
2. Menambahkan contoh soal atau kuis yang memuat aspek C4 s/d C6 pada setiap bab.
3. Menambahkan gambar yang relevan dengan materi pada setiap bab.
4. Menambahkan latihan sebanyak 5 soal pada setiap akhir sub-bab
5. Menambahkan soal latihan setiap akhir bab pilihan ganda sebanyak 25 soal pilihan ganda dan 15 soal essay.
6. Membuat soal-soal kemampuan berpikir secara terpola berurut, terdiri dari soal kemampuan berpikir kreatif, kritis, problem solving, komunikasi matematika, kemampuan berpikir aljabar, geometri dan koneksi matematika secara berurutan, masing-masing sebanyak 1 soal.
7. Pada akhir semester diadakan soal review seluruh bab.
8. Menambahkan contoh soal berikut pola penyelesaian problem solving dan kemampuan berpikir pada setiap bab.
9. Menambahkan materi pengayaan berupa soal-soal non-routin dan portofolio berupa tugas-tugas rumah, diskusi dan tugas proyek pada setiap bab.
10. Menambahkan materi dan jenis latihan pada beberapa bab.
11. Menambahkan fakta pada hampir setiap sub-bab
12. Menampilkan penomoran dan sistematika penyajian setiap sub-bab
13. Menambahkan kalimat pada pengantar dan pendahuluan yang menggambarkan isi buku secara singkat, tujuan penulisan dan mengajak peserta didik untuk mengenal serta memahami isi buku.
14. Memperbaiki susunan gramatika sesuai dengan susunan

gramatika bahasa Inggris.

15. Mengganti istilah bahasa Arab dan Inggris yang belum akurat.
16. Memperbaiki susunan gramatika bahasa Arab dan memperbaiki tanda I'rob yang masih kurang tepat pada setiap bab.

Penerapan modul matematika *trilingual* berupa pembelajaran di kelas merupakan ujicoba penggunaan modul. Hasil uji coba diperoleh dalam bentuk respon siswa terhadap penggunaan modul dan penerapan pembelajaran *trilingual*. Pada siswa MTs Candang Pinggan, hasil respon dapat disimpulkan yaitu pada indikator memperhatikan guru yaitu item 1 dan 3 siswa sebagian besar merespon positif yaitu sebesar 95,4% dan 65,8%. Indikator inisiatif/kemauan mengerjakan tugas yaitu item 4 dan 7 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 78,9% dan 81,6%. Indikator kemampuan belajar secara mandiri yaitu item 2 dan 6 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 52,6% dan 89,4%. Indikator pengakuan siswa terhadap hasil pembelajaran yaitu item 5 dan 17 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 68,5% dan 68,4%. Indikator kemudahan belajar yaitu item 8 dan 26 sebagian besar siswa merespon positif yaitu masing-masing sebanyak 65,8%. Indikator kemampuan siswa mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yaitu item 9 dan10 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 60,5% dan 84,2%. Indikator pengakuan adanya relevansi dalam materi yaitu item 11, 12 dan 14 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 86,9% , 84,3% dan 36,9%. Indikator mengetahui pokok-pokok materi yang dipelajari yaitu item 13 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 71,7%. Indikator mengakui adanya kemudahan dalam mempelajari materi yaitu item 15 dan 16 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 76,3% dan 71%. Indikator kemudahan dalam mengerjakan soal yaitu item 18 dan 19 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 57,9% dan 52,6% . Indikator kemampuan menggunakan tiga bahasa yaitu item 20 dan 21 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 50% dan 79%. Indikator siswa berinteraksi dengan guru yaitu item 22 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 68,5%. Indikator siswa merasa dihargai yaitu item 23

sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 92,1%. Indikator keaktifan dalam pembelajaran yaitu item 24 dan 25 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 81,6% dan 63,2%. Indikator siswa dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yaitu item 27 dan 28 sebagian besar siswa merespon positif yaitu masing-masing sebesar 86,8%.

Pada siswa MTs Husnul Khotimah diperoleh hasil respon dapat disimpulkan yaitu pada indikator memperhatikan guru yaitu item 1 dan 3 siswa sebagian besar merespon positif yaitu sebesar 81,1% dan 44,7%. Indikator inisiatif/kemauan mengerjakan tugas yaitu item 4 dan 7 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 72,9% dan 44,7%. Indikator kemampuan belajar secara mandiri yaitu item 2 dan 6 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 41,1% dan 48,2%. Indikator pengakuan siswa terhadap hasil pembelajaran yaitu item 5 dan 17 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 41,2% dan 35,3%. Indikator kemudahan belajar yaitu item 8 dan 26 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 64,8% dan 47,1%. Indikator kemampuan siswa mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yaitu item 9 dan10 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 53% dan 42,3%. Indikator pengakuan adanya relevansi dalam materi yaitu item 11, 12 dan 14 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 41,2% , 51,8% dan 38,8%. Indikator mengetahui pokok-pokok materi yang dipelajari yaitu item 13 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 48,3%. Indikator mengakui adanya kemudahan dalam mempelajari materi yaitu item 15 dan 16 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 42,3% dan 35,3%. Indikator kemudahan dalam mengerjakan soal yaitu item 18 dan 19 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 29,2% dan 64,7% . Indikator kemampuan menggunakan tiga bahasa yaitu item 20 dan 21 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 55,3% dan 49,4%. Indikator siswa berinteraksi dengan guru yaitu item 22 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 55,3%. Indikator siswa merasa dihargai yaitu item 23 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebanyak 55,9%. Indikator keaktifan dalam pembelajaran yaitu item 24 dan 25 sebagian besar siswa merespon

positif yaitu sebanyak 49,4% dan 36,5%. Indikator siswa dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yaitu item 27 dan 28 sebagian besar siswa merespon positif yaitu sebesar 69,4% dan 72,9%.

Dari kedua hasil tersebut, diperoleh rata-rata respon siswa/santri MTs Candang Pinggan sebesar 72,23% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan rata-rata respon siswa/santri MTs Husnul Khotimah sebesar 50,43% termasuk dalam kategori cukup. Hasil setiap indikator ataupun rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum siswa di kedua sekolah merespon secara positif terhadap penerapan pembelajaran matematika menggunakan modul *trilingual*.

V. Kesimpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Desain modul *Trilingual* Arab-Inggris-Indonesia pada Mata Pelajaran Matematika telah menghasilkan modul matematika SMP/MTs kelas VII semester I, kelas VIII semester I dan kelas IX semester I dengan tahapan-tahapan perencanaan, pengembangan, (validasi dan uji coba) dan revisi.
2. Setelah penerapan pembelajaran trilingual menggunakan modul diperoleh rata-rata respon siswa/santri MTs Candang Pinggan sebesar 72,23% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan rata-rata respon siswa/santri MTs Husnul Khotimah sebesar 50,43% termasuk dalam kategori cukup. Keduanya menunjukkan respon yang positif terhadap penerapan pembelajaran menggunakan modul trilingual.
3. Terdapat perbedaan respon terhadap penerapan pembelajaran trilingual menggunakan modul antara siswa/santri MTs Candang Pinggan dan siswa/santri MTs Husnul Khotimah dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005.

Saran

1. Berdasarkan hasil respon yang positif terhadap penerapan pembelajaran matematika menggunakan modul trilingual,

pembelajaran matematika trilingual menggunakan modul dapat diterapkan di MTs dalam lingkungan pesantren yang mengadakan pembiasaan berbahasa Inggris dan Arab.

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran menggunakan modul *trilingual* Indonesia –Arab- Inggris.
3. Sebaiknya dilakukan pengembangan secara berkelanjutan mengenai modul dan pengembangan pembelajaran *trilingual* Indonesia –Arab- Inggris agar didapatkan modul dan pembelajaran yang lebih efektif guna mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

Alamat Redaksi:
Lembaga Penelitian (Lemlit)
IAIN SYEKH NURJATI Cirebon,
Jl. Perjuangan By Pass, Sunyaragi Cirebon 45132
Jawa Barat Indonesia
Phone 0231-481264, ext 109, Fax 0231-489926

holistik

Journal for Islamic Social Sciences

Volume 14, Number 01, 2013/1435 H

ISSN : 1412-3564

Penanggungjawab
Ilman Nafi'a

Redaktur
Septi Gumiandari

Penyunting
Burhanudin Sanusi

Kesekretariatan
Akhmad Yani
Mahrus
Muhammad Maemun
A. Syatori
Hj. Hery Puji Siswati

DAFTAR ISI

Muslihudin 1
MODEL PESANTREN KADER;
Relasi Ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS, serta Artikulasinya dalam Kegiatan Kepesantrenan

Budi Manfaat 35
PRAKTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PONDOK PESANTREN DAR AL-TAUHID CIREBON

Nuryana 55
KONSISTENSI PENDIDIKAN KARAKTER DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UN DESA KEPUH PALIMANAN CIREBON

Muzaki 79
PENGARUH KEPEMIMPINAN KYAI TERHADAP KECERDASAN EMOSI SANTRI DI PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU BABAKAN CIWARINGIN CIREBON

Saifuddin 101
ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN PESANTREN (Studi Terhadap Pengelolaan Ma'had Aly di PP. Babakan Ciwaringin dan PP. Asembagus Situbondo)

Ilman Nafi'a 125
FATWA PLURALISME DAN PLURALITAS AGAMA MUI (Majlis Ulama Indonesia) DALAM PERSPEKTIF TOKOH ISLAM CIREBON

Wardah Nuroniyah 151
FEMINISME DALAM PESANTREN: NARASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN BUNTET CIREBON

Juju Jumena 175
RELASI STATUS ASET YAYASAN DAN LEMBAGA PONDOK PESANTREN AS –SALAFIYAH BODE LOR KECAMATAN PLUMBON

Reza Oktiana Akbar 201
DESAIN MODUL DAN PEMBELAJARAN TRILINGUAL (ARAB-INGGRIS-INDONESIA) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI MTS CANDANG PINGGAN DAN KHUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN